SEJARAH DAERAH BALI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

959.857

PERPUSTAKAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN JAKARTA

SEJARAH DAERAH BALI

TANGGAL	No. INDUK
14 JAN 1981	135

Sejarah Kebangkitan Nasional (± 1900 — 1942) Daerah Bali

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA
PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH
1977 / 1978

TANGGAL	No. INDUK
7 AUG 1984	1091

PENGANTAR

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam tahun anggaran 1977/1978 kegiatannya telah dapat menjangkau seluruh Indonesia.

Proyek ini bertujuan :

> "Mengadakan penggalian, penelitian dan pencatatan warisan budaya guna pembinaan, pengembangan dan ketahanan nasional."

Adapun sasaran proyek ini ialah :

Untuk menghasilkan 5 (lima) buah naskah dari masing-masing daerah, yakni :

- Sejarah Daerah, dengan tema SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL,
- Adat istiadat Daerah, dengan tema ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH,
- Geografi Budaya Daerah, dengan tema PENGARUH MIGRASI PENDUDUK TERHADAP PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH,
- Ceritera Rakyat Daerah, dengan tema TOKOH MITOLOGIS DAN LEGENDARIS,
- Ensiklopedi Musik/Tari Daerah.

Kegiatan proyek ini dibagi atas dua, yaitu :

Kegiatan di Pusat, meliputi :

> Koordinasi, pengarahan/penataran, konsultasi, evaluasi serta penyempurnaan naskah.

Kegiatan di Daerah meliputi :

> Survai lapangan sampai dengan penyusunan naskah lima aspek seperti tersebut di atas.

Pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dapat disesuaikan tepat pada waktunya, sehingga pada akhir tahun anggaran 1977/1978, proyek dapat menghasilkan naskah ini.

Meskipun demikian kami menyadari bahwa naskah-naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tingkat atau tahap pencatatan, sehingga di sana-sini

masih terdapat kekurangan-kekurangan yang diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Kerja sama antara proyek dengan semua pihak, baik dari Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Dep. P. dan K. di Daerah, Pemerintah Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, LEKNAS, LIPI, dan Tenaga ahli perorangan, telah dapat dibuktikan dan diwujudkan dalam naskah-naskah ini.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH BALI ini, kami perlu menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah, Bidang Kesenian, Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan, Departemen P. dan K. Propinsi Bali.
2. Pimpinan Perguruan Tinggi di Denpasar, Bali.
3. Pemerintah Daerah Propinsi Bali.
4. Pimpinan serta segenap staf Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Propinsi Bali.
5. Tim Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Propinsi Bali.
6. Tim penyempurna naskah di Pusat yang terdiri dari :
   - Konsultan/Anggota : 1. Prof. Dr. I.B. Mantra
     2. Dr. Astrid S. Susanto
     3. Abdurachman Surjomihardjo
     4. A.B. Lapian
   - Ketua : Sutrisno Kutoyo
   - Sekretaris : M. Soenjata Kartadarmadja
   - Anggota : 1. Anhar Gongong
     2. Mardanas Safwan
     3. Masjkuri
     4. Surachman
     5. Muchtaruddin Ibrahim
     6. Sri Sutjiatiningsih
7. Editor : Sutrisno Kutoyo
8. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan naskah ini.

Akhirnya perlu kami kemukakan bahwa dengan terbitnya naskah ini mudah-mudahan ada manfaatnya terhadap bangsa dan negara kita.

Pemimpin Proyek Penelitian dan
Pencatatan Kebudayaan Daerah,

Bambang Suwondo

NIP 130117589

DAFTAR ISI

BAB		HALAMAN
	KATA PENGANTAR	iii
1.	**PENDAHULUAN**	1
	1.1. TUJUAN PENELITIAN	1
	1.2. MASALAH	2
	1.3. RUANG LINGKUP	2
	1.4. PERTANGGUNGJAWABAN ILMIAH DAN PROSEDUR PENELITIAN	3
	1.5. HASIL AKHIR	5
2.	**KEADAAN DI BALI PADA AKHIR ABAD XIX**	6
	2.1. PEMERINTAHAN	6
	2.2. SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA	13
	2.3. PERKEMBANGAN ALAM PIKIRAN DAN KEPERCAYAAN	18
3.	**KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN + 1900 – 1928**	23
	3.1. PENGARUH POLITIK ETIKA DI BALI	23
	3.2. PENDIDIKAN	25
	3.3. TUMBUHNYA ORGANISASI-ORGANISASI YANG MERUPAKAN EMBRIO DARI KEBANGKITAN NASIONAL	27
	3.3.1. *Perkumpulan Suita Gama Tirta*	27
	3.3.2. Perkumpulan *Shanti*	28
	3.3.3. *Satya Samudaya Baudanda Bali Lombok*	29
	3.3.4. *Perkumpulan Bali Adnyana*	30
	3.3.5. *Perkumpulan Surya Kanta*	32
	3.3.6. *Perhimpunan Tjatur Wangsa Derya Gama Hindu Bali*	36
	3.4. KEADAAN DI BALI SEKITAR PERANG DUNIA I DAN PENDIRIAN VOLKSRAAD	37
	3.4.1. *Sikap pemerintah India Belanda*	37
	3.4.2. *Keadaan masyarakat di Bali*	40
	3.4.3. *Hubungan dengan Volksraad*	42
	3.4.4. Anggota Volksraad yang mewakili Bali	43

3.5. PERJUANGAN DI DAERAH 44
3.5.1. *Interaksi dengan Sumpah Pemuda* 44
4. KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN 1928 – 1942 . 48
4.1. PENGARUH POLITIK PEMERINTAH HINDIA BELANDA PADA TAHUN ± 1930 48
4.2. PERTUMBUHAN ORGANISASI 50
4.2.1. *Perkumpulan Eka Laksana* 50
4.2.2. *Perkumpulan Bali Darma Laksana* 50
4.2.3. *Perkumpulan Putri Bali Sadar* 52
4.2.4. *Persatuan Pemuda Bali Lombok* 53
4.2.5. *Partai Indonesia Raya (Parindra)* 54
4.3. KEADAAN DI BALI MENJELANG KERUNTUHAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA DAN KEDATANGAN JEPANG 54
4.3.1. *Sikap pemerintah Hindia Belanda* 54
4.3.2. *Keadaan masyarakat di Bali* 57
4.3.3. *Sikap masyarakat terhadap pemerintah Hindia Belanda* 59
4.3.4. *Keadaan pemerintah Hindia Belanda pada saat terakhir di Bali* 61
4.4. KEDATANGAN PASUKAN PENDUDUKAN JEPANG
4.4.1. *Propaganda Jepang yang terasa di Bali* ... 63
4.4.2. *Waktu pendaratan Jepang di Bali* 64
4.4.3. *Sikap Jepang terhadap aparatur pemerintah Belanda* 66
4.4.4. *Sikap Jepang terhadap Bangsa Indonesia*.. 67
4.4.5. *Sikap bangsa Indonesia terhadap Jepang*.. 70
5 PENUTUP 77
DAFTAR BIBLIOGRAFI 79
LAMPIRAN 81

1. PENDAHULUAN

1.1. TUJUAN PENELITIAN

Ditinjau dari sudut ruang lingkup, tujuan penelitian ini dapat dibedakan atas dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dimaksudkan agar Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya mampu menyediakan data-data dan informasi kebudayaan untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian dan masyarakat; sedangkan tujuan khusus bermaksud mengumpulkan dan menyusun bahan Sejarah Daerah dan masa Kebangkitan Nasional dan memantapkan konsep-konsep yang relevan.

Seperti kita telah menyadari bahwa untuk mempelajari Sejarah Nasional secara lengkap dan mendalam, maka Sejarah Daerah (regional) sebagai bagian dari Sejarah Nasional perlu mendapat perhatian untuk diteliti dan dipelajari. Demikianlah halnya seperti Sejarah Daerah Bali pada periode Kebangkitan Nasional (1900-1942) belum banyak diteliti dan dipelajari. Dengan usaha Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah ini diharapkan Sejarah Kebangkitan Nasional di Bali dapat dicatat dan diteliti sesuai dengan apa yang menjadi tujuan tersebut di atas. Beberapa manfaat yang dapat diambil atas usaha ini antara lain :

1. Mengumpulkan data yang masih tersebar luas di masyarakat di samping menginterpretasikan sumber-sumber yang tersedia di beberapa perpustakaan, lembaga pemerintah dan pada koleksi perseorangan.
2. Mengumpulkan data-data dari beberapa responden, yaitu dari orang-orang yang mengalami atau mengetahui kejadian tersebut yang kini orang-orangnya sudah semakin tua bahkan banyak yang telah meninggal. Hal seperti ini perlu segera dilakukan dengan demikian berarti mencatat untuk mengabdikan sumber sejarah untuk diketahui dan "diserah terimakan" kepada generasi penerus.
3. Menyelamatkan sumber-sumber sejarah yang mungkin dapat hilang atau musnah dari orang-orang yang kurang perhatiannya terhadap sejarah.
4. Dengan usaha penulisan sejarah seperti ini besar artinya bagi pembentukan jiwa bangsa untuk menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan dapat menghargai nilai luhur bangsanya melalui bidang Sejarah Nasional ini.

1.2. MASALAH

Kebangkitan Nasional yang terjadi di Daerah-daerah di Indonesia mempunyai corak yang berbeda-beda. Hal ini sangat ditentukan oleh faktor situasi dan kondisi daerah itu masing-masing.

Dengan memperhatikan kejadian-kejadian di daerah pada turun waktu yang sama, kita akan dapat mengetahui bagaimana kesamaan dan perbedaan corak pertumbuhan sejarah pergerakan di daerah, khususnya dalam periode kebangkitan nasional. Demikianlah apabila kita bandingkan pertumbuhan sejarah kebangkitan nasional di Bali dengan di Jawa, jelas mempunyai gaya dan corak tersendiri. Dari berbagai aspek kehidupan sosial dapat kita kemukakan beberapa permasalahan seberapa jauh Sejarah Kebangkitan Nasional di Bali mendapat pengaruh dari pertumbuhan pergerakan di Jawa? Sejauh mana kondisi sosial di daerah ikut menentukan? Sejauh mana politik kolonial Belanda memberi kemungkinan terhadap pertumbuhan nasionalisme di Bali? Bagaimana peranan pendidikan dalam ikut menyuburkan tumbuhnya benih-benih organisasi di daerah? Dengan mempelajari permasalahan tersebut di atas kita akan mendapat gambaran yang jelas tentang berbagai variasi dan keunikan yang ada di daerah selama periode tersebut dan ini akan memperkaya pengetahuan kita dalam mempelajari Sejarah Nasional Indonesia secara lebih lengkap.

1.3. RUANG LINGKUP

Penulisan ini mengambil ruang lingkup daerah (scope-spatial) meliputi seluruh daerah Propinsi Tingkat I Bali yang terdiri dari delapan Kabupaten yaitu :
Kabupaten Buleleng dengan ibu kotanya Singaraja, Kabupaten Jembrana dengan ibu kotanya Negara, Kabupaten Tabanan dengan ibu kotanya Tabanan, Kabupaten Badung dengan ibu kotanya Denpasar, Kabupaten Gianyar dengan ibu kotanya Gianyar, Kabupaten Klungkung dengan ibu kotanya Klungkung, Kabupaten Karangasem dengan ibu kotanya Amlapura.

Seperti telah disinggung di atas bahwa setiap daerah mempunyai situasi dan kondisi yang berbeda-beda satu sama lain ini bearti bahwa tidak semua daerah memiliki potensi atau peranan. penting dalam pertumbuhan Kebangkitan Nasional di Daerah. Berdasarkan hal tersebut di daerah Bali pada bagian pertama abad

ke-20 ini daerah Singarajalah yang merupakan daerah berperanan dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Hal ini disebabkan karena Singaraja memiliki dua faktor yang sangat penting yaitu sebagai kota pelabuhan dan sebagai pusat pemerintahan. Sebagai kota pelabuhan dengan sendirinya daerahnya menjadi lebih terbuka, sehingga pengaruh luar akan lebih mudah masuk dan mempengaruhi masyarakat setempat sedangkan sebagai pusat pemerintahan Singaraja berkembang menjadi kota yang ramai. Lebih-lebih kemudian setelah disusul oleh pendirian beberapa sekolah. Kedua faktor tersebut memberikan situasi dan kondisi yang lebih memungkinkan untuk menjadi daerah yang lebih maju. Di samping Singaraja, daerah-daerah lainnya yang memiliki potensi dalam sejarah kebangkitan Nasional di Bali adalah Denpasar, Klungkung, Karangasem dan beberapa daerah lainnya yang sedikit banyak juga kena imbas dalam pertumbuhan Kebangkitan Nasional itu.

Ditinjau dari ruang lingkup waktu *(Scope temporal)* uraian ini menitikberatkan antara tahun 1900 – 1942 yaitu sejak mulai masuknya ide-ide pembaharuan atau sejak timbulnya organisasi-organisasi yang merupakan embrio dari Kebangkitan Nasional di Bali. Untuk menjelaskan suatu kejadian sudah tentu kita harus memperhatikan proses kejadian itu, dengan lain perkataan melihat suatu kejadian itu dengan "kaca-mata" perspektif sejarah. Rentetan kejadian itu akan mudah dimengerti apabila kita selalu menghubungkan kejadian-kejadian itu dengan kejadian-kejadian sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui sebab-sebab kejadian itu. Oleh sebab itu ada kalanya kita meninjau kejadian-kejadian yang beberapa tahun mendahuluinya dengan maksud seperti tersebut di atas.

1.4. PERTANGGUNGAN JAWABAN ILMIAH DAN PROSEDUR PENELITIAN

Dengan penyusunan penulisan ini sudah tentu mempergunakan tehnik penulisan sejarah dan metodologi sejarah artinya apa-apa yang secara umum dilakukan oleh seorang penulis sejarah sejak itu mengumpulkan data, pengolah data sampai kepada penulisan sesuai dengan prosedur penelitian sejarah.

Pengumpulan data-data Sejarah Kebangkitan Nasional di Bali kebanyakan berdasarkan sumber-sumber tertulis baik yang diambil dari sumber primer maupun dari sumber sekunder.

Di perpustakaan Gedong Kirtya Singaraja masih kita temukan beberapa naskah berupa memori sesuatu jabatan *(memorie van overgave)* yang cukup membantu untuk mengetahui keadaan di Bali antara tahun 1900 – 1930 mengenai situasi pemerintahan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat Bali pada waktu itu. Selain itu penulis bersyukur pula bahwa di Gedong Kirtya sampai sekarang masih menyimpan majalah-majalah yang terbit antara tahun 1920 – 1936 antara lain majalah bulanan *Surya-Kanta* yang terbit antara tahun 1925 – 1927 dan majalah bulanan *Bali Adnyana* yang terbit di Bali antara tahun 1924 – 1929 dan majalah-majalah yang terbit sesudah tahun "tiga puluhan", antara lain majalah *Bhawanegara* dan majalah *Djatajoe*. Dari majalah tersebut di atas penyusun banyak memperoleh data-data mengenai pertumbuhan Pergerakan Nasional di Bali terutama pertumbuhan organisasi-organisasi dalam tingkat permulaan dari Pergerakan Nasional. Di samping kegembiraan atas adanya sumber-sumber yang dapat memberikan informasi dalam penyusunan naskah ini, namun perlu juga dikemukakan bahwa masih terdapat kekosongan sumber terutama sumber tertulis dari pihak resmi Pemerintah Belanda terhadap pertumbuhan Pergerakan Nasional di Bali dan sumber pada periode masa Pemerintahan Jepang di Bali.

Hal seperti ini dapat dimaklumi bahwa pada masa pemerintahan kolonial di Bali sensor terhadap tulisan-tulisan baik laporan maupun tulisan di majalah yang terbit di Jawa tidak ada yang masuk ke Bali. Rupanya hal ini sejalan dengan politik kolonial Belanda yang menginginkan Bali terisolasi dari pengaruh-pengaruh politik pergerakan di Jawa serta mempertahankan Bali menjadi "museum hidup".

Hilangnya sumber-sumber pada masa pemerintahan Jepang ialah sebagai akibat revolusi pisik di Bali selama revolusi kemerdekaan yaitu banyak suratkabar yang dibakar atau tidak adanya pengertian akan manfaat suratkabar-suratkabar atau brosur-brosur yang terbit pada saat itu bagi kepentingan penelitian sejarah.

Hal-hal seperti inilah bagi peneliti sejarah dasar mengalami beberapa kesukaran. Untunglah problema-problema ini dapat sedikit diatasi dengan jalan melakukan wawancara kepada orang-orang yang dipandang mampu untuk memberikan keterangan yang dianggap perlu. Oleh karena terbatasnya sumber yang tersedia itu

diusahakan agar penulisan ini bersifat diskriptis analitis melalui pendekatan *(approach)* sosial atau pendekatan multidomensi sesuai dengan kerangka isi dari penulisan ini.

1.5. HASIL AKHIR

Naskah ini aslinya disusun oleh suatu Tim di Daerah Bali, menurut ketentuan, yaitu *Terms of reference* seperti yang dibuat oleh Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah (P3KD). Kemudian naskah itu mengalami proses penyempurnaan yang dilakukan oleh Tim di daerah dengan P3KD dari Pusat, sehingga hasilnya merupakan naskah yang sudah disiapkan untuk dilakukan penyuntingan atau editing.

Dalam melakukan penyuntingan ini diperhatikan tiga hal, yaitu pertama, segi kebahasaan, antara lain penyempurnaan kalimat, penyesuaian beberapa istilah dan tata-nama serta ejaan menurut tata ejaan yang sudah disempurnakan. Kedua, adalah materi atau bahan itu sendiri, manakala dirasakan perlu penyempurnaan ataupun pelengkapan. Ketiga, adalah pengajian ataupun pendekatan termasuk perwajahan secara keseluruhan.

Pendekatan yang diambil dari penyusunan naskah ini ialah pendekatan regiosentris yang diperkirakan paling cocok untuk penyempurnaan buku yang bercorak kesejarahan di daerah. Selanjutnya mengenai naskah buku ini sendiri, kiranya cara pendekatan regiosentris itu sudah dipergunakan dan keseluruhan materinya sudah sesuai dengan *terms of reference.* Buku ini sebaiknya dipandang, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sebagai usaha perintisan.

2. KEADAAN DI BALI PADA AKHIR ABAD XIX

2.1. PEMERINTAHAN

2.1.1. Struktur Pemerintahan Tradisional

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai sistem pemerintahan di Bali pada akhir abad XIX perlu diketahui terlebih dahulu mengenai struktur pemerintahan yang ada pada waktu itu.

Struktur pemerintahan tradisional sudah sejak lama melandasi sistem pemerintahan di Bali. Hal ini tampak jelas di dalam sistem birokrasi tradisional atas daerah kerajaan yang tetap berlangsung sampai akhir abad XIX yaitu saat-saat timbulnya kontak-politik dengan pemerintahan kolonial Belanda.

Situasi kerajaan Tradisional di Bali sekitar tahun 1800 terdiri atas 9 kerajaan yaitu :

1. Kerajaan Buleleng sebelum periode tahun 1800 diperintah oleh raja-raja Keturunan Panji Sakti, kemudian sejak tahun 1804 diperintah oleh keturunan raja-raja Karangasem.
2. Jemarana pada tahun 1950 ada di bawah kerajaan Buleleng.
3. Tabanan merupakan kerajaan yang tidak berdiri sendiri, sebagian di bawah kerajaan Badung dan sebagian lagi di bawah kerajaan Buleleng dan Karangasem.
4. Kerajaan Bandung yang didirikan oleh Gusti Ngurah Made Pemecutan, pada tahun 1800 menyatakan berdiri sendiri (melepaskan diri) dari kerajaan Mengwi.
5. Pada tahun 1800 Klungkung berhasil mengalahkan Bangli, tetapi pada tahun 1805 Bangli berhasil membebaskan diri atas bantuan Karangasem.
6. Gianyar ada di bawah pemerintahan Klungkung.
7. Kerajaan Karangasem sekitar tahun 1800 menjadi kerajaan yang berhegemoni di pulau Bali dan pulau Lombok.

Raja

Susunan pemerintahan diatur mengikuti saluran *hierarchie* dari tingkat atas sampai tingkat bawah di mana kedudukan tertinggi dipegang oleh seorang raja. Corak dan struktur pemerintahan tradisional pada umumnya tidak terdapat perbedaan, hanya dalam kebijaksanaan politik pemerintahan sangat ditentukan oleh pribadi raja. Kekuasaan raja sangat besar pengaruhnya di dalam masyarakat sehingga pribadi seorang raja seolah-olah sebagai pemilik kekuasaan tunggal di seluruh daerah kerajaan. Hubungan raja dengan rakyat diatur melalui suatu sistem birokrasi tradisional yang sudah merupakan pola dari sistem pemerintahan yang berlaku di seluruh kerajaan-kerajaan di Bali.

Seorang raja beserta keluarganya hidup di dalam sebuah istana yang disebut *Puri.* Puri merupakan lambang kebangsawanan sebagai klas penguasa dengan segala bentuk dan perdenahannya yang juga telah menjadi pola kebudayaan istana yang ikut memberi corak di dalam struktur pemerintahan tradisional itu. Tata kehidupan para bangsawan tercermin di dalam tata kelakuan, tata kehidupan, lambang-lambang kebangsawanan seperti bentuk rumah, cara berpakaian, bahasa dan sebagainya. Demikian pula benda-benda pusaka dan segala benda-benda upacara lainnya yang dianggap mempunyai kesaktian atau yang bersifat religius-magis itu menambah wibawa dan pengaruh raja terhadap bawahannya.

Patih

Berdasarkan sumber-sumber babad di Bali, jabatan patih memang sudah ada sejak lama. Kedudukan raja dan patih di dalam suatu babakan pemerintahan kadang-kadang sukar dibedakan. Dilihat dari pelapisan masyarakat di Bali maka sistem di dalam kasta ikut menentukan adanya sistem status di dalam pemerintahan yang menjadi golongan penguasa adalah golongan dari kasta ksatrya.

Menyinggung masalah sistem kasta ini, pelapisan masyarakat di Bali mengenal empat tingkatan kasta yang ditentukan atas dasar kelahiran (*jati*) dan tugas dari kerajaan (dharma). Hal ini jelas masih tampak pada masa pemerintahan sebelum kena pengaruh sistem pemerintahan kolonial Belanda. Adapun keempat kasta itu ialah kasta *Brahmana* yang merupakan kasta tertinggi dengan tugas kewajibannya dalam hal adat dan agama; kasta *Ksatrya*

mempunyai tugas dan kewajiban dalam bidang pemerintahan; kasta *Wesia* mempunyai tugas dan kewajiban dalam bidang pertanian dan perdagangan; sedangkan kasta yang keempat yaitu *Sudra* atau juga menyebut dirinya dengan *jaba,* mempunyai tugas dan kewajiban membantu ketiga kasta tersebut di atas.

Dilihat dari pelapisan ini maka jabatan patih berada langsung di bawah raja dan dilihat dari keturunan (genealogis) ada kalanya seorang patih itu satu keturunan dengan raja. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini pada masa pemerintahan raja-raja keturunan Karangasem yang memegang tampuk pemerintahan di Buleleng (1804 – 1849) di mana jabatan patih pernah terdapat dua kali yaitu pada masa pemerintahan I Gusti Gde Karangasem dengan patihnya I Gusti Bagus Djelantik Banjar dan kemudian pada masa pemerintahan I Gusti Made Karangasem dengan patihnya I Gusti Ketut Djelantik.

Bagaimana dengan peranan patih di Bali pada abad XIX secara lengkap, belum ada sumber yang memberikan keterangan secara jelas. Satu-satunya sumber yang dapat kita pelajari untuk mengetahui bagaimana kedudukan seorang patih ialah *Babad Gaguritan Rusak Buleleng,* yaitu pada masa pemerintahan I Gusti Ketut Djelantik. Pada periode ini kedudukan patih adalah sebagai wakil raja sehingga patih dapat menentukan sikap kerajaan dalam hubungan dengan politik luar negeri maupun politik dalam negeri, sehingga seorang patih mempunyai tugas utama untuk mengepalai pusat ibukota kerajaan. Tugas-tugas patih baik terhadap jabatan sipil maupun militer menjadi tanggung jawabnya. [4])

Hal ini dapat dibuktikan pada waktu meletusnya perang Buleleng melawan Belanda (tahun 1846) adalah sebagai akibat keputusan yang diambil oleh patih I Gusti Ketut Djelantik. Di samping tugas-tugas tersebut di atas, dapat juga seorang patih bertindak sebagai duta yang berkuasa penuh di dalam menghadiri perundingan-perundingan antara kerajaan-kerajaan lainnya di Bali dan terhadap orang-orang asing. Di dalam masa perang, kedudukan patih adalah sebagai panglima perang. Dia menyiapkan segala yang berhubungan dengan perlengkapan perang misalnya: pengerahan laskar, menyiapkan bala bantuan, mengatur taktik perlawanan, memerintahkan membuat benteng dan sebagainya.

Di dalam bidang hukum, seorang patih juga ikut mengawasi perundang-undangan yang dikeluarkan oleh kerajaan misalnya: ikut mengadili perahu-perahu yang melanggar *awig-awig paswaran*

atau pelanggaran terhadap hak *tawankarang*. Di dalam sistem pengangkatan, pada umumnya seorang patih diangkat oleh raja dan dipilih dari orang-orang yang masih ada hubungan keluarga dengan raja itu. Di dalam struktur pemerintahan tradisional di Bali kedudukan patih tidak selalu berada di bawah raja, kadang-kadang dapat pula berada sejajar. Dengan demikian jabatan patih kadang-kadang hanya bertujuan menghindari percekcokan keluarga semata-mata seperti menghindari adanya perang saudara yang sering terjadi akibat dari perebutan tahta kerajaan atau kekuasaan.

Punggawa

Struktur pemerintahan di bawah jenjang patih adalah punggawa. Seorang punggawa berkewajiban membantu raja dalam bidang pemerintahan, kadang-kadang dapat pula membantu dalam urusan adat dan agama di daerah kekuasaannya. Dilihat dari sudut hierarkhi (garis komando), seorang raja dapat langsung memberikan perintah kepada seorang punggawa demikian pula sebaliknya seorang punggawa bertanggung jawab langsung kepada raja. Hal ini menyebabkan kedudukan punggawa dalam masyarakat tradisional cukup tinggi. Jabatan punggawa pada umumnya diduduki oleh keluarga bangsawan dari kasta Ksatrya dan ada kalanya juga dari golongan Brahmana. Wewenang seorang Punggawa dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur wilayahnya mendapat kekuasaan penuh dari raja, terutama dalam hal memutuskan perkara yang berhubungan dengan adat istiadat dan agama.

Pengangkatan dan pemberhentian seorang punggawa terletak di tangan raja. Kebiasaan yang berlaku dalam sistem pemerintahan tradisional, pengangkatan seorang punggawa itu tidak semata-mata berdasarkan atas kecakapan, melainkan faktor keturunan merupakan faktor yang sangat penting. Oleh sebab itu sering pula menimbulkan pembrontakan-pembrontakan, perang saudara yang kadang-kadang juga dapat meluas di dalam masyarakat.

Perbekel

Untuk mengetahui kedudukan serta tugas-tugas perbekel selaku kepala desa perlu diketahui terlebih dahulu tentang bentuk dan susunan desa di Bali.

Di Bali sampai sekarang ini masih dapat dibedakan antara desa yang masih bercorak kuno seperti desa Tenganan Pagringsingan di wilayah Karangasem, desa Trunyan di kabupaten Bangli dan beberapa desa yang terletak di kabupaten Buleleng antara lain

desa Sembiran, desa Sidetapa, Campaga, Tigawan. Pada desa-desa Kuno itu fungsi *desa* dan *banjar* dipisahkan dengan jelas. Desa hanya bertugas mengurus hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan sedangkan banjar bertugas melakukan kegiatan untuk kepentingan warganya. Suatu badan yang disebut *duluan desa* terdiri dari orang-orang tua yang dipilih berdasarkan peraturan-peraturan setempat. Pemilihan para anggotanya dilakukan oleh *Krama desa*. Desa-desa di Bali pada umumnya memiliki kekayaan berupa tanah desa yang umumnya disebut *pecatun desa*. Di dalam sebuah desa masih dibagi menjadi beberapa kelompok yang disebut: *banjar*. Banjar ini dikepalai oleh seorang *Klian* dan dibantu oleh seorang *Penyarikan* yang dipilih berdasarkan atas kecakapan dan keturunan. Ada kalanya pengisian jabatan itu disediakan kepada anggota keturunan pribumi kuno seperti golongan *Pasek, Bendesa* dan *Gaduh*. [5])

Desa-desa yang timbul kemudian yang berada di dataran-dataran rendah sudah banyak kehilangan corak kekunoannya karena penduduk aslinya sudah bercampur dengan pendatang-pendatang baru. Dengan demikian organisasi desa seperti badan orang-orang tua (duluan desa) mulai dihapus, sedangkan fungsi pemuka-pemuka desa dalam bidang keagamaan dipegang oleh golongan Brahmana dan para Pendeta.

Pengertian desa berubah menjadi kelompok banjar-banjar yang tergabung dalam satu lingkungan desa-desa adat, sehingga tugas kepala desa mengarah kepada tugas yang hanya mengurus soal-soal adat dan agama karena itu pula ia mendapat panggilan *Klian adat* sedangkan *Klian banjar* bertugas dalam bidang administrasi pemerintahan dan bidang sosial lainnya. Di samping desa adat, secara administratif terdapat juga kesatuan wilayah keperbekelan yang dikepalai oleh seorang perbekal. Sebagai petugas administrasi jabatan perbekel ada langsung di bawah punggawa. Tugas-tugas punggawa lebih bersifat umum, yaitu pengurus bidang administrasi pemerintahan, pencatatan penduduk dan sebagainya. Selama jabatannya sebagai kepala desa, seorang perbekel mendapat sebidang tanah yang disebut: *tanah bukti*.

Klian

Sebagai kesatuan terkecil dari kelompok desa adalah *banjar* yang dikepalai oleh seorang yang disebut *klian*. Banjar sebagai suatu lembaga masyarakat mempunyai organisasi yang terdiri dari

klian banjar sebagai pimpinan dan dibantu oleh beberapa orang yaitu *juru arah* atau *saya* yang bertugas memberitahu para warga banjarnya (*krama banjar*) kalau ada sesuatu yang penting. Tiap-tiap banjar mempunyai tempat pertemuan yang disebut *balai banjar* yang dilengkapi dengan *bale kulkul* (kentongan). Di samping itu tiap-tiap banjar mempunyai *awig-awig* (peraturan). Pemilihan klian banjar berlaku sistem *primus inter pares* ialah memilih salah seorang dari para anggotanya untuk menjadi pemimpin.

2.1.2. Intervensi Belanda dalam Pemerintahan di Bali

Apa yang dapat kita lihat dari berbagai usaha pemerintah kolonial Belanda untuk dapat menanamkan kekuasaannya di pulau Bali pertama-tama adalah dengan jalan berusaha ikut campur tangan dalam pemerintahan dengan raja-raja di Bali. Usaha untuk ikut campur tangan ini mula-mula beralasan untuk menolong masyarakat di Bali atas kekuasaan raja di Bali terutama hal-hal yang ada hubungannya dengan kepentingan pemerintah Belanda di mana hal tersebut merupakan gangguan-gangguan yang dihadapi oleh pemerintah Belanda selama ada kontak-kontak dengan raja-raja di Bali. Sebagai salah satu contoh dapat dikemukakan di sini ialah dalam hal pelayaran di laut di mana pihak pemerintah Belanda merasa berkewajiban ikut menertibkan *Hak tawan karang* yang telah sejak lama dimiliki oleh raja-raja di Bali.

Sudah menjadi suatu adat kebiasaan yang telah melembaga di dalam masyarakat Bali, bahwa apa yang disebut *tawan karang* (di dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah kliperecht) telah menjadi hak dari suatu kerajaan. Apabila ada kapal atau perahu terdampar di muka pantai wilayah suatu kerajaan, maka semua muatan kapal/perahu itu menjadi milik raja dan penduduk pantai itu sebagai barang rampasan dan penumpang-penumpangnya dapat dipakai sebagai budak atau dapat diperjualbelikan, kadang-kadang kalau melawan dapat pula dibunuh. Kapal-kapal yang terdampar itu hanya dapat ditolong oleh penduduk pantai dari wilayah kerajaan tersebut. [6])

Dari bukunya Korn dapat diperoleh keterangan mengenai tawan karang tersebut di mana disebut bahwa:

Het klip recht onder de Balishe vorsten wel hebben voorgesteld als een recht op de goede gaven, die Batara Baruna de god van zee en duisternis, goedgunstig op hun stranden stranden wierp. [7])

Mengenai terdamparnya sebuah perahu di pantai, masyarakat Bali mengenal dua istilah yaitu *tawan karang* dan *melayar kampih.* Tawan karang apabila kapal/perahu itu terdampar pada karang-karang yang ada di laut di muka pantai, di mana mengandung pengertian bahwa karang-karang itu termasuk daerah perairan kerajaan, karena itu penumpang dan muatannya hanya dapat ditolong oleh rakyat pantai dari wilayah yang bersangkutan. Sedangkan melayar kampih apabila kapal/perahu itu sudah terdampar pada pasir pantai di mana penumpangnya dapat menolong dirinya sendiri tanpa bantuan rakyat pantai. Peraturan-peraturan lalu lintas laut seperti tersebut di atas pernah dikenakan kepada salah seorang utusan Belanda yaitu Komisaris tinggi pemerintah Belanda vanden Boeck, yang dalam laporannya tanggal 16 Februari 1818, menuturkan bahwa perahu yang dikirim membawa beras ke Buleleng terdampar diperairan Bandung dan raja Bandung merampas seluruh isi muatan perahu tersebut. [9]) Demikian pula seperti apa yang dialami oleh Hendrik Jacob Huskus Koopman yang sedang melakukan perundingan dengan raja Bandung tanggal 19 Juli 1841, kapal Belanda yang bernama "Overrijssel" terdampar di pelabuhan Kuta Bandung, di mana penduduk pantai daerah itu melakukan tawan karang atas kapal Overrijssel itu dengan merampas semua isi muatan kapal itu. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah Belanda bertindak untuk mengurangi hak-hak kedaulatan raja-raja di Bali dengan melalui perjanjian-perjanjian.

Dari perjanjian-perjanjian itu dapat kita ketahui bahwa di samping berusaha membatasi atau mengurangi hak-hak kedaulatan raja, yang penting adalah agar raja-raja di Bali dan Lombok mau bekerjasama dan mengakui kedaulatan Belanda atas negerinya. [10]) Walaupun dalam perkembangannya sudah ada campur tangan Belanda di dalam mengatur pemerintahan di Bali antara lain menempatkan satu kerajaan di bawah kerajaan lainnya seperti halnya penempatan kerajaan Buleleng di bawah kekuasaan kerajaan Bangli pada tahun 1849. Sampai tahun 1854 usaha-usaha Belanda masih sagat terbatas pada pengaturan beberapa kerajaan yang menurut penilaiannya mau tunduk kepada pemerintah Belanda.

Hal yang penting yang perlu dikemukakan ialah bahwa baru pada tahun 1855 di Bali ada perubahan-perubahan yang pada dasarnya betul-betul mengikuti sistem birokrasi yang baru yaitu dengan dirubahnya istilah penguasa daerah di Buleleng dan Jembrana dengan nama regent dan untuk mengawasi *regent* tersebut

maka pemerintah Belanda menempatkan seorang pegawai Pamongpraja Belanda yaitu seorang *controleur* di masing-masing daerah itu. Untuk daerah Buleleng pada tahun 1855 ditempatkan P.L. van Bloeman Waanders sebagai *controleur* yang pertama di Bali sebagai wakil dari *Gecommitteerde* yang berkedudukan di Banyuwangi. Perkembangan lebih lanjut dari sistem pemerintahan Belanda di Bali ialah bahwa berdasarkan Ind. Stbl. tahun 1860 no. 107 di Buleleng ditempatkan seorang *Assistent Resident* dan kemudian pada tahun 1882 Singaraja ditempatkan sebagai ibukota keresidenan Bali dan Lombok yaitu dengan menetapkan Assistent Resident A.A. Hoos. Akibat didirikannya Keresidenan Bali dan Lombok ini mengakibatkan kerajaan Buleleng dan Jembrana ada di bawah langsung pemerintah Belanda, sedangkan kerajaan-kerajaan Bali Timur, Bali Selatan dan Lombok sampai permulaan abad XX urusan dalam Negeri kerajaan-kerajaan tersebut secara formil masih tetap di tangan raja-raja yang bersangkutan. [11])

2.2. SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA

2.2.1. Masyarakat tradisional

Kehidupan masyarakat di Bali pada akhir abad XIX masih berpola pada tatanan kehidupan masyarakat tradisional, artinya unsur-unsur pengaruh kebudayaan luar atau kebudayaan asing belum begitu tampak. Corak masyarakat tradisional di Bali dapat kita golongkan dalam dua tipe yaitu pertama adalah masyarakat agraris di mana masyarakat lebih banyak mencurahkan kehidupannya pada bidang pertanian sehingga berbagai sistem yang mereka miliki seperti sistem kemasyarakatannya, sistem organisasinya dan berbagai tata kehidupannya memberikan keunikan-keunikan tersendiri. Hal ini semua tercermin bentuk kebudayaan desa. Corak masyarakat yang kedua adalah masyarakat pantai di mana anggota masyarakatnya mengaktifkan dirinya dalam bidang kehidupan di laut, baik dalam bentuk kehidupan sebagai nelayan maupun sebagai pedagang di laut. Kehidupan masyarakat pantai ini umumnya lebih terbuka menerima pengaruh-pengaruh kebudayaan luar (asing), demikian pula sistem komunitasnya lebih dinamis dibandingkan dengan masyarakat pedesaan sehingga hal inipun memberikan keunikan bagi masyarakat pantai yang memiliki corak kebudayaan tersendiri yaitu kebudayaan pantai.

Komunitas masyarakat pedesaan sebagai masyarakat agraris telah memiliki sistem irigasi yang telah dikenal dengan sistem

subak. Organisasi subak ini bertugas mengatur perairan sawah dan telah memiliki peraturan-peraturan baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang disebut *awig-awig subak* atau *sima*. [12])

Organisasi subak di Bali pada umumnya mempunyai kepengurusan yang terdiri dari *klian subak* atau *pekaseh* berkewajiban mengatur pembagian air di sawah. Klian subak dibantu oleh:

a. Penyarikan yang bertugas sebagai sekretaris,
b. Sedahan tembuku yang bertugas mengurus pajak serta berstatus sebagai bendahara,
c. *Juru arah* mempunyai tugas memanggil *krama* (anggota) subak apabila ada pesangkepan (pertemuan).

Tugas dan kewajiban daripada *krama subak* itu antara lain membuat bendungan, membagi air melalui selokan-selokan, menjaga air (*metelik*). Penghasilan organisasi subak ini didapat dari hasil denda pencurian air, denda para anggotanya apabila ada yang melanggar *"kerta sima"* (peraturan-peraturan yang berlaku). Sebagai kebudayaan agraris setiap pengolahan tanah selalu dihubungkan dengan soal-soal keagamaan. Setiap akan mengerjakan tanah atau pada saat memulai penanaman benih selalu didahului dengan suatu upacara pertanian misalnya memberikan sesaji (korban) kepada Dewa kemakmuran pada pura *ulun suwi* atau *ulun carik*. Sistem kehidupan masyarakat desa memberikan corak pula dalam sistem perekonomiannya. Sebagai masyarakat yang menggantungkan diri pada sektor pertanian, serta masyarakat desanya yang seolah-olah masih dalam lingkungan terbatas, maka hasil produksi pertanian umumnya hanya dipakai untuk mencukupi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Hal ini bukankah berarti antara desa yang satu dengan desa yang lainnya tidak ada komunikasi bahkan sering juga terjadi tukar-menukar kebutuhan dalam bentuk perdagangan antar penduduk desa yang satu dengan yang lain.

Komunitas desa sebagai satu unit daripada masyarakat mempunyai ikatan sosial yang cukup kuat. Setiap anggota masyarakat harus tunduk pada aturan-aturan yang berlaku di desanya (*awig-awig desa*) baik yang menyangkut masalah adat maupun kebiasaan. Hal ini akan nampak dalam sistem gotong royong yang dimiliki oleh setiap desa di Bali, di mana setiap orang berkewajiban *nedunin desa* atau *ngayahang desa yaitu secara suka-rela ikut bergotong*-oyong sewaktu-waktu tenaganya diperlukan untuk desanya antara lain dalam hal upacara adat, pembangunan desa

dan sebagainya. Sistem gotong royong seperti ini menimbulkan bentuk-bentuk organisasi sosial seperti dalam bidang sosial antara lain *seka subak, seka memula:* perkumpulan menanam padi, *seka manvi* atau *mederep:* perkumpulan mengetam padi. Dalam bidang kesenian misalnya ada *seke Gong,* yaitu orang-orang yang bertugas memukul gambelan, *seke Topeng* yaitu perkumpulan penari Topeng dan sebagainya.

Dalam bidang kemakmuran desa peranan pimpinan desa beserta aparaturnya memegang peranan yang penting. Segala yang menyangkut keamanan dan kemakmuran desa diurus oleh kepala desa dengan dibantu oleh klian-klian desa. Salah satu hasil pemasukan untuk kas desa didapatkan dari hasil pajak tanah yang disebut *tigasana carik.* Tigasana carik itu terdiri dari: *pajeg* dan *suwinih.* Pajeg adalah pajak yang telah ditetapkan dari hasil bruto dan diambil dari hasil panen pertama, dihitung atas kesatuan produksi tanah yang disebut *tenah winih.* Kesatuan ini merupakan satu bidang tanah sawah yang pada panen yang baik menghasilkan 50 ikat padi dari diukur tertentu. Penentuan atas banyaknya tenah winih ini ditetapkan oleh *Sedahan Agung* dan *Sedahan Tembuku* dengan persetujuan klian subak dan para anggota subak. Sedangkan *suwinih* adalah pajak berdasarkan ketentuan banyaknya *winih* yaitu benih padi dan tiap pembayaran pajak dicatat di atas *rontal pipil* yaitu catatan hak milik tanah yang ditulis di atas lontar dengan memakai bahasa dan huruf Bali. Mengenai besarnya pajak tanah yang berlaku di Bali ternyata tiap-tiap daerah berbeda-beda, ada yang menetapkan seperenam dari hasil panen, ada yang seperdelapan. [14]) Sebagian besar pajak pada waktu itu dibayar *in natura,* tetapi ada juga yang dibayar dalam uang. Pemberian pembebasan pajak diatur menurut *Kerta Sima* yang berlaku di masing-masing daerah. Sebagai contoh misalnya yang berlaku di Bali Utara pembebasan pajak ini diberikan kepada daerah yang besar dikerjakan selama tiga tahun, terhitung sesudah pergantian dari tanah-tanah liar seperti pembukaan hutan atau tanah tegalan yang dijadikan tanah sawah. Di samping itu masih ada pembebasan pajak selama satu kali panen, hal ini diberikan kepada:

a) sawah yang dikerjakan di luar pengawasan,
b) sawah milik pendeta, penggawa, sedahan agung, manca,
c) sawah-sawah dari orang yang terjadi terhadap raja termasuk juga seniman pembuat alat-alat kepentingan upacara adat seperti para *undagi,*

d) sawah-sawah milik pura yang disebut tanah laba pura.

Selain dari pajak tanah ada juga pemasukan yang diambil dari pajak-pajak lainnya, yaitu dari hasil tanaman di mana pajak ini sering disebut dengan istilah *upeti* dan pajak dari hasil penyembelihan binatang, pajak dari sabungan ayam. Bagi daerah yang memiliki pelabuhan dapat pula desanya mengambil pemasukan dari hasil pajak pelabuhan yang disebut *upetin paswanan* atau disebut pula *labuh batu.*

2.2.2. Sistem Perdagangan

Sejak permulaan abad XIX perdagangan di Bali tampak semakin ramai antara Bali, Lombok dan Batavia (Jakarta). Beberapa kapal di Bali membawa muatan berupa beras, gula, asam, minyak kelapa, babi, pinang, malam, kayu, garam, itik untuk diangkut ke Batavia, sedangkan kapal dari Lombok membawa muatan berupa beras, malam, kayu, sapen dan garam. Sebaliknya dari Batavia kapal barang-barang yang dikirim ke Bali adalah barang-barang pecah-belah porselin, kain, besi tua, obat-obatan, ikan asin, benda tembaga, barang-barang dari negeri Cina, menyan dan ketumbar. Demikian pula kapal-kapal dari Batavia ke Lombok membawa laken merah, kain, ketumbar, besi dan pecis. [16]) Di samping perdagangan hasil bumi pada abad tersebut di Bali dan Lombok masih dijumpai aktivitas perdagangan budak yang baru berakhir pada permulaan abad XX ini. [17]) Pada tahun 1839 cabang NHM (*Nederlandsch Handel Maatschappij*) di Surabaya berhasil membuka satu kantor NHM di Kuta-Badung. Selama lebih kurang 10 tahun perusahaan dagang ini boleh dikatakan tidak begitu banyak mengadakan kontak langsung dengan raja-raja di Bali karena raja-raja tersebut telah mempunyai *subandar* yang bertugas mengurus sesuatu yang ada hubungannya dengan orang asing, lebih-lebih dalam soal perdagangan. Sesudah tahun 1849 perdagangan di Bali Selatan, khususnya di Kuta mengalami kemunduran dan akhirnya pusat perdagangan pindah ke Buleleng.

Ditinjau dari faktor geografi memang Bali utara lebih memungkinkan pada waktu itu untuk menjadi pusat perdagangan karena di sana sejak dahulu sudah memiliki tiga pelabuhan alam, yaitu Tumukus, Buleleng dan Sangsit. Ketiga tempat ini menjadi persinggahan kapal-kapal dari perahu-perahu yang berlayar dari Surabaya, Makasar (Ujung Pandang) dan pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara. Akibat semakin ramainya perdagangan ini menyebabkan corak masyarakat di Bali Utara agak berbeda dengan corak masya-

rakat di Bali Timur maupun Bali Selatan. Bali Selatan dapat mewakili corak masyarakat pantai sehingga kenampakan masyarakat yang pluralistis. Pada saat mulai ramainya perdagangan itu banyak para pendatang yang bermukim di kota Singaraja dan sekitarnya, kemudian ada pula yang menetap sehingga menimbulkan perkampungan dari berbagai suku bangsa antara lain Kampung Jawa, Kampung Madura, Kampung Bugis dan juga perkampungan orang-orang timur Asing seperti kampung Cina dan Kampung Arab. Rupanya sejak ditetapkannya Singaraja menjadi ibukota Keresidenan Bali Lombok pada tahun 1882 sudah timbul perkatian pemerintah Belanda untuk menertibkan orang-orang Timur Asing yang berada di Bali Utara, sehingga melalui *Staatsblad* 1883: 267 ditetapkan Pabean Buleleng, Tumukus dan Sangsit sebagai perkampungan Cina dan Pabean Buleleng sebagai perkampungan orang-orang Timur Asing lainnya. [18])

Peranan orang-orang Cina dan Arab dalam hubungannya dengan perkembangan perdagangan pribumi sangat penting. Kontak-kontak perdagangan antara masyarakat pantai dengan masyarakat pedalaman dilakukan melalui perantara orang-orang Timur Asing tersebut. Dari merekalah masyarakat desa di daerah pedalaman menerima idee-idee baru dalam lapangan perdagangan sehingga kemudian pedagang Cina ini yang semula sebagai pedagang kelontong berubah statusnya menjadi pemberi barang-barang atau distributor. Sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tradisional di Bali bahwa tiap-tiap keluarga masyarakat mengerjakan produksi kerajinan sebagai pengisi waktu setelah habis mengerjakan tanahnya berupa ayam-ayaman bambu, menganyam tikar, menenun dan sebagainya yang semuanya itu merupakan industri rumah tanggal (home industry). Di samping itu juga sudah menjadi kesenangan penduduk untuk memelihara binatang peliharaan ada juga yang dapat berfungsi untuk pengangkutan dan mengolah tanah (membajak). Memang di dalam masyarakat yang belum begitu maju seperti tampak di dalam masyarakat tradisional di Bali, produksi ekonomi hanya terbatas pengolahannya pada kelompok keluarga dan juga penggunaannya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian pula aktifitas perluasan bidang ekonomi terbatas pada lingkungan desanya.

Di dalam perkembangan kemudian setelah timbul kontak-kontak dengan pedagang asing terutama dengan pedagang pedagang Cina, timbul usaha untuk meluaskan industri keluarga

serta mencari tempat pelemparan hasil-hasil industrinya. Dalam bidang permodalan, masyarakat mulai mengenal sistem uang muka (panjar) yang didapat dari pedagang-pedagang Cina, dengan demikian sistem permodalan dalam jumlah yang kecil sudah mulai diterapkan. Pemeliharaan babi dan sapi mulai diintensifkan untuk dijual kepada pedagang perantara Cina. Dengan masuknya ekonomi uang banyak penduduk di sekitar daerah pusat perdagangan ini meninggalkan pertanian dan terjun ke lapangan perdagangan.

Akibat kemajuan-kemajuan di dalam bidang komunikasi dan industrialisasi menyebabkan perkembangan kota Singaraja sebagai kota pelabuhan dan kota pemerintah menyebabkan terjadinya proses mobilitas sosial. Sebagai kota pelabuhan banyak memberikan lapangan kerja baru kepada penduduk, yaitu sebagai buruh pelabuhan. Di samping orang-orang dari luar Bali seperti orang-orang Bugis, Jawa, Madura yang datang ke Bali Utara juga orang-orang Bali sendiri dari beberapa Kabupaten lainnya untuk mencari mata pencaharian baru yaitu sebagai pekerja-pekerja.

Demikian pula sebagai pusat pemerintahan Keresidenan Bali dan Lombok, terbuka pula kesempatan bagi penduduk untuk bekerja sebagai pegawai pemerintahan. Walaupun kesempatan ini betul-betul masih sangat terbatas hanya bagi orang-orang yang telah dapat membaca dan menulis. Untuk kepentingan administrasi pemerintah Belanda timbul usaha untuk membuka sekolah Bumiputra pada tahun 1875 sebagai satu-satunya sekolah yang ada di Bali.

2.3. PERKEMBANGAN ALAM PIKIRAN DAN KEPERCAYAAN

Untuk menguraikan masalah perkembangan alam pikiran dan kepercayaan masyarakat Bali pada akhir abad XIX atau menjelang permulaan abad XX menyangkut permasalahan yang cukup luas, karena itu memerlukan batasan-batasan dan beberapa konsep penulisan. Ruang lingkup permasalahan berkisar pada sistem kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dalam kaitannya dengan perubahan-perubahan yang dialami akibat adanya kontak-kontak dengan bangsa Belanda. Atau sebaliknya hal-hal mana saja yang masih dapat bertahan dan berkembang sejalan dengan perubahan-perubahan yang sedang berproses. Pokok pembicaraan dipusatkan pada dua corak masyarakat, yaitu pada

masyarakat agraris dan masyarakat pantai.

Sebagai ciri khusus daripada masyarakat tradisional di Bali adalah sistem alam dan kepercayaan masyarakat, didasarkan pada agama Hindu. Segala aktivitas masyarakat dapat dikatakan selalu dapat dikaitkan kepada soal-soal agama. Demikianlah seperti apa yang telah disinggung di atas pada masyarakat yang menitik beratkan pola kehidupan masyarakat pada pertanian atau masyarakat agraris maka dalam berbagai tingkat penggarapan tanahnya selalu disertai dengan upacara-upacara keagamaan. Bentuk-bentuk kepercayaan ini mempunyai fungsi yang langsung dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat agraris misalnya: mengenai perhitungan waktu yang dihubungkan dnegan ilmu perbandingan (wariga) untuk mengetahui saat yang baik untuk memulai mengolah tanah, menanam padi dan sebagainya serta disertai dengan bentuk-bentuk upacara keagamaan. Demikian pula apabila di desanya mengalami serangan wabah penyakit maka seluruh warga desanya mengadakan *bersih desa* atau *mecaru*, yaitu memberikan korban kepada roh-roh halus yang menjaga alam sekitarnya. Ada pula upacara khusus yang dilakukan apabila ada wabah yang menyerang bidang pertanian misalnya sebagai hama tikus, walang sangit, ulat dan sebagainya. Masyarakat mengadakan upacara serentak untuk menolak hama tersebut dengan upacara yang disebut *Tulak merana*. Sistem kepercayaan yang menyangkut tentang kesuburan tanah seperti apa yang kita dapatkan pada kerajaan-kerajaan di Jawa pada abad kedelapan tentang pembagian lingga yoni sebagai lambang dewa kesuburan, di Bali pada abad XIX sampai sekarang ini simbul tersebut sudah mengalami proses perubahan bentuk dengan wujud tugu yang ditaruh di tengah-tengah sawah dengan nama *Pura Ulun Suwi* atau *Ulun Carik*. Pura kecil yang berbentuk tugu ini dari sudut alam pikiran dan kepercayaan masyarakat agraris sangat penting artinya sebab setiap organisasi subak memiliki pura Ulun Carik tersebut karena setiap akan memulai menanam sampai pada saat mengetam selalu mengadakan upacara-upacara di Ulun Carik ini.

Ditinjau dari pola menetap rumah-rumah orang Bali, jelas pula menunjukkan bahwa di bagian depan halaman rumahnya selalu kita dapatkan lumbung tempat menyimpan padi. Tempat ini pun berfungsi untuk tempat mengadakan upacara-upacara penghormatan kepada Dewi Seri. Apabila kita bandingkan dinamika masyarakat agraris dengan masyarakat pantai akan kelihatan

bahwa masyarakat pantai ada sedikit keterbukaan. Keterbukaan ini salah satu faktor masyarakat pantai menyebabkan keterlibatan dengan dunia luar sehingga menyebabkan pola alam pikiran dan kepercayaan masyarakat Bali sedikit banyak mengalami perubahan, walaupun tidak semuanya disebabkan faktor dari dalam, ada juga yang disebabkan faktor-faktor dari luar. Membicarakan masalah sistem kepercayaan masyarakat pantai mempunyai hubungan yang erat dengan pelayaran. Salah satu bentuk kepercayaan masyarakat Bali adalah bahwa kehidupan mereka di laut semata-mata adalah anugrah dewa laut yaitu dewa Baruna. Kepercayaan seperti tersebut di atas melambangkan pada suatu hukum kebiasaan yang kita kenal dengan Hukum Tawan -karang. Seperti telah dijelaskan bahwa Hukum Tawan-karang ini telah melembaga di dalam masyarakat Bali di Bali dan Lombok. Kepercayaan terhadap dewa Baruna sebagai dewa penguasa laut seolah-olah telah memberikan anugrah raja dan rakyatnya di mana apabila ada kapal atau perahu yang terdampar di pantai dari daerah kerajaannya semua isi muatan kapal/perahu itu boleh dirampas menjadi hak milik kerajaan atau menjadi milik rampasan rakyat pantai itu. Norma ini sudah menjadi hukum kebiasaan yang kemudian ada yang tertulis merupakan *uger-uger* atau *paswara-paswara* yang berlaku di masing-masing kerajaan Bali dan Lombok.

Setelah ikut campur tangan bangsa-bangsa Belanda dalam lalu lintas laut di perairan Bali dan Lombok, hukum tawan-karang ini di mata bangsa Belanda tidak sesuai dengan pandangan dan alam pikiran Barat. Pemerintah Belanda memandang pelaksanaan tawang-karang oleh raja-raja di Bali dan Lombok yang berl ku sampai permulaan abad XX merupakan pemerkosaan hak sehingga pemerintah Belanda merasa berkewajiban menghapuskan hak tawan-karang itu. [19])

Begitu meresapnya sistem kepercayaan ini dalam alam pikiran raja-raja di Bali dan Lombok pada abad XIX itu sehingga sulit untuk diubah begitu saja. Dalam hal penghapusan suatu adat kebiasaan yang didasari atas suatu kepercayaan agama mengalami proses yang cukup lama dan mengambil resiko yang cukup besar. Ini terbukti dengan meletusnya Perang Buleleng, tahun 1846 – 1949, Perang Badung 1906 dan Perang Klungkung 1908.

Catatan:

1. E. Utrecht, *Sedjarah Hukum Internasional di Bali dan Lom-*

bok, (Bandung: Sumur Bandung, 1962), p. 101.

2. Mengenai Kerajaan-kerajaan di Bali pada sekitar abad XIX lihat: Van Eck, "Schetsen van het eiland Bali" *TNI* 1878, pp. 346 – 350.

3. Sebagai referensi untuk mengetahui sistem kasta di Bali, baca: *Tri agama* (manuskrip); *Brahmokta Widi Sastra* (manuskrip); dan *Carasamuccaya.* Terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh: I Nyoman Kadjeng (Cs) Dir. Jen. Bimbingan Masyarakat Hindu-Buddha Dep. Agama RI, 1970/1971, *passim.*

4. *Cf.* Sartono Kartodirdjo: "Struktur sosial dari masyarakat tradisional dan kolonial," Lembaran Sedjarah no. 4 (Jogjakarta: Seksi Penelitian Jurusan Sedjarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, 1969), pp18 – 19.

5. Untuk mengetahui berbagai sistem yang dimiliki oleh desa Kuno di Bali, lihat: V.E. Korn, *Het Adatrecht van Bali* ('S - Gravenhage, C. Naeff, 1932), *passim* ; I Gst. Ngr. Bagus, "Struktur pola menetap dan keluarga pada masyarakat Tenganan Pegringsingan di pulau Bali." *Buku Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional Kedua* Jilid VI, Jakarta: Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1965), pp. 175 – 192. *Cf.* C.J. Grader: *Nota van toelichtingen betreffende het in te stellen zelfbesturend Landschap Buleleng* (tanpa tahun), pp. 44 – 50.

6. C. van Voolenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie* (Leiden: 1933), pp. 407 – 408.

7. V.E. Korn, *Op. Cit.* pp. 400 – 441.

8. Utrecht, *Op. Cit.* p. 122.

9. Lekkerkerker "Het voorspel der vesti ing van den Nederlansche macht op Bali en Lombok", *BKI* 79, (1923), p. 201.

10. Periksa lebih lanjut Arsip Nasional,Surat-surat perdjandjian antara Keradjaan-keradjaan Bali/Lombok dengan pemerintah Hindia Belanda 1841 sampai dengan 1938 (Jakarta, 1960).

11. Utrecht, *Op. Cit.* pp. 226 – 228.

12. Suatu contoh dari bentuk *sima,* lihat: F.A. Liefrinck, *Nog eenige verordeningen en overenkomsten van Balische vorsten*

('S-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1921), pp. 258 – 369.

13. Liefrinck, *Bali en Lombok* (Amsterdam, J.H. de Bussy, 1927), pp. 113 – 115; lihat juga Kern, *Het Adatrecht van Bali, Op. Cit.*, p. 239.
14. Korn, *Ibid.*
15. Utrecht, *Op. Cit.*, pp. 114 – 128.
16. Lekkerkerker, *Op. Cit.*, 291.
17. Mengenai perdagangan budak ini lihat A.A. Gde Putra Agung, "Masalah perdagangan Budak Bali; abad 17–19" *Basis* (Nopember 1974), pp. 38 – 48, Cf. F.A. Liefrinck, "Slavernij op Lombok" TBG, XIII, blz. 508, tahun 1900.
18. C.J. Grader, *Nota van toelichtingen betreffende het in te stellen zelfbesturend Landschap Boeleleng (tanpa tahun)*, p. 51.
19. Periksa lebih lanjut pada Arsip Nasional, *Surat-surat perjanjian . . . . . passim.*

3. KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN ± 1900 – 1928

3.1. PENGARAUH POLITIK ETIKA DI BALI

Sesuatu hal yang perlu mendapat perhatian di dalam kita membicarakan pengaruh politik Pemerintah Hindia Belanda di daerah-daerah di Indonesia, bahwa masing-masing daerah ada perbedaan dalam menerima pengaruh tersebut. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat pada periode waktu artinya ada perbedaan waktu sampainya pengaruh itu ke daerah-daerah di Indonesia sehingga perbedaan-perbedaan ini apabila kita telusuri sampai pada apa yang menyebabkan perbedaan itu mengundang permasalahan yang cukup kompleks. Yang jelas bahwa di samping faktor-faktor kondisi dan situasi yang dimiliki oleh masing-masing daerah itu, juga faktor kepentingan dari pihak Pemerintah Hindia Belanda dalam hubungannya dengan politik kolonial pada waktu itu juga ikut menentukan.

Apabila kita kembali pada permasalahan tersebut di atas, bahwa apa yang terjadi di Pulau Jawa sekitar tahun 1900 itu sebagai permulaan dijalankannya politik etika oleh Pemerintah Hindia Belanda, jika dibandingkan dengan keadaan di Bali akan jauh berbeda. Antara tahun 1846 sampai tahun 1908 di Bali masih berlangsung peperangan menentang penjajahan Belanda, yaitu terkenal dengan Perang Buleleng, Perang Jagaraga, Perang Banjar, Puputan Badung dan Puputan Klungkung, sehingga sampai permulaan tahun 1900 di Bali masing-masing belum dikuasai Belanda secara keseluruhan.

Walaupun hubungan Bali dengan dunia luar sudah berlangsung sejak lama, tetapi kontak-kontak itu belum membawa pengaruh apa-apa. Kontak-kontak dengan bangsa Barat yang berlangsung antara abad ke-17 – 18 hanyalah kontak-kontak yang berhubungan dengan masalah perdagangan budak yang erat hubungannya dengan pengambilan tenaga-tenaga untuk dijadikan tentara sewaan. [1]) Intervensi bangsa Belanda di Pulau Bali baru tampak sesudah daerah Buleleng dapat ditaklukkan secara keseluruhan dan kemudian menjadikan Singaraja sebagai ibukota keresidenan Bali dan Lombok. Sejak itulah pemerintah Belanda berdikit-dikit mengadakan perbaikan-perbaikan serta mulai menanamkan pola-pola berpikir secara Barat. Usaha yang pertama adalah melalui bidang pendidikan. Untuk kepentingan

dalam bidang administrasi pemerintah Hindia Belanda berhasil membuka Sekolah Rendah (*Tweede Inlandsche School*) di Bali tahun 1875 yaitu di kota Singaraja. Usaha ini pada permulaannya tidak mendapat sambutan yang baik oleh masyarakat, oleh karena itu pemerintah sangat sulit untuk mendapatkan murid. Hal ini ada beberapa faktor yang menyebabkan, antara lain yang pertama adalah faktor latar belakang kebudayaan masyarakat Bali.

Kebudayaan masyarakat Bali adalah kebudayaan Hindu. Nilai-nilai budaya Bali merupakan kesatuan dari nilai-nilai sosialnya seperti nilai-nilai kesopanan, nilai pergaulan hidup, agama, kesenian dan sebagainya yang semuanya ini diwarnai oleh kebudayaan Hindu. Bentuk-bentuk kesusastraan seperti Ramayana dan Beratayuddha memberikan landasan berpikir masyarakat Bali.

Demikian pula dalam adat istiadat dan agama unsur-unsur Hindunya sangat kuat, di mana ajaran-ajaran kerohanian dipelajari dengan seksama. Faktor yang pertama ini menyebabkan terjadinya struktur masyarakat di Bali menjadi empat lapisan masyarakat yang dikenal dengan *catur warna* atau *catur wangsa.*

Sistem pendidikan tradisional yang bersumber pada kesusastraan dan agama Hindu hanya dapat dinikmati oleh lapisan atas, yaitu oleh golongan Brahmana dan golongan Ksatria. Oleh karena kefanatikan dan struktur pergaulan hidup yang selalu terikat oleh norma-norma agama dan kasta, maka keterbukaan menerima pandangan yang demokratis dari dunia Barat terbatas pada golongan kasta terendah yaitu golongan *Jaba.* Hal ini baru muncul sesudah tahun 1920 di mana sistem pendidikan Barat di Bali mulai tumbuh sehingga timbul idee-idee pembaharuan di dalam masyarakat seperti keinginan adanya persamaan hak antara golongan *Tri Wangsa* dengan golongan *Jaba.* [2])

Pengaruh politik kolonial Belanda dalam memperbaiki tatanan kehidupan di Bali menimbulkan permasalahan dalam sistem status sosial. Usaha pemerintah Belanda untuk mengadakan perubahan dalam sistem pemerintahan belum menerapkan secara sepenuhnya sistem pemerintah yang modern. Hal ini tampak sekali dalam sistem pengangkatan pegawai negeri, pemerintah Hindia Belanda belum melaksanakan menurut kriteria legal rasional tetapi masih mempergunakan sistem tradisional yaitu menilai seseorang dilihat dari segi tinggi rendahnya kasta. Perbedaan status inilah menimbulkan konflik sosial di dalam masyarakat terutama oleh masyarakat Bali Utara. Keadaan seperti itu menimbulkan tuntut-

an-tuntutan dari sebagian golongan Jaba yang sudah terpelajar agar golongan Tri wangsa mau saling harga-menghargai dan saling hormat-menghormati di dalam pergaulan hidup sesuai dengan tuntutan jaman. [3])

Demikian pula tuntutan yang diajukan kepada pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu agar pihak pemerintah dapat menilai orang yang akan diangkat menjadi pegawai pemerintahan atau kepala pemerintahan dengan ukuran pendidikan. [4])

3.2. PENDIDIKAN

Sesudah berakhirnya Perang Banjar pada tahun 1869 maka enam tahun kemudian yaitu pada tahun 1875 Pemerintah Hindia Belanda berhasil mendirikan sekolah yang pertama di Bali yaitu *Tweede klasse school* bertempat di kota Singaraja. Pada waktu itu pemerintah sangat sulit mendapatkan murid. Hal ini sudah kita singgung pada uraian di depan. Salah satu sebab adalah karena dilatarbelakangi oleh sistem sosial di Bali yaitu dengan adanya sistem kasta di samping masih terikat oleh pola-pola pemikiran yang tradisional. Oleh karena kebutuhan yang mendesak untuk tenaga-tenaga administrasi pemerintahan dan juga untuk menaikkan derajat orang-orang Bali dalam bidang pendidikan, dalam mengatasi kekurangan murid itu pemerintah kadang-kadang terpaksa dengan jalan paksa. Hal ini berlangsung kira-kira sampai tahun 1915. [5]) Apa yang tampak dalam perkembangan pendidikan di Singaraja, ternyata pada tahap permulaannya golongan Jaba lebih maju daripada golongan Triwangsa. Tetapi pada perkembangan kemudian, sejalan dengan politik kolonial Belanda berusaha memisahkan hak-hak golongan Triwangsa dengan golongan Jaba sehingga memperlebar jurang pemisah antara status kedua golongan tersebut.

Ahirnya dalam bidang pemerintahan golongan Jaba banyak menerima hambatan-hambatan karena terbatasnya kesempatan yang diberikan, ketatnya persyaratan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda di Bali. Rupanya sistem pendidikan kolonial memberikan warna tersendiri dalam masyarakat di beberapa daerah di Indonesia seperti halnya dialami oleh masyarakat di Jawa.

Demikian pula di Bali setelah dibukanya *Eerste Inlandsche School* dan kemudian disusul dengan HIS *(Hollandsch Inlandsche School)* pada tahun 1913 di Singaraja, di mana kebanyakan murid-

murid yang diterima hanya dari kalangan keluarga raja-raja, anak-anak para punggawa dan dari kalangan bangsawan. Hal ini menyebabkan banyak anak Bali yang ekonominya kuat berkeinginan untuk bersekolah ke Jawa antara lain banyak yang pergi ke Probolinggo, Surabaya, Yogyakarta dan ada pula yang melanjutkan sampai ke Batavia (Jakarta). Kebanyakan dari mereka setelah menamatkan pelajarannya setingkat HIS mereka melanjutkan pada Sekolah Guru dan bekerja dalam lapangan pemerintahan. Sebagai catatan dapat dikemukakan di sini jumlah pelajar-pelajar Bali yang bersekolah di Jawa sekitar tahun 1927 sebagai berikut: Pada sekolah MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) ada sebanyak 36 orang; di AMS *(Algemeene Middelbare School)*: 1 orang; di Kweekschool : 9 orang; di *Ambachtschool* : 8 orang; di *NIAS (Nederlandsch Indische Artsenschool)* : 1 orang; di OSVIA *(Opleidingschool Voor Inlandsche Ambtenaren)* : 4 orang; di HKS *(Hoogere Kweekschool)* : 1 orang; dan di *OSVIA* Makasar sampai tahun 1927 ada sejumlah 10 orang. [7])

Pada tahun 1917 di Singaraja berdiri suatu perkumpulan bernama: *"Setiti Bali"* yang bertujuan memajukan masyarakat Bali di bidang adat istiadat, agama, dan dalam bidang perekonomian. Anggota dari perkumpulan "Setiti Bali" ini cukup besar jumlahnya meliputi seluruh lapisan masyarakat, dari lapisan rendah sampai lapisan tingkat atas. Tumbuhnya perkumpulan ini adalah sebagai reaksi dari pergerakan Islam (SI ?) yang dipropagandakan di Bali oleh HOS Tjokroaminoto. [8])

Perkumpulan ini berdiri hanya sampai tahun 1920. Sebab-sebab pembubarannya antara lain atas desakan Pemerintah di samping karena ada perselisihan paham di antara pimpinan maupun anggotanya. Tidak berselang lama kemudian, yaitu pada tahun 1921 lahir sebuah perkumpulan yang bergerak di bidang agama dan pendidikan yaitu Perkumpulan *Suita Gama Tirta* yang dipimpin oleh I Gusti Putu Djelantik, *Lid Raad van Kerta* di Singaraja. Tujuan dari perkumpulan ini adalah untuk memuliakan agama serta mengubah adat istiadat yang bertentangan dengan kehendak jaman. [9])

Usaha-usaha yang dilakukan dari perkumpulan *Suita Gama Tirta* ini kebanyakan bergerak dalam bidang pendidikan agama, sehingga banyak dari kalangan masyarakat terutama dari kalangan pemuda-pemuda dan pelajar-pelajar mulai menaruh perhatian untuk mempelajari isi dari ajaran-ajaran agama yang tercantum

di dalam kesusastraan, etika dan filsafat. Sayang perkumpulan ini juga tidak panjang usianya, sehingga dari kalangan guru-guru yang senang mempelajari soal-soal keagamaan, pada tahun 1923 berhasil didirikan sebuah perkumpulan di Singaraja dengan nama: *Shanti* berhasil mendirikan "Sekolah Perempuan Shanti" dengan mendapat bantuan dari pemerintah antara lain berbentuk peralatan dan sebagainya. *10*) Di samping itu juga berkat bantuan dari orang-orang terkemuka, perkumpulan ini juga dapat mengeluarkan kala-warta dengan nama *"Shanti Adnyana"*. Sangat disayangkan pula kala-warta "Shanti Adnyana" hanya berumur 1 tahun, sedangkan Sekolah perempuan Shanti dapat berlangsung sampai tahun 1926. Adapun sekolah-sekolah yang dapat didirikan di Bali sampai tahun 1924 paling tinggi adalah HIS, dengan perincian: HIS ada sebanyak 2 buah, dan sekolah-sekolah yang setingkat dengan sekolah rendah ada sejumlah 24 buah. [11]) Dilihat dari pendirian sekolah-sekolah perkembangan pendidikan di Bali antara tahun 1926 – 1929 menunjukkan adanya perkembangan yang meningkat yaitu: *Europeesche Lagere School* satu-satunya sekolah Belanda dibuka di Singaraja, sedangkan HIS sampai tahun 1929 telah dibuka di beberapa daerah yaitu di Buleleng, Badung, Klungkung dan Lombok Barat. *Tweede Klasse Scholen* sudah dibuka hampir di semua kerajaan yang jumlahnya 29 buah dan sekolah Desa (Volks Scholen) ada berjumlah 109 buah. [12]

3.3. TUMBUHNYA ORGANISASI-ORGANISASI YANG MERUPAKAN EMBRIO DARI KEBANGKITAN NASIONAL

3.3.1. Perkumpulan Suita Gama Tirta

Secara singkat perkumpulan Suita Gama Tirta ini telah diuraikan dalam bidang pendidikan tetapi sebagai suatu organisasi yang merupakan embrio dari Kebangkitan Nasional perlu kita tinjau kembali. Sebagai salah seorang pendiri dari perkumpulan itu adalah I Gst. Putu Djelantik yang pada waktu itu bekerja pada *Raad van Kerta* di Singaraja dapatlah kita golongkan sebagai seorang terpandang di dalam masyarakat lingkungannya di samping sebagai seorang yang berpendidikan "modern" juga dia adalah dari kalangan bangsawan. Pertokohan seperti ini dapat kita bandingkan pada tubuh organisasi di Jawa seperti Budi Utomo di mana peranan seorang Bupati yang dapat mewakili golongan "priyayi" ikut pula menentukan dalam hidup matinya organisasi

pergerakan pada waktu itu. Sejauh mana aktivitas dari organisasi yang tumbuh dalam masyarakat kolonial, ini sangat tergantung pada faktor lingkungan yaitu sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi masing-masing daerah itu.

Suita Gama Tirta di mana para anggotanya terdiri dari seluruh lapisan masyarakat Bali yang terdiri dari empat kasta itu memang pada dasarnya semata-mata bertujuan untuk memuliakan agama serta ingin mengadakan pembaharuan dalam bidang adat dan agama. Memuliakan agama dimaksudkan untuk memberikan pendidikan agama bagi para pemuda-pemuda yang menaruh minat pada pengetahuan agama di mana pada waktu itu mulai dirintis untuk memberikan pengetahuan agama itu pada semua golongan; artinya tidak terbatas pada golongan Brahmana atau golongan Kesatria saja. Hal ini sudah merupakan suatu usaha pembaharuan dalam sistem kepercayaan yang menyangkut tradisi, bahwa orang yang boleh mempelajari agama atau membuka lontar-lontar yang ada hubungannya dengan kerajaan hanyalah dari kasta Brahmana atau kasta Ksatria sedangkan dari golongan kasta lainnya dilarang. Pada waktu itu ada suatu tradisi yang mengatakan *"ajrawera"*, artinya tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Larangan ini antara lain tidak boleh membaca kitab-kitab Weda atau mengucapkan mantram-mantram Weda bagi mereka yang belum disucikan (Bahasa Bali: *mewinten*). Hal-hal seperti ini oleh para pemuda yang tergabung dalam perkumpulan *Suita Gama Tirta* ini tidak keinginan untuk mengharapkan tradisi seperti itu, hal mana dianggap menghambat kemajuan.

Tuntutan agama yang banyak memberikan nilai-nilai kebijaksanaan, sifat-sifat Ksatria yaitu berani mempertahankan keberanian, insaf akan harga diri, seperti apa yang dilukiskan dalam kitab-kitab wira-carita atau epos Mahabarata dan Ramayana besar peranannya dalam ikut membantu timbulnya benih-benih nasionalisme.

3.3.2. Perkumpulan Shanti

Perkumpulan ini lahir di Singaraja pada tahun 1923 yang anggotanya kebanyakan dari *Sekehe Jongkok*. Suatu hal yang boleh dikatakan mengalami tingkat kemujuran bahwa para anggota *Sekehe Jongkok* yang mula-mula hanya merupakan perkumpulan simpan pinjam uang dalam suatu Banjar (kampung). Semenjak kumpulan Shanti itu berdiri para anggota sekehe jongkok ini mau

bergabung dengan pemuda-pemuda lainnya seperti guru-guru, pegawai-pegawai serta ikut aktif membuka kursus-kursus agama. Perkumpulan ini pada permulaannya mendapat cukup dukungan dari semua lapisan masyarakat maupun dari pihak Pemerintah sehingga Perkumpulan Shanti tersebut berhasil pada tahun 1923 itu mendirikan sekolah *Perhimpun Shanti* yang terdiri dari para ibu-ibu. Panitia pendiri sekolah tersebut terdiri dari Wayan Ruma, Ketut Nasa, Made Kaler, Nyoman Kadjeng, I Gst. Putu Djelantik, I Gst. Tjakra Tanaya dan sebagai penasehat: Ida Bagus Gelgel dan Pedanda Putu Geria. [13]

Sungguh dapat dibanggakan bahwa pada waktu itu tidak saja pada diri pemuda-pemuda tumbuh rasa kecintaan pada pendidikan agama, tetapi juga pada kalangan para ibu-ibu rumah tangga yang meluangkan waktunya pada sore hari. Untuk belajar membaca dan menulis, di samping diberikan pelajaran-pelajaran mengenai keagamaan. Pihak pemerintah menaruh perhatian juga pada perkumpulan ini sehingga memberikan bantuan berupa fasilitas ruangan, perlengkapan bangku dan alat-alat tulis. Untuk dapat menyebarluaskan pelajaran-pelajaran agama ini, Perkumpulan Shanti berhasil pula mengeluarkan kala-warta "Shanti Adnyana" dengan mendapat bantuan dari orang terkemuka seperti para guru, anggota pengadilan, pegawai-pegawai yang ada di kota Singaraja.

Sebagai pembuka jalan dalam memajukan pendidikan serta merintis emansipasi wanita dalam dunia pendidikan, sudah cukup dapat dirasakan kefaedahannya, ikut membuka jalan menuju cinta-cinta pembaharuan. Batu loncatan-batu loncatan seperti ini merupakan modal yang besar dalam pertumbuhan nasionalisme di daerah.

3.3.3. Perhimpunan Satya Samudaya Bau Danda Bali Lombok (S S B B L).

Suatu perkumpulan yang bergerak dalam usaha *studie-fonds* telah dapat diusahakan pendiriannya di Karangasem dan diresmikan pada tanggal 1 Januari 1925. Menurut Anggaran Dasar SSBBL pada Art. 2 perkumpulan tersebut mempunyai tujuan:

a. menyimpan uang.
b. menjalankan (mengusahakan) uang.
c. membikin fonds (tabungan persediaan). [14]

Di kalangan orang-orang yang menjadi pegawai negeri di kerajaan dan beberapa orang-orang terkemuka di daerah itu antara

lain raja Karangasem, pada punggawa dan beberapa orang Pendeta timbul pemikiran untuk mengatasi kesukaran-kesukaran bagi anak-anak yang berkeinginan melanjutkan pelajarannya dari tingkat *Tweede Klasse School* ke sekolah-sekolah yang lebih tinggi. Seperti telah disinggung dalam bidang pendidikan sampai tahun 1926 tercatat sekolah-sekolah di Bali baru pada tingkat sekolah dasar, karena itu kalau ingin melanjutkan pelajaran harus pergi ke Jawa. Hal inilah yang mendorong berdirinya SSBBL untuk mengusahakan dana bantuan sekolah tersebut. Dari jumlah sekolah yang ada pada waktu itu dapat diketahui bahwa seluruh wilayah kerajaan tercatat ada dua buah *Tweede Klasse Scholen* dan 10 *Volks Scholen*. Ditinjau dari jumlah penduduk di mana penduduk Karangasem berdasarkan sensus bulan Nopember 1920 sudah berjumlah kurang lebih 164.000 berarti 16.400 jiwa ada 1 sekolah setingkat *volks school*. [15]

Perhimpunan SSBBL ini yang lahir di Karangasem dalam jangkauan usahanya meliputi daerah Bali dan Lombok dan apabila kita pelajari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangganya, perkumpulan ini sudah terorganisasi secara modern. [16]

3.3.4. Bali Adnyana

"Bali Adnyana" ini bukan merupakan suatu organisasi atau suatu perkumpulan tetapi merupakan kelompok golongan atas dasar kesatuan paham dalam hubungannya konflik sosial yang terjadi di Singaraja pada waktu itu. Latar belakang lahirnya golongan "Bali Adnyana" ini adalah merupakan kelanjutan daripada perkumpulan Shanti yang telah berdiri pada tahun 1923. Sesudah perkumpulan Shanti itu mengalami kemunduran kemudian timbul perpecahan di antara anggotanya.

Sebab-sebab perpecahan ini adalah karena masalah kasta, sehingga timbul dua kelompok yang saling bertentangan yaitu golongan Triwangsa dan golongan Jaba. Golongan Triwangsa ingin tetap mempertahankan sistem status yang berdasarkan *ascription*, sebaliknya golongan Jaba menghendaki sistem kasta itu dihapuskan, dengan demikian dapat sepenuhnya diterapkan sistem status berdasarkan *achievement*. [17] Perselisihan paham ini memuncak pada waktu diadakan pertemuan para anggota Shanti bertempat di rumahnya Ida Gde Suanda, punggawa distrik Banjar. [18]) Pada pertemuan itu I Ketut Nasa, kepala guru pada sekolah Dasar di

Bubunnan mencela tentang tata cara pergaulan dalam masyarakat Bali yang masih membeda-bedakan berdasarkan tingkatan kasta. [19] Karena ucapan I Ketut Nasa itu dari pihak golongan Triwangsa menjadi marah dan terjadi perdebatan sengit antara Ketut Nasa dengan I Gusti Tjakratanaya. sejak itu perkumpulan Shanti tampak mengalami kemunduran, banyak anggotanya dari kalangan Jaba yang sebagian besar mereka terdiri dari guru-guru berangsur-angsur minta berhenti. Akibat kemunduran ini akhirnya Kalawarta Shanti Adnyana mengalami kemacetan sehingga diambil alih oleh I Gusti Tjakratanaya dan kemudian dia mengganti nama mejadi majalah Bali Adnyana.

Pada tanggal 1 Januari 1924 mulailah terbit kala warta Bali Adnyana. Redaksinya adalah I Gst. Tjakratanaya sedang direkturnya I Gusti Ketut Putra. Sejak lahirnya majalah Bali Adnyana perpecahan antara golongan Triwangsa dengan golongan Jaba semakin tajam karena ada anggaran dari golongan Jaba bahwa Bali Adnyana hanya memuat "suara-suara" atau pikiran-pikiran dari golongan Triwangsa.

Bila kita mempelajari kala warta Bali Adnyana secara cermat, pada sub judul majalah tersebut tercantum kalimat "moeat soeara Santi dan keperloean oentoek oemoem." Dengan demikian jelaslah bahwa majalah tersebut masih melanjutkan cita-cita perkumpulan Shanti yang mendahuluinya. I Gusti Tjakratanaya selaku pendirinya masih bercita-cita menyebarkan pendidikan agama Hindu ke seluruh daerah di Bali dengan perantaraan majalah tersebut, karena itulah ia memberi nama majalah itu dengan "Bali Adnyana." Mempelajari pola-pola pikiran yang dituangkan dalam majalah Bali Adnyana itu sebagian besar konsepsi-konsepsi tersebut merupakan buah pikiran I Gusti Tjakratanaya selaku pimpinan majalah tersebut dan secara tidak langsung juga mewakili golongan Triwangsa. Perlu dijelaskan di sini bahwa I Gusti Tjakratanaya adalah seorang bangsawan berasal dari Sukasada kakeknya bernama I Gst. Bagus Kaler dan ayahnya bernama I Gusti Made Rai, keduanya pernah menduduki jabatan punggawa di Sukasada. I Gst. Tjakratanaya sendiri pernah menjabat punggawa menggantikan ayahnya dan sekitan tahun 1918 beliau pensiun dan bekerja sebagai *pukrul.* Pendidikannya diperoleh dengan belajar sendiri, terutama mempelajari lontar-lontar yang berhubungan dengan soal filsafat dan keagamaan. Karena itu pandangan beliau masih bersifat konserfatif, hal ini mungkin disebabkan lingkungan masyarakatnya yang

masih feodal.

Pandangan-pandangan beliau yang pada umumnya berlandaskan pada ajaran-ajaran agama itu banyak mendapat simpatisan dari golongan Triwangsa dan dapat dipakai sebagai imbangan terhadap pembaharuan-pembaharuan yang dicita-citakan oleh golongan Jaba. Karena timbulnya kompetisi dalam pembaharuan masyarakat pada waktu itu, Bali Adnyana meluaskan penyebarannya sampai ke Lombok Barat. Studi mengenai idee-idee dari golongan Bali Adnyana pada periode 1925 – 1928, walaupun dalam situasi konflik, namun pikiran-pikiran yang positif dalam memajukan masyarakat Bali pada waktu itu dalam dunia pendidikan juga ikut menanamkan kecintaan terhadap nilai-nilai budaya dan martabat bangsa. Menjelang akhir tahun 1927, rupanya kedua golongan yang bertentangan itu masing-masing kalangan golongan elite pada waktu itu bahwa pertentangan paham yang hanya mementingkan satu golongan saja perlu segera diakhiri. Cita-cita ini memang dapat terlaksana, terbukti dengan dikeluarkannya suatu pernyataan dari redaksi Bali Adnyana yang menganjurkan kepada perwakilan-pewakilannya dan para simpatisan agar jangan mengindahkan suara-suara dari golongan kasta dan menganjurkan agar semua orang-orang Bali jangan sampai ada yang merendahkan derajat bangsanya.

Demikian pula kesadaran terhadap pentingnya persatuan sudah timbul di kalangan Bali Adnyana. Golongan elite Triwangsa baru menginsyafi bahwa golongan elite Jaba yang tergabung dalam pekumpulan "Surya Kanta" mempunyai cita-cita jauh lebih maju. Salah seorang dari kalangan Bali Adnyana mengatakan:

> ".... dari itu kami pohonkan, moga-moga toean-toean soeka bermaaf-maafan atas kesalahan masing-masing.... Karena hal itoe zaman poenya kemaoean....."

Lebih lanjut dikatakan:

> ".... sekarang haruslah kita masing-masing ingat dan sadar akan diri, yang sebenarnya telah mengalami keliroe paham, agar kembali menjadi baik dan aman..." [20]

3.3.5. Perkumpulan Surya Kanta

Faktor-faktor yang mendorong bangkitnya perkumpulan ini pada garis besarnya ada faktor yaitu pengaruh pendidikan dan kondisi sosial pada waktu itu. Semakin bertambah banyaknya

pelajar-pelajar Bali yang menamatkan pelajarannya di Jawa terutama pada sekolah pendidikan guru di Probolinggo, mereka pulang ke Bali untuk bekerja sebagai guru di Singaraja pada sekolah-sekolah *Tweede Klasse School* dan HIS, di antaranya ialah: Wayan Ruma, Ketut Sukarata, Nengah Metra dan Ketut Kaler. [21]

Dan kalangan guru-guru tersebut timbul pikiran untuk memajukan pendidikan terutama untuk golongan Jaba dan lebih luas lagi untuk memajukan rakyat Bali yang masih terbelakang di dalam bidang kehidupan serta masih gelap dalam dunia pengetahuan modern. Selain itu akibat faktor situasi lingkungan dan kondisi sosial di Singaraja pada waktu itu atas inisiatip Ketut Sandi, Nengah Metra dan Ketut Nasa pada tanggal 1 Nopember 1925 di Singaraja berdiri perkumpulan Surya Kanta dengan susunan pengurus sebagai berikut: Presiden: Ketut Sandi, Wakil Presiden: Ketut Nasa, Sekretaris I : Nengah Metra, Sekretaris II : Ketut Kaler, Bendahara: Ketut Purna dan Komisaris terdiri dari Ketut Mudasara dan Wayan Ruma. [22]

Mempelajari asas dan tujuan perkumpulan Surya Kanta dapat disimpulkan beberapa pokok pikiran dan pandangan yaitu: bertujuan untuk mengadakan perbaikan memajukan cara berpikir yang kolot agar terbuka dan berkembang mengikuti kemajuan zaman. Melalui media surat kabar "Surya Kanta", perkumpulan ini ingin memberikan pendidikan bagi mereka yang telah dapat membaca dan menulis, untuk menambah pengetahuan mereka dalam bidang agama, etika dan lain-lainnya serta meniru pendidikan Barat yang dipandang "modern". Di dalam bidang sosial ekonomi ada usaha-usaha untuk memberikan penerangan-penerangan mengenai perbaikan-perbaikan kehidupan masyarakat, antara lain penyederhanaan dan penghematan upacara-upacara adat seperti upacara *ngaben* (upacara pembakaran mayat) dan menentang keras pemborosan-pemborosan yang dapat menyebabkan kemelaratan. [23] Untuk memajukan perekonomian masyarakat, Surya Kanta berusaha melalui majelis Surya Kanta memberikan pengertian-pengertian bagaimana pentingnya arti ekonomi dan koperasi, sehingga tumbuh kesadaran berkoperasi di tiap-tiap banjar (kampung). [24]

Sejak mulai berdirinya perkumpulan Surya Kanta telah mulai disebarkan "paham kemajuan" yaitu memberikan penerangan kepada masyarakat Bali mengenai pentingnya pendidikan serta

mengadakan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang adat istiadat yang tidak sesuai lagi dengan keadaan zaman. Di samping itu "paham kemajuan" yang didengung-dengungkan oleh Surya Kanta menciptakan terwujudnya persamaan hak antara golongan Triwangsa dengan golongan Jaba dalam bidang perlakuan dan hukum. [25]

Apa yang terkandung dalam cita-cita "paham kemajuan" itu ialah ingin mengubah sistem status yang ada karena menurut ukuran golongan Jaba sebagai pendukung "paham kemajuan" itu sangat merugikan dan merendahkan derajat golongan Jaba. Sebagai contoh misalnya: yang berhubungan dengan adat ialah sistem perkawinan. Di dalam masyarakat Bali pada waktu itu berlaku aturan yang disebut *Asu Pundung* dan *Alangkahi Karang Hulu*. *Asu Pundung:* dilarangnya suatu perkawinan terhadap laki-laki dari kasta Ksatria, Wesia dan Sudra (Jaba) dengan seorang gadis dari kasta Brahmana. Sedangkan *Alangkahi Karang Hulu* ialah dilarangnya suatu perkawinan terhadap laki-laki dari kasta yang lebih rendah (Sudra atau Wesia) mengambil seorang gadis dari kastanya yang lebih tinggi (Ksatria). Apabila terjadi pelanggaran, mereka dapat dijatuhi hukuman penjara atau dikenakan hukuman *"selong"* atau buangan. Demikian pula dalam bidang pemerintahan "paham pembaharuan" menghendaki agar pemerintah mulai mengadakan penilaian bagi orang-orang yang akan diangkat menjadi pegawai negeri atau kepala pemerintahan dengan ukuran kepandaian dan tidak berdasarkan tingkatan kasta. [26]

Keanggotaan perkumpulan Surya Kanta dengan jelas disebutkan di dalam anggaran dasar perkumpulan tersebut pasal 5 yang menyebutkan bahwa: yang boleh menjadi anggota perkumpulan ini ialah: Bangsa Bali kaum Jaba, yang berumur 18 tahun dan dapat membaca dan menulis serta yang baik kelakuannya. Dengan demikian yang boleh menjadi anggota perkumpulan Surya Kanta hanyalah golongan Jaba.

Dari segi perkumpulannya perkumpulan Surya Kanta mula-mula bergerak di Singaraja dan pada tanggal 21 Maret 1926 dapat dibentuk pengurus cabang Singaraja yang terdiri dari: Presiden: Nyoman Gelgel; Wakil Presiden: Nyoman Mas Wiryasuta, Sekretaris: Wayan Mudrakarsa; Bendahara: Putu Rama; Komisaris: Ketut Katon.

Dalam waktu yang bersamaan pula yaitu pada tanggal 21 Maret 1926 pada pertemuan umum bertempat di Gedung bioskop

di Pabean, Singaraja perkumpulan Surya Kanta telah berhasil memilih pengurus baru, terdiri dari: Presiden: Nengah Metra; Wakil Presiden: Ketut Sandi; Sekretaris I Ketut Kaler; Sekretaris II : Wayan Ruma; Bendahara: Ketut Purna, Komisaris: Ketut Nasa, Nengah Rembu, Ketut Mudasara, Wayan Kamirana.

Pada tahun 1926 perkumpulan Surya Kanta dapat membuka cabangnya di Bubunan yang dipimpin oleh Nengah Dangin, kemudian juga berkembang di daerah Tabanan yaitu di Bajra. Untuk memudahkan anggotanya yang berlangganan majalah Surya Kanta, di tiap daerah Kabupaten ditunjuk seorang yang mengurus uang langganan (agen) yaitu untuk daerah Kabupaten Badung ditunjuk I Ketut Luntja bertempat tinggal di Denpasar, untuk daerah Tabanan: Nyoman Rai, untuk daerah Bangli: Made Lunga, Gianyar: Made Oka, Karangasem: Komang Layang, Jembrana: Ketut Djuwena tinggal di Tegalcangkring.

Sama halnya dengan Bali Adnyana, perkumpulan Surya Kanta juga punya pengaruh sampai ke Lombok, terbukti pada pertemuan umum Surya Kanta tanggal 21 Maret 1926 itu datang juga utusan dari cabang Lombok yaitu yang diwakili oleh Nengah Merta, Wayan Alit; Nyoman Dama dan Wayan Gema. Suatu kemajuan yang pesat dalam bidang organisasi ialah bahwa berdasarkan hasil rapat umum tanggal 21 Maret 1926 itu perkumpulan "Surya Kanta" telah mengambil beberapa keputusan penting ialah:

1. membebaskan para anggotanya untuk aktif dalam politik.
2. bebas memberikan pertimbangan serta mencampuri perkumpulan-perkumpulan lain dalam bidang politik.
3. menurut *Recht Persoon.*

Di dalam cita-citanya banyak pula ada kemajuan untuk menghapuskan penjajahan di muka bumi ini, hal tersebut dapat dibaca pada tulisan NS di dalam "Surya Kanta" yang berjudul: "Angan-angan" sebagai berikut: Bahwanya, oleh karena pendidikan djaman, kemauan *natuur (paileh djagat)* beberapa bangsa di dunia ini, sekarang ini sedang masing-masing beroesaha memajoekan negerinya, ada yang soenggoeh-soenggoeh hanya mengedjar kemadjoean pengadjaran, memperbaiki nasibnya, economienja, agar dapat sedjadjar berdiri dengan bangsa-bangsa yang telah madjoe: ada djoega jang mengedjar kepandaian dengan maksoed sebagai diatas, sambil bermaksoed memboeang penindasan lain bangsa, sebagai telah oemoem diketahui orang, oempamanja dengan per-

gerakannja orang di Hindia, Inggris, Tiongkok, Filipina, Mesir dan lain sebagainja. ..... Betapa besar hati Saudara-saudara kita ditanah Djawa mendjempoet poetra-poetranja jang baru datang dari Europa dengan gelar Meester, Doctor, Ingenier, Arts dan lain-lain? Wah !!! mengingat hal itu, terkenanglah kami akan negeri Bali ini, apakah akan djadinja kemadjoean djika masih sebagai sedia kala? Siapakah kiranja diantara kita pendoedoek Bali ini jang dapat mengichtiarkan, soepaja kita djangan terlaloe djaoeh ketinggalan dibelakang dari Saudara-saudara kita di Djawa??.... [28])

Apa yang tampak pada setiap perkembangan dan pertumbuhan organisasi-organisasi di Bali, pada mulanya semuanya berhaluan non politik (tidak berpolitik), hal ini menyesuaikan dengan situasi politik pemerintah Belanda di Bali di mana melakukan pengawasan yang sangat keras terhadap setiap organisasi yang tumbuh pada waktu itu. Namun perkembangan jiwa dan semangat pemuda-pemuda Bali tidak dapat dibendung dengan isolasi politik, dia tumbuh sesuai dengan perkembangan situasi di Indonesia. Tumbuhnya benih-benih nasionalisme di Bali didewasakan melalui perkumpulan-perkumpulan seperti perkumpulan Surya Kanta ini.

3.3.6. Perhimpunan Catur Wangsa Derya Gama Hindu Bali

Di tengah-tengah berkecamuknya pertentangan paham antara Bali Adnyana dengan Surya Kanta, beberapa orang pemuka masyarakat di Bali khawatir kalau pertentangan kasta di Bali Utara dapat meluas ke seluruh Bali. Oleh karena itu timbul inisiatip beberapa orang pemuka masyarakat antara lain I Gusti Bagus Djelantik yang berhasil membentuk suatu perkumpulan yang bernama: Perkumpulan Catur. Wangsa Derya Gama Hindu Bali (Tjwadega Hindu Bali). Perkumpulan tersebut didirikan pada tanggal 2 Mei 1926 di Klungkung yang bertujuan antara lain melenyapkan pertentangan kasta yang terjadi di Bali Utara serta memulihkan persatuan antara keempat golongan kasta di Bali sesuai dengan dharmanya masing-masing. [29] Hal tersebut diucapkan oleh Presiden perhimpunan I Gusti Bagus Djelantik di dalam meresmikan berdirinya perkumpulan itu antara lain menyatakan: "agar dasar-dasar permusuhan dan pertentangan paham di antara kita catur wangsa pada hari ini dihapuskan untuk membina kesejahteraan bersama." [30]

Mempelajari anggaran dasar Perhimpunan Catur Wangsa Derya Gama Hindu Bali bahwa perkumpulan ini mempunyai

tujuan untuk memajukan masyarakat Bali dengan jelas yang patut, asal tidak bertentangan dengan adat istiadat serta mengubah adat yang berlawanan dengan kemajuan jaman. Dengan demikian tampaklah bahwa perkumpulan ini juga memperhatikan "paham kemajuan" yang dicetuskan oleh perkumpulan Surya Kanta maupun yang dicita-citakan oleh golongan Bali Adnyana.

Di dalam bidang pendidikan perkumpulan ini berusaha mendirikan sekolah-sekolah, mengumpulkan dan menyebarkan pengetahuan yang termuat di dalam lontar-lontar melalui mimbar majalah-majalah dan brosur-brosur. Keanggotaan perkumpulan ini masih dapat dikatakan terbatas yaitu bahwa yang boleh menjadi anggota perkumpulan adalah dari golongan catur wangsa yang memeluk Agama Hindu Bali yang berumur sekurang-kurangnya 18 tahun.

Dengan demikian keanggotaan ini terbatas pada agama dan umur. Mengenai luasnya organisasi perkumpulan ini meliputi orang-orang Bali yang ada di Bali dan Lombok.

3.4. KEADAAN DI BALI SEKITAR PERANG DUNIA I DAN PENDIRIAN VOLKSRAAD

3.4.1. Sikap Pemerintah Hindia Belanda

Bagaimana sikap Pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat di Bali dapat kita lihat dalam beberapa pandangan orang Belanda terhadap perubahan-perubahan di Bali terutama menyangkut masalah pemerintahan.

Pertama-tama dapat disebutkan di sini masalah pendirian *Karangasemraad* di mana sejak 1 Januari 1922 diperlakukan sebagai landskap yang berdiri sendiri secara administratip. Atas pendirian *Karangasemraad* ini timbul perbedaan-perbedaan pendapat antara bekas Residen Bali dan Lombok, B.T. Damste dengan Beets, di mana menurut tuan Beets bahwa pendirian *Raad-Raad* Lokal seperti halnya *Karangasemraad* memang benar-benar memberi bantuan di dalam urusan rumah tangga Hindia Belanda. [31] Di dalam usaha pendemokrasian pemerintah di Bali seperti halnya pembentukan-pembentukan *raad* lokal, memang pendirian Damste kelihatannya lebih berhati-hati. Hal ini dikemukakan juga oleh B.J. Haga beberapa problema yang dihadapi pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. [32]

Menurut Haga, suatu hal yang perlu diperhatikan dalam pen-

demokrasian sistem pemerintahan dalam pembentukan badan-badan perwakilan rakyat seperti halnya pembentukan *raad-raad* lokal ini adalah bahwa masyarakat di Bali memiliki stratifikasi sosial dalam bentuk kasta di mana lembaga-lembaga yang sudah tua usianya seperti lembaga-lembaga desa, lembaga keagamaan dan sebagainya dapat dilihat adanya perbedaan-perbedaan hal dan kewajiban antara kasta tingkat atas dan kasta-kasta di bawahnya.

Akibat stratifikasi sosial ini masyarakat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu satu kelompok masyarakat terdiri dari sejumlah kecil golongan bangsawan yang mempunyai hak-hak yang cukup besar, sedangkan kelompok lainnya terdiri dari masyarakat biasa dengan jumlah yang banyak. Kepemimpinan tradisional yang sudah ada itu bukanlah mencerminkan sebagai wakil rakyat, sehingga tanpa ada dorongan dari rakyat yang mempercayakan wakilnya dalam suatu *raad* sebagai perwakilan dari rakyat, baik terhadap golongan bangsawan atau rakyat biasa, dikhawatirkan akan merusak sistem kemasyarakatan yang telah ada.

Namun dalam pandangan selanjutnya ia optimis bahwa *Karangasemraad* sebagai lembaga perwakilan yang anggota-anggotanya diangkat oleh Gubernur Jenderal dalam periode waktu tertentu sehingga diharapkan dapat benar-benar menghasilkan apa yang diharapkan oleh penduduk setempat. Ada tiga alasan yang dapat dikemukakannya dalam pembentukan *Karangasemraad* ini yaitu:

1. Bahwa pembentukan *Karangasemraad* ini bukanlah khas Bali melainkan mempunyai sifat yang umum yaitu sudah dapat diwujudkan adanya "Negara hukum" dan untuk masyarakat Bali lebih mudah diterapkan karena sudah adanya dasar-dasar demokrasi yang dapat diketemui dalam pemerintahan *banjar, desa* dan *subak.*
2. Alasan kedua yang juga bersifat umum yaitu terjadinya kekuasaan yang lebih bersifat otokratis dari kepala-kepala pribumi sendiri. Dengan ikut sertanya Pemerintah (Gubernemen) dalam mengendalikan pemerintahan, hal-hal yang bertentangan dengan keinginan rakyat atau hal-hal yang menguntungkan pribadi dapat dihindari.

Di samping itu dengan terbentuknya *raad* ini ada jalan bagi rakyat untuk mencegah adanya kecerobohan dan penindasan di mana rakyat dapat mengemukakan pendapat secara bebas.

Alasan yang ketiga ialah berkenaan dengan keadaan masyarakat Bali sendiri yaitu adanya tindakan sewenang-wenang dalam hukum seperti hukum "selong" dan sebagainya. Hal ini menurut Haga, karena anggota-anggota *majelis kerta* (pengadilan), terdiri dari orang-orang Brahmana dan golongan Triwangsa sehingga hukum selalu memberikan hak yang lebih tinggi kepada golongan Triwangsa. Dengan demikian kesadaran hukum itu tidak dapat diwujudkan. Dengan demikian berdirinya *Karangasemraad* mempunyai manfaat yang cukup besar baik dalam kekuasaan hukumnya maupun sebagai lembaga pengontrol dalam pemerintah. [33]

Perubahan Karangasemraad menjadi Baliraad

Pada tahun 1926 di Bali timbul perubahan dalam sistem pemerintahan di daerah yaitu dengan disetujuinya usul Tuan Jongeneel oleh Pemerintah Pusat untuk membentuk *Baliraad* dan menghapuskan *Karangasemraad*. [34]

Tetapi keputusan ini perlu ditinjau kembali dan Residen Bali dan Lombok yaitu L.J.J. Coron mengusulkan untuk membentuk *raad-raad* otonom untuk tiap-tiap *Landschap* di Bali seperti di tahun yang lalu.

Apa yang dapat dibuktikan ternyata Gubernur Jenderal telah mengambil keputusan untuk mereorganisasi *Landschap-landschap/zelfbestuur* yang dulu sesuai dengan undang-undang desentralisasi. Apa yang dapat diharapkan dari usaha-usaha Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu adalah pada tahun anggaran 1930. Pulau Bali akan menginjak priode baru di mana perkembangan pemerintah dapat dijelaskan secara luas dan diharapkan akan mendapat keuntungan besar dalam soal politik yaitu diberikan hak mengatur diri sendiri selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum Hindia Belanda.

Salah seorang sarjana Belanda yang banyak tertarik pada masalah-masalah adat istiadat di Bali yaitu V.E. Korn memberikan pandangan-pandangan yang lain mengenai masalah desentralisasi di Bali. Menurut sarjana ini hendaknya Pemerintah dalam mengadakan perubahan-perubahan dalam pemerintahan selalu mempelajari sistem demokrasi yang sudah dimiliki oleh masyarakat Bali, seperti *pasangkepan-pasangkepan* atau *pesamuan agung* setiap 35 hari sekali. [35]

Di dalam pertemuan-pertemuan kerajaan-kerajaan di Bali seperti tersebut di atas itu membicarakan masalah-masalah yang

penting terutama dalam bidang pemerintahan, peradilan dan perundang-undangan. Korn mengemukakan beberapa alasan bahwa dengan terbentuknya *Baliraad* yang di dalamnya duduk beberapa orang wakil dari tiap *onderafdeling* itu kurang mencerminkan pasangkepan-pasangkepan yang telah ada. Untuk itu Korn menyarakankan agar Pemerintah lebih baik membentuk *raad-raad onderafdeling* sehingga desentralisasi dalam pemerintahan lebih dapat diratakan, dengan demikian *raad-raad onderafdeling* lebih banyak memberikan kesempatan untuk lekas melaksanakan pemilihan-pemilihan daripada pembentukan dari satu *raad* untuk seluruh Bali. [36]

3.4.2. Keadaan masyarakat di Bali

Bidang Ekonomi. Dalam bidang ekonomi telah mulai dilaksanakan sistem perkriditan di Bali. Sistem perkriditan ini dijalankan oleh petugas-petugas yang pengawasannya dilakukan oleh *korps ambtenaar B.B. (Binnenlandsch Bestuur),* di mana mereka bergerak dalam perusahaan-perusahaan perkriditan di desa-desa. Dengan demikian mulai timbul bank-bank desa, sebagai contoh di daerah Buleleng telah dapat dibuka bank-bank desa: yaitu 3 buah pada tahun 1913, 24 buah pada tahun 1914, sebuah pada tahun 1915, 2 buah pada tahun 1916, 4 buah pada tahun 1917 dan 2 buah lagi pada tahun 1918. Berselang beberapa tahun kemudian yaitu pada tahun 1922 dapat didirikan lagi 8 buah perkriditan.

Sistem perkriditan melalui bank-bank desa pada umumnya dapat dirasakan manfaatnya, sedangkan di pihak lain pemberian kridit diberikan oleh: Perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum seperti desa-desa dan banjar-banjar yang diambil dari keuangan desa atau keuangan banjar. Perusahaan kridet semacam ini mempunyai tujuan lebih mengutamakan si peminjam, dengan demikian bagi keperluan desa dan banjar mendapat pemasukan uang yang lebih teratur, sehingga mereka memperoleh jumlah uang tertentu untuk dapat menanggulangi pengeluaran-pengeluaran yang penting untuk keperluan pura dan adat.

Demikian pula tujuan pemberian kridit oleh perkumpulan koperasi tidak lain untuk menolong para anggotanya. Sistem kridit melalui tabungan simpan pinjam sudah dikenal di kalangan masyarakat di Singaraja dengan nama *Sekeha Jongkok.* Pendirian sebuah koperasi partikelir diatur melalui peraturan-peraturan atau awig-awig atau mengikuti peraturan yang tercantum dalam

Regeling op de cooperatie en Vereneging, 1 Juni 1927, no. 1.

Sejak tahun 1925 di beberapa daerah di Bali dapat didirikan Bank Rakyat Bali yang berkedudukan di Singaraja dan pada akhir Desember 1925 di daerah Buleleng dapat dibuka dua agen pada kantor cabangnya di Denpasar yang membawahi lima daerah (*onder afdeling*) yaitu Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung dan Karangasem telah dapat membuka empat agen. Sebagai gambaran untuk mengetahui kemajuan perbankan di Bali dapat dicatat bahwa pada akhir bulan Desember 1928 tercatat: Kantor Pusat dengan dua daerah bagian, yaitu Buleleng dan Jembrana ada terdapat lima agen. Kantor Cabang Denpasar dengan empat daerah bagian, yaitu Badung, Tabanan, Klungkung, Gianyar terdapat 10 agen. Kantor Cabang Karangasem dengan satu daerah bagian terdapat empat agen, sehingga jumlah seluruhnya pada tahun 1928 ada 19 agen. [37]

Bidang Pendidikan

Menyinggung sedikit perkembangan pendidikan di Bali dalam hubungannya dengan masa kebangkitan nasional di Bali mempunyai peranan yang cukup penting. Timbulnya ide-ide pembaharuan dalam masyarakat, organisasi-organisasi sosial maupun organisasi pergerakan selalu didasari oleh faktor pendidikan ini. Seperti telah dikemukakan dalam Bab-bab terdahulu (pengaruh politik etika di Bali) munculnya tokoh-tokoh yang memegang peanan dalam perkumpulan-perkumpulan yang bersifat lokal kebanyakan mereka itu berkecimpung dalam dunia pendidikan.

Untuk melihat kemajuan-kemajuan yang dialami oleh masyarakat Bali dalam dunia pendidikan dapat dilihat dari pertumbuhan sekolah-sekolah yang ada di Bali mulai sejak awal berdirinya sampai sekitar tahun 1930. Apabila kita bandingkan kemajuan pendidikan di Jawa, Bali kelihatannya jauh terkebelakang, di mana sekolah-sekolah di Bali baru dibuka 1875 yaitu *Tweede Klasse School* di Singaraja. Perkembangan pendidikan melalui sekolah-sekolah ini betul-betul dirasakan sangat lambat, kurangnya sekolah di Bali, menyebabkan kebanyakan anak-anak para bangsawan dan anak-anak golongan berada lainnya menyekolahkan anaknya ke Jawa, antara lain ke Probolinggo, Surabaya, Yogyakarta dan ada pula yang melanjutkan sampai di Batavia (Jakarta). [38]

Para pelajar Bali yang bersekolah di Jawa inilah besar sekali

andilnya dalam menanamkan benih-benih nasionalisme di masyarakat Bali. Keaktipan-keaktipan pelajar-pelajar Bali yang bersekolah di Jawa di samping keperluan studinya dapat kita buktikan yaitu pada kongres II perkumpulan *Jong Java* di Yogyakarta yang diadakan tahun 1919 telah dimasukkan pemuda-pemuda Bali di dalam perkumpulannya. [39] Hal ini rupanya menyebabkan timbul kekhawatiran dari pihak Pemerintah Belanda di Bali terhadap pelajar-pelajar Bali yang melanjutkan pelajarannya ke Jawa sehingga mulai timbul berbagai usaha agar pelajar-pelajar Bali jangan sampai banyak yang melanjutkan ke Jawa. Salah satu usaha yang dilakukan Pemerintah Belanda ialah membuka kesempatan kerja bagi pemuda-pemuda yang telah menamatkan pelajarannya baik pada *Tweede Klasse School* maupun pada HIS. Dengan sikap pemerintah Belanda seperti ini, di kalangan anak-anak Bali yang mulai timbul kesadaran untuk menuntut ilmu pengetahuan akhirnya banyak juga yang melanjutkan ke Makasar (Ujungpandang).

Di dalam membicarakan pendidikan di Bali pada saat-saat berkembangnya dunia pendidikan sekitar "tahun 1920 an" tak dapat melepaskan kaitan pada pertumbuhan organisasi-organisasi atau perkumpulan-perkumpulan pada saat itu. Lahirnya perkumpulan Shanti, Suryakarta, Bali Adnyana di Singaraja semuanya itu menyampaikan kemajuan masyarakat melalui dunia pendidikan baik pendidikan tradisional yang selalu dikaitkan dengan masalah etika dan Agama Hindu maupun melalui pendidikan "modern" atau pendidikan "Barat". Usaha-usaha ke arah kemajuan pendidikan tradisional yang menonjolkan ke "Balian"nya dengan pendidikan "barat" ini baru muncul kemudian sekitar tahun 1939 dengan sebutan *"Balisering"*.

3.4.3. Hubungan dengan Volksraad

Dalam proses perubahan-perubahan dalam bidang pemerintahan di Bali, kita tidak mendapatkan banyak sumber keterangan mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan *Volksraad*. Segala perubahan dalam bidang pemerintahan selalu mengikuti perkembangan politik kolonial Belanda pada waktu itu. Demikian halnya dengan pemerintahan di Bali.

Seperti telah disinggung dalam bab terdahulu bahwa sistem pemerintahan di Bali sejak mulai dikuasainya Bali secara keseluruhan oleh Belanda yaitu sejak tahun 1908. Pendidikan di Bali pernah mengalami masa Stedehonder dan sejak tahun 1919 hal ini

mengalami perubahan-perubahan yaitu menuju pada pemerintahan *Zelfbestuur* selanjutnya mengalami sedikit perubahan-perubahan pada tahun 1927 dan kemudian disempurnakan pada tahun 1938.

Apa yang diharapkan dengan diberikannya *Zelfbestuur* kepada masing-masing kerajaan di Bali tidak lain bahwa sistem pemerintahan seperti ini memberikan kelonggaran yang sedemikian luas kepada masing-masing raja tidak memikirkan kesejahteraan rakyat dengan kemampuan ke arah kerajaan masing-masing walaupun dalam prakteknya di masing-masing kerajaan itu berdiri sendiri dalam mengurus kesejahteraan rakyatnya, tetapi untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang dialami oleh masing-masing kerajaan itu maka diusahakanlah suatu badan, di mana kerajaan yang satu dapat menyampaikan kesukaran-kesukaran yang dihadapi kepada kerajaan yang lain, sehingga dengan demikian kerajaan yang satu diharapkan dapat membantu kerajaan lainnya.

Demikianlah pada tanggal 30 September 1938 lahirlah suatu badan yang diberi nama "Paruman Agung" yang tujuannya untuk mempersatukan kedalapan kerajaan-kerajaan di Bali dengan jalan mengadakan kerjasama yang erat di antara kerajaan itu.[40]

Dari tingkat-tingkat perkembangan di daerah-daerah di Indonesia seperti halnya situasi daerah di Bali oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1933 diberikan kesempatan wakil dari daerah Bali untuk duduk di *Volksraad*.

3.4.4. Anggota Volksraad yang mewakili Bali

Satu-satunya anggota *Volksraad* yang mewakili Bali pada tahun 1933 – 1934 ialah Tjokorde Gde Raka Sukawati. Beliau dilahirkan di Puri Ubud (Gianyar) pada tahun 1890. Mengikuti pendidikan kelas 1 – 6 di Sekolah Melayu Gianyar tahun 1913 dan pada tahun 1918 setelah selesai mengikuti pendidikan OSVIA di Probolinggo dan beliau bertugas menjadi mantri polisi di Denpasar. Pada tahun 1919 karena ayah beliau meninggal, maka beliau menggantikan menjadi punggawa di Ubud antara tahun 1924 – 1930 menjadi anggota *Volksraad* di Bali (*Balische Volksraad*). Pada tahun 1929 beliau mendirikan suatu perkumpulan di kalangan para seniman Bali dengan nama perkumpulan *Pita-maha*. Pada tahun 1933 – 1934 menjadi anggota *Volksraad*. Pada tahun 1946 beliau terpilih menjadi Presiden Negara Indonesia Timur (NIT). Pada tahun 1967 meninggal dunia.

3.5. PERJUANGAN DI DAERAH

3.5.1. Interaksi dengan Sumpah Pemuda

Di dalam uraian di depan bahwa pada tahun 1926 di Bali, khususnya di Singaraja sudah mulai timbul ide-ide pembaharuan yang dipelopori oleh golongan "Bali Adnyana" dan golongan "Suryakanta" dengan apa yang mereka istilahkan dengan "paham kemajuan". Dalam mengisi dan mengembangkan cita-cita memajukan masyarakat melalui bidang pendidikan baik melalui pendidikan sekolah-sekolah maupun memajukan pengetahuan dalam bidang agama, sudah terkandung pula benih-benih pemikiran menuju kesadaran untuk memajukan kemerdekaan bangsa.

Hal ini dapat dilihat dalam tulisan NS dalam majalah *Surya Kanta* yang berjudul: "Angan-angan" seperti yang sudah ditulis di depan. Dari apa yang terkandung dalam "Angan-angan" tersebut di atas jelaslah cita-cita untuk memajukan masyarakat Bali hendaknya meniru kemajuan-kemajuan yang telah berkembang di jawa yaitu sadar akan martabat bangsa. Untuk mencapai kesadaran itu satu-satunya jelas ialah melalui bidang pendidikan sebab sudah mulai disadari bahwa orang-orang yang berpendidikanlah mempunyai pikiran maju yang dapat mengerti terhadap tuntutan jaman.

Sejak tahun-tahun itulah banyak pemuda Bali melanjutkan sekolahnya ke Jawa dengan harapan bahwa setelah mereka tamat, mereka dapat kembali ke Bali untuk memajukan masyarakat Bali yang pada waktu itu sangat dirasakan terkebelakang dibandingkan dengan keadaan di Jawa. Apabila kita telusuri kembali umumnya perkumpulan-perkumpulan yang lahir sebelum tahun 1928 pada umumnya berhaluan non politik, karena menyesuaikan dengan iklim pemerintahan kolonial pada waktu itu.

Namun seperti kita lihat pada perkembangan *Surya Kanta* selanjutnya yaitu dengan dicabutnya art. 4 dari *satuten Surya Kanta* menunjukkan bahwa kesadaran berpolitik sudah ada waktu itu. Rupanya pertumbuhan dan perkembangan jiwa pemuda-pemuda Bali pada saat itu tidak dapat dibendung dengan isolasi politik, sebab dia timbul sesuai dengan iklim pergerakan Indonesia. Pertumbuhan benih-benih nasionalisme di Bali senada dengan pertumbuhan Nasionalisme di Asia khususnya Nasionalisme di Indonesia di mana pengaruh-pengaruh dan aspek-aspek sosial sangat menentukan.

Catatan: Bab. III

1. A.K. Nielsen, *Leven en avonturen van een oostinjevaarder op Bali* (Amsterdam : 1928), p. 49.
2. A.A. Gde Putra Agung, "Lahirnya idee-idee pembaharuan dalam organisasi sosial di Bali" *Basis* (Maret 1972) pp. 183 - 189.
3. Anali, "Kapankah waktoenja kaoem Djaba akan bersatoe?" *Suryakanta* (No. 5, Th. II, 1926), pp. 70 - 71.
4. O.N., "Kaoem Djabakah jang merebut haknja Tri Wangsa?" *Suryakanta* (no. 4 Th. II) pp. 51 - 52.
5. Hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Badra (wawancara: Maret 1969).
6. Sartono Kartodirdjo, "Struktur sosial dari masyarakat tradisionil dan kolonial" *lembaran Sejarah no. 4.*
7. *Suryakanta* (no. 3 - 4, Maret - April 1927), p. 34.
8. *Djatajoe* (no. 6, Th. III, 25 Januari 1939), p. 176.
9. *Suryakanta* (no. 8, Th. II, Agustus 1926), pp. 98 - 99.
10. Lihat: *Bali Adnyana* (no. 33, Th. III, 1926), pp. 1 - 2.
11. Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia : Sunda Ketjil* (tanpa tahun), p. 31.
12. Lihat - lampiran : IV.
13. Keterangan Wayan Ruma, salah seorang dari panitia tersebut.
14. Lihat lampiran : I.a.
15. Lihat lampiran : III dan IV.
16. Lihat lampiran I. a dan I. b.
17. Konsepsi tentang pola-pola *ascrintion* dan *achievement,* lihat Talcott Parsons, *The Social System.* (New York: The Free Press, 1964, pp. 180 - 200.
18. Menurut keterangan Wayan Ruma, bekas anggota Shanti dan anggota Suryakanta.
19. Lihat "Agama dan Adat Bali terantjam bahaja merah". *Bali Adnyana* (no. 5, Th. VI, 10 Pebruari 1929, pp. 2 - 3.
20. Lihat: Siwakarma, "Persatoean". *Bali Adnyana* (no. 32, Th. IV, 10 November 1927), p. 3.
21. Hasil wawancara dengan Bapak Wayan Ruman.
22. Lihat: *Statuten Surya Kanta,* Lamp. II. a.
23. Lihat: *Surya Kanta,* (no. 1 Th. I), p. 5, (no. 2, Th. I), pp.

7 - 8, (no. 3, Th. 10, pp. 1 - 3; (no. 9 - 10, Th. II), pp. 141 - 143; (no. 3 - 4, Th. III), pp. 27 - 28; (no. 8 - 9, Th. III), pp. 101 - 102; dan pp. 104 - 105.

24. *Surya Kanta* (no. 2 Th. I), pp. 5 - 6 (no. 6. Th. III), pp. 85 - 87; (no. 8 Th. III), pp. 105 - 108 dan pp. 114 - 117.
25. Baca: N, "Zaman kemadjoean" *Surya Kanta.* (no. 1, Th. Th. I), pp. 1 - 2. Sukarsa "Boedi dan kepandaian dapat mengangkat deradjat". *Surya Kanta* (no. 1, Th. II), pp. 9 - 10. N.S. "Timbanglah dengan neratja keadilan" *Surya Kanta* (no. 4, Th. II), pp. 49 - 50.
26. Lihat: Anali: "Kapan waktoenja kaoem Djaba akan bersatoe". *Surya Kanta* (no. 5, Th. II), pp. 70 - 71; I Djaba. "Alangkahi kurang oeloe". *Surya Kanta* (no. 4, Th. II), pp. 52 - 53; G.N. Kaoem Djabakah jang merebut haknja Tri Wangsa? *Surya Kanta* no. 4. Th. II, pp. 51 - 52.
27. Lihat: "Verslag Openbare Algemeene Vergadering." *Surya Kanta,* tanggal 21 Maret 1926.
28. Surya Kanta (no. 2, Th. II), p. 17.
29. Lihat: *Statuten Perhimpoenan Tjatur Wangsa Derya Gama Hindu Bali,* termuat dalam *Surya Kanta* (no. 5, Th. II, Mei 1926) pp. 78 - 80.
30. Lihat: Djiwa, "Sidang Damai". *Bali Adnyana.* (no. 15, Th. III, 20 Mei 1926), pp. 2 - 3.
31. K. Th. Beets: "De Karangasem raad" *Kol. Tijdschr :* XIII. XIII. (1924), p. 188.
32. B.J. Haga: "Balische Bestuurs problemen en de Karangasemraad". Kol. Tijdschr. XIII (1924) *passim.*
33. *Ibid.* pp. 301 - 302.
34. L.J.J. Corn: *Memorie van overgave van den Resident van Bali en Lombok.* (Augustus, 1929), p. 60.
35. V.E. Korn: Balische Decentralisatie dalam *Koloniale Studien* no. 2 10 de Jaagang, (April, 1926), p. 180.
36. *Ibid.* p. 186.
37. L.J.J. Corn; *Op.cit.* pp. 68 - 69.
38. *Suryakanta.* (no. 3 - 4, Maret - April 1927), p. 34.
39. *Ibid.*
40. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali: *Peringatan 1 Th. Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Bali* (Denpasar, 25

September 1951), p. 1.

41. N.S. "Angan-angan" dalam *Suryakanta,* No. 2, Th. II, p. 17.

4. KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN 1928 - 1942.

4.1. PENGARUH POLITIK PEMERINTAH HINDIA BELANDA PADA TAHUN + 1930.

Di dalam kita membicarakan pengaruh politik Pemerintah Hindia Belanda pada sekitar tahun 1930 di Bali dapat kita tinjau dari dua segi yaitu:

a. dari segi Pemerintahan.
b. Dari segi kebudayaan.

ad.a. Dalam bidang *pemerintahan.* Dalam bidang pemerintahan Hindia Belanda mengijinkan agar kepala-kepala pemerintahan yang ada di daerah-daerah, dalam hal ini raja-raja di Bali namanya pemerintahan dengan demikian pemerintah Hindia Belanda tetap mempertahankan struktur pemerintahan tradisional. Oleh karena itulah sistem pemerintahan yang ada di Bali diberikan kewenangan penuh kepada raja-raja di tiap kerajaan yang ada selama tidak bertentangan dengan kebijaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Sistem Pemerintahan seperti ini dikenal dengan sistim *zelfbestuur.* Pemilihan *zelfbestuur* sebagai suatu sistem pemerintahan, ini disesuaikan dengan sistem pemerintahan yang telah ada di samping juga melihat dari aspek-aspek yang lain seperti sistem sosial dan sistem ekonomi yang telah dimiliki oleh masyarakat Bali sebagai suatu lembaga yang hidup dalam masyarakat [1]

ad.b. *Dalam bidang kebudayaan*

Pengaruh politik Belanda dalam bidang kebudayaan ini tampak adanya beberapa pendapat di kalangan orang-orang Belanda sendiri masuknya pengaruh kebudayaan Barat ke Bali. Hal ini tampak pertama-tama pada soal masuk nya agama Nasrani ke Bali baik agama Katolik maupun agama Nasrani. *2*

Dari kalangan pemuka-pemuka masyarakat Bali pun hal tersebut mendapat protes terutama dari kalangan raja-raja, kalangan agama dan golongan terpelajar (klas elite) yang dipelopori oleh Tjokorde Gde Raka Sukawati yang pada waktu itu telah duduk dalam Balisshe *Volksraadlid*

tahun 1924 dengan gigih menentang masuknya agama Kristen di Bali.

Untuk mengatasi kegelisahan yang timbul di kalangan masyarakat luas, maka timbul pula usaha-usaha untuk meningkatkan pendidikan masyarakat di Bali yang disesuaikan dengan kebudayaan Bali. Untuk merealisasi cita-cita ini salah seorang tokoh yang patut dikemukakan disini ialah H. te Flierhaar yang telah meletakkan dasar-dasar penyesuaian pendidikan di Bali dengan situasi dan kondisi di Bali yang sesuai dengan kebudayaan Bali.

Cita-cita ini mula-mula timbul dalam pikiran Flierhaar adalah karena ia melihat bahwa seni budaya di Bali sudah begitu tinggi dan sangat erat jalinannya dengan kehidupan masyarakat dan tata keagamaan Hindu yang hidup di Bali. Usaha-usaha seperti ini sebenarnya sudah mulai dirintis sejak ia menjadi guru HIS di Klungkung pada tahun 1920 yaitu melalui sistem pendidikan menggambar yang diajarkan oleh "guru adat" (seniman tradisional). Usaha-usaha seperti ini kemudian lebih ditingkatkan tidak saja dalam hal menggambar juga dalam hal menulis dan bernyanyi.

Usaha dalam menyesuaikan pendidikan dengan kebudayaan sendiri (kebudayaan Bali) mengalami perkembangan yang mantap pada tahun 1939 dengan nama *Balisering.*

Pekerjaan/Usaha-usaha dari "Balisering" meliputi:

1. Meningkatkan cara membangun sekolah dengan gaya (stijl) yang cocok dengan Bali, artinya mengembalikan pada corak arsitektur Bali.
2. Mengubah bentuk-bentuk/metode pendidikan menggambar.
3. Mengubah bentuk/metode pendidikan menyanyi.
4. Mengumpulkan bahan-bahan bacaan untuk penerbitan buku -buku baru.
5. Memasukkan unsur-unsur tari-tarian Bali ke dalam pendidikan olahraga.

4.2. PERTUMBUHAN ORGANISASI

4.2.1. Perkumpulan Eka Laksana

Pada tanggal 14 Juli 1935 di Denpasar telah berhasil didirikan sebuah perkumpulan pelajar dengan nama: *Eka Laksana* yang anggota-anggotanya terdiri dari pelajar-pelajar dari Bali dan Lombok.

Berdasarkan *statuten* dari perkumpulan ini dijelaskan bahwa perkumpulan tersebut tidak ikut campur dalam urusan politik. [3] Adapun tujuan daripada perkumpulan ini antara lain: Mempelajari dan memajukan kebudayaan daerah Bali dan Lombok serta menjalin hubungan sesama anggota-anggotanya terutama memajukan dan saling membantu di antara pelajar-pelajar dari Bali dan Lombok.

Adapun kepengurusan dari perkumpulan ini terdiri dari:

1.	Voor Zitter	:	I Ketut Subrata
2.	Vice/voorzitter	:	I Ketut Nara
3.	Secretaris	:	I Ketut Tjidra
4.	Penningmeester	:	I Gst. Ketut Djelantik
5.	Commisaaris	:	I Nyoman Tasik

Beberapa anggota dari perkumpulan pelajar Eka Laksana ini tersebar di Jawa dan Bali meliputi beberapa daerah antara lain Cabang Bandung, Cabang Yogyakarta, Cabang Surabaya dan beberapa daerah di Bali antara lain di Klungkung, Denpasar, Karangasem, Singaraja dan Bajra (Tabanan).

Perkumpulan Eka Laksana ini pada tanggal 26 Juli 1936 menggabungkan diri dengan *Balisch Studiefonds* menjadi satu perkumpulan dengan nama *Bali Darma Laksana.*

4.2.2. Perkumpulan Bali Darma Laksana

Perkumpulan ini didirikan pada tanggal 26 Juli 1936 dengan susunan pengurus besarnya sebagai berikut:

Ketua	:	I Gusti Gde Raka
Wakil Ketua	:	I Ketut Jingga
Penulis I	:	I Wayan Nurija
Penulis II	:	I Made Mendra
Bendahara	:	I Gst. Ketut Sidikaria
Pembantu-pembantu	:	1. I Nyoman Kajeng

2. I Made Putra
3. I Gst. Made Sempidi
4. I Nyoman Kaler.

Maksud dan tujuan daripada perkumpulan Bali Darma Laksana antara lain mengumpulkan uang dan memberi bantuan kepada: Putra Bali yang sedang belajar di sekolah menengah maupun di Perguruan Tinggi baik dia belajar di Indonesia (Hindia Belanda) ataupun di Luar Negeri. Di samping itu juga memberikan bantuan kepada putra Bali yang cukup memiliki kepintaran yang berfaedah untuk kepentingan masyarakat luas dimana pemberian bantuan ini atas persetujuan Pengurus Besar daripada perkumpulan Bali Darma Laksana. Disamping usaha-usaha dibidang dana sekolah *(studie-fonds),* juga perkumpulan ini berusaha memajukan kebudayaan Bali dalam arti yang seluas-luasnya. [4]

Perkumpulan ini juga menerbitkan majalah bulanan *Djatajoe*, merupakan usaha lanjutan dari perkumpulan Eka Laksana dimana majalah *Djatajoe* ini telah terbit sejak bulan Pebruari 1936.

Untuk kestabilan hidupnya perkumpulan ini maka ada juga usaha membentuk keanggotaan sebagai pelindung yang terdiri dari raja-raja Buleleng, Karangasem, Bangli, Negara, Tabanan dan Klungkung. Tentang kemajuan-kemajuan yang telah dicapai pada perkembangan setelah berjalan satu tahun, ternyata seperti kita lihat pada laporan kongresnya yang pertama yang diadakan di *clubhuis* Panean, Singaraja pada tanggal 25 - 27 Juli 1937 menunjukkan bahwa perkumpulan ini telah memiliki 14 cabang-cabang dengan jumlah anggota 403 orang. [5]

Perkumpulan ini sejak mulai berdirinya telah menerbitkan majalah *Djatajoe* yang berfungsi sebagai sarana komunikasi di antara anggota-anggota perkumpulan Bali Darma Laksana. Di samping juga berfungsi sebagai tempat menuangkan pendapat-pendapat yang berhubungan dengan dunia pengetahuan. Kapan berakhirnya perkumpulan ini belum dapat dikemukakan dengan pasti, ternyata majalah *Djatajoe* sebagai majalah perkumpulan tersebut No. 9 - 12, sampai bulan Juli 1941 masih terbit. Kemungkinan akibat meletusnya Perang Dunia II, Perkumpulan ini bubar dengan sendirinya.

4.2.3. Perkumpulan Putri Bali Sadar

Sebelum perkumpulan ini berdiri, di Denpasar telah pernah berdiri sebuah perkumpulan keputrian dengan nama *Perhimpunan Istri* yang dipimpin oleh Ibu Jubaidah seorang guru kursus kepandaian putri di Denpasar. Perkumpulan ini bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan dimana angota-anggotanya terdiri dari kalangan istri-istri yang berasal dari Jawa ditambah dari beberapa anggota lainnya yang telah dapat membaca menulis. Salah satu usahanya: ialah pendidikan kaum wanita dalam keterampilan rumah tangga, antara lain dalam hal masak-memasak. Oleh karena ada pertentangan pendapat diantara anggota-anggotanya maka anggota-anggotanya yang berasal dari Bali mendirikan perkumpulan yang baru dengan nama: *Putri Bali Sadar.* Perkumpulan ini mulai berdiri pada tanggal 1 Oktober 1936 bertempat di Denpasar. Gagasan ini timbul didorong oleh adanya banyak kaum putri Bali yang tidak dapat melanjutkan pelajaran di sekolah karena kematian orang tuanya atau yang menanggungnya. Disamping itu juga di dalam masyarakat diluar sekolah banyak lagi kaum putri baik tua maupun muda yang ingin tahu membaca dan menulis. Hal itulah yang mendorong beberapa wanita Bali untuk mendirikan studi perkumpulan wanita yang bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan. Oleh karena kesadaran dari kalangan para wanita Bali sudah mulai tumbuh, maka perkumpulan ini disebut: *Putri Bali Sadar* (PBS). Usaha-usaha yang ingin dicapai oleh perkumpulan ini antara lain:

a. Mengusahakan kerukunan di antara putri-putri Bali dengan memberi dasar peradaban Bali (menjunjung tinggi kebudayaan Bali) yang sesuai dengan perkembangan jaman.

b. Tolong-menolong di antara anggota-anggotanya dalam suka dan duka.

c. Memajukan pengetahuan dengan jalan membuka kursus-kursus pada waktu sore ataupun pagi.

d. Membuat *studie-fonds* untuk membantu anak-anak murid perempuan yang putus biaya sekolahnya.

e. Memberikan kesempatan kepada putri-putri Bali yang lewat umur untuk menambah pengetahuan memba-

ca dan menulis.

Pada tahun 1937 oleh perkumpulan PBS. telah dapat dibuka kursus a.b.c. antara lain: di kota Denpasar, Kesiman, Peguyangan, Kapal, Mengwi, bahkan juga sudah sampai di Gianyar.

Susunan pengurus yang mula-mula dari P.B.S. terdiri dari:

1.	Ketua	:	I Gusti Ayu Papeg
2.	Wakil Ketua	:	A.A. Rai
3.	Penulis/Bendahari	:	Ni Luh Kenteng
4.	Anggota	:	Ketut Setiari
5.	Anggota	:	Made Cateri.[6]

Perkumpulan ini berjalan dengan baik sampai menjelang masuknya Jepang ke Bali bersama-sama dengan perkumpulan Bali Darma Laksana, dimana diantara anggota-anggota dari Putri Bali Sadar kemudian menggabungkan diri dalam organisasi wanita pada zaman penjajahan Jepang dengan nama *Fu Jin Kay*.

4.2.4. Persatuan Pemuda Bali Lombok

Atas prakarsa Made Taman dengan beberapa teman-temannya bertempat di Surabaya pada tanggal 4 Desember 1938 dapat didirikan sebuah perkumpulan dengan nama: Persatuan Pemuda Bali Lombok (PPBL) Perkumpulan ini sebagian besar anggotanya terdiri dari pelajar-pelajar yang berasal dari Bali dan Lombok ditambah lagi beberapa pemuda baik pria maupun wanita.

Tujuan utama dari perkumpulan PPBL adalah mewujudkan persatuan di kalangan anggota-anggotanya, tidak ada perbedaan agama dan satu sama lain harus saling harga menghargai. Tujuan kedua adalah berusaha meninggikan kecerdasan melalui pendidikan dengan berbagai usaha antara lain menerbitkan majalah, mengadakan pembacaan, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil rapat pada pendirian perkumpulan itu tanggal 4 Desember 1938 telah memilih pengurus umumnya terdiri dari:

Ketua	:	N. Malaya
Penulis	:	Lalu Usman
Bendahari	:	G.M. Ayu Ari
Pembantu	:	M. Taman

Bekas anggota-anggota panitianya adalah M. Pasek, Gd. Ariya, M. Sunadha, mereka ini ikut membantu perkumpulan PPBL [7]

4.2.5. Partai Indonesia Raya (Parindra)

Partai Indonesia Raya (Parindra) baru berkembang di Bali atas prakarsa dr. Murdjani yang pada waktu itu bertugas di Negara. Dialah yang memprakarsai untuk membentuk Parindra di Bali, mula-mula dapat dibentuk cabang-cabang antara lain di Singaraja, Denpasar dan Tabanan. Diantara tahun 1938 - 1939 dapat dibuka cabang-cabang: Singaraja, Tabanan, Denpasar, Negara, Klungkung, Gianyar, Bangli dan Karangasem. [8] Sebagai organisasi politik yang pertama di Bali, Parindra mempunyai tujuan antara lain mencapai Indonesia Raya dengan jelas:

1. Memperkuat semangat persatuan kebangsaan Indonesia,
2. Mendapatkan hal-hal politik seluas-luasnya dan mencita-citakan pemerintahan yang berdasarkan demokrasi dan kebangsaan,
3. Memajukan perekonomian dan kehidupan sosial rakyat Indonesia. [9]

4.3. KEADAAN DI BALI MENJELANG KERUNTUHAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA DAN KEDATANGAN JEPANG.

Pada permulaan abad ke XX, timbullah gejolak-gejolak politik di Hindia Belanda. Rakyat pribumi menentang kolonialisme Belanda dengan jalan mendirikan organisasi pergerakan, mencerminkan timbulnya kesadaran nasional. Walaupun demikian timbulnya kesadaran nasional di tiap daerah Hindia Belanda tidak bersamaan. Kesadaran nasional di Bali, timbul pada saat-saat terakhir keruntuhan pemerintah Hindia Belanda, tepatnya tahun 1920. [10]

4.3.1. Sikap Pemerintah Hindia Belanda.

Pulau Bali jatuh ke tangan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1908 yaitu pada waktu tentara Belanda berhasil menaklukkan kerajaan Klungkung sebagai kerajaan yang ter-

akhir. [11]

Takluknya seluruh Pulau Bali memberi keleluasaan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk mengatur daerah ini dengan sistem pemerintahan secara Barat sesuai dengan kepentingan kolonial pada waktu itu. Bali masih tetap terdiri dari delapan buah kerajaan dan masing-masing dipegang oleh keturunan penguasa pribumi. [12]

Residen adalah wakil pemerintah kolonial Belanda di Bali, memegang kekuasaan tertinggi di dalam pemerintahan dan berkedudukan di kota Singaraja. Wilayah kekuasaannya tidak saja meliputi seluruh Pulau Bali tetapi meiputi juga seluruh Pulau Lombok.

Pemerintah kolonial Belanda mengawasi pemerintahan penguasa-penguasa pribumi dengan ketat. Oleh karena itu pada tiap kerajaan di Bali, pemerintah menempatkan seorang pejabat Belanda untuk mengawasi kegiatan raja. Jabatan ini disebut *controleur.*

Dalam pandangan kolonial, elite politik pribumi merupakan kelompok penguasa yang bisa membahayakan kekuasaannya tetapi juga membantu pemerintah kolonial. Penguasa-penguasa pribumi merupakan alat administrasi pemerintah kolonial sehingga ada kecendrungan untuk mempertahankannya dan menempatkan mereka sebagai bawahan, sebagai penghubung antara rakyat pribumi dengan pemerintah dalam sistem pemerintahan indirek. Dengan sendirinya, pengawasan pemerintah kolonial banyak mengurangi hak-hak penguasa pribumi sebagai elite tradisional.

Pada permulaan abad ke XX, timbullah golongan elite baru terutama berasal dari golongan intelektual pribumi yang berpendidikan Barat. Pemerintah kolonial Belanda di Bali bersikap pasif walaupun Budi Utomo sebagai organisasi pergerakan telah berdiri. I Putu Kaler, pejabat penilik sekolah wilayah Bali mendirikan organisasi ini pada tahun 1920 di kota Denpasar. [13]

Sikap pemerintah kolonial mulai berubah setelah faham politik masuk ke dalam tubuh organisasi pergerakan yang timbul kemudian. Pemerintah kolonial berusaha melindungi dan memelihara nilai budaya tradisional Bali. Oleh karena itu pemerintah mengatur dan mengawasi perkembangan kebudayaan Bali terutama dalam bidang pendidikan, lebih-lebih dalam bidang politik. Pandangan pemerintah kolonial Belanda yang kon-

servatif tampak sangat jelas, sebab kebijaksanaan pemerintah terang-terangan mengekang kemajuan rakyat Bali. Proses integrasi bangsa terhambat karena dengan kebijaksanaan ini bisa mempertajam rasa kedaerahan.

Politik pemerintah yang menetapkan Bali seperti keadaan semula dan menutup pengaruh kebudayaan luar terutama pengaruh Barat terkenal dengan istilah *Balisering.*

Sejalan dengan kebijaksanaan ini, politik *colourline,* rasdiskriminasi memang sangat diperlukan oleh pemerintah kolonial. Pemerintah Belanda melalui alat-alat kekuasaannya seperti *controleur* mengawasi secara ketat kehidupan sosial, melarang orang-orang kulit putih terutama bangsa Belanda untuk bergaul dengan orang Bali. [14]

Membatasi golongan intelektual dengan cara membatasi jumlah sekolah-sekolah sebagai sarana pendidikan dan melarang rakyat Bali mengenyam pendidikan yang lebih tinggi adalah realitas politik pemerintah Belanda sebelum mereka meninggalkan Bali. Belanda hanya bertujuan sekedar memperoleh tenaga rendahan untuk memperlancar sistem penjajahannya. Oleh karena itu Belanda mendirikan sekolah kelas satu dan kelas dua *(Eerste Inlandsche School* dan *Tweede Inlandsche School)* dan baru kemudian setelah tahun 1931 didirikan sekolah kelas enam. Jumlah sekolah sangat terbatas. Sekolah kelas satu hanya sebanyak 94 buah yaitu di Denpasar dua puluh buah, di Tabanan dua puluh buah, Negara sebanyak lima buah, di Singaraja lima belas buah dan lain sebagainya. Sekolah kelas dua di Bali berjumlah cukup terbatas juga. *Honlandsch Illandsche School* didirikan di Klungkung, Denpasar dan Singaraja dan jumlahnya hanya lima buah sedangkan Sekolah Guru sangat terbatas.

Sikap curiga dan tindakan tugas pemerintah kolonial Belanda di Bali mulai terasa terutama setelah golongan intelektual bertambah banyak. Pemerintah Belanda melarang rakyat Bali masuk organisasi pergerakan misalnya Partai Indonesia Raya. Para pegawai yang melanggar peraturan pemerintah dipecat dan tidak dijamin keselamatannya, sebaliknya pemerintah Belanda menaikkan gaji para pegawai yang mentaati peraturan tersebut di atas.

Pemerintah kolonial juga tidak pernah membimbing rakyat Bali untuk mempertahankan daerahnya. Walaupun peme-

rintah kolonial Belanda membentuk kesatuan pasukan "Prayoda" yang terdiri dari rakat Bali, alat kekuasaan ini tidak lebih daripada kesatuan milisi yang sangat terbatas.

Paruman Agung yang terbentuk pada tanggal 30 September 1938 pada hakekatnya masih bersifat kolonial, walaupun bentuk organisasi ini mengarah kepada parlemen. Anggota terdiri dari raja-raja Bali tetapi ketua adalah Residen Bali dan Lombok, mempunyai kekuasaan yang sangat mutlak. [16]

Dari apa yang telah diuraikan di atas jelaslah, bahwa pemerintah kolonial Belanda di Bali mempunyai sifat anti nasionalisme, non akulturatif dalam bidang kebudayaan dan menterapkan politik rasdiskriminasi.

4.3.2. Keadaan masyarakat di Bali

Pada saat-saat terakhir kekuasaan Belanda di Bali, masyarakat Bali masih terdiri dari beberapa golongan kasta *(warna).* Masyarakat kebanyakan adalah golongan jaba yaitu rakyat banyak, yang ada diluar golongan *triwangsa* (Brahmana, Ksatria dan Wesya).

Apabila dilihat secara sepintas lalu, ke empat golongan masyarakat Bali terpisah antara satu dengan yang lainnya, sering bertentangan. Dari segi yang lain, sebenarnya setiap golongan di dalam masyarakat Bali tradisional menunjukkan saling ketergantungan. Relasi ketergantungan ini sebenarnya timbul dari ikatan-ikatan politik, sosial dan keagamaan antara elite sosial politik dari golongan aristokrasi dengan rakyat kebanyakan sehingga menimbulkan corak yang komplementer. Golongan Brahmana, Ksatria, Wesya dan Jaba, terikat oleh bermacam-macam aspek sehingga membentuk satu struktur.

Elite sosial politik yang menempati puncak struktur sosial pada umumnya masih ada di dalam tangan golongan triwangsa. Hal ini jelas kelihatan, karena raja-raja Bali berasal dari golongan Ksatria, memegang pemerintahan secara turun-temurun. Gelar raja berbeda-beda di masing-masing kerajaan. I Dewa Agung adalah gelar untuk raja Klungkung; Anak Agung Anglurah, untuk raja Karangasem; Cokorda dan lain sebagainya. [17]

Dengan sendirinya rakyat banyak tidak mempunyai peranan di dalam politik pemerintahan kerajaan. Rakyat Bali kebanyakan masih buta huruf, terasing dari pendidikan. Di satu pi-

hak karena terbatasnya sekolah-sekolah sebagai akibat tindakan pemerintah kolonial Belanda dan di pihak lain adalah kesadaran untuk menuntut ilmu masih kurang, lebih-lebih pada zaman Malaise. Pada waktu sekolah-sekolah telah berdiri, terasalah kesukaran untuk mendapatkan murid. Petugas-petugas pendidikan berusaha mendatangi rumah-rumah penduduk dengan maksud memperoleh murid tetap jarang berhasil. [18]

Boleh dikatakan pengaruh Barat, khususnya di dalam bidang pendidikan belum menyentuh rakyat pedesaan di Bali. Baru kemudian setelah pendidikan makin maju yaitu dengan bertambahnya sekolah-sekolah serta golongan intelektual, rakyat banyak makin lama makin sadar. Timbul juga konflik sosial di Bali. Di Singaraja, timbul pertentangan antara golongan intelektual yang berpendidikan Barat dengan paham-paham kemajuan dengan golongan konservatif yang mempertahankan adat lama. Dalam perkembangan kemudian konflik ini mengambil bentuk yang lebih konkrit lagi berupa pertentangan antara golongan *Jaba* dengan perkumpulan "Surya Kanta" disatu pihak di golongan *Tri Wangsa* dengan perkumpulannya yang disebut Bali Adnyana. [19]

Pertentangan kasta di Bali Utara berjalan secara berlarut-larut dan kemudian setelah berkumpul Bali Darma Laksana berdiri pada tahun 1937, pertentangan kasta ini mulai reda. [20]

Sejalan dengan timbulnya paham-paham tentang kemajuan maka muncul pula berbagai organisasi sosial dan keagamaan. Sebenarnya sebagian besar rakyat Bali tidak mengenal Agama Hindu secara mendalam.

Walaupun demikian aktivitas rakyat Bali di dalam bidang keagamaan pada saat-saat terakhir kekuasaan pemerintah Belanda, tampak juga. Pada tahun 1932 di desa Banjar Anyar, kecamatan: Kediri, Kabupaten Tabanan, berdiri sebuah sekolah agama di bawah pimpinan seorang guru agama Hindu yaitu Pedanda Gede Pemaron. Pelajaran agama diberikan sesuai dengan daftar pelajaran setiap hari kecuali hari Sabtu. [21]

Pada tanggal 16 Oktober 1939 berdiri sebuah perkumpulan Agama Hindu yang bernama "Trimurti". Perkumpulan ini bertujuan memperbaharui adat agama yang tidak sesuai dengan kemajuan jaman. Setahun kemudian yaitu pada tahun 1940, raja Klungkung mengadakan *paruman* para wiku bertempat di

puri Klungkung. [22]

Di dalam bidang hukum, masyarakat Bali masih tetap mempergunakan hukum yang telah dikenal sebelumnya seperti Agama, Adigama, dan lain sebagainya walaupun isinya banyak yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Raja pribumi *(Regent)* mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam bidang hukum bersama-sama pendeta kerajaan *(bagawanta).* Pengadilan di Bali disebut *Raad van Kerta.* Dengan sendirinya pemerintah kolonial Belanda mempunyai hukum tersendiri yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi. Dengan demikian tampak adanya dualisme di dalam bidang hukum. Pemerintah Belanda tidak melarang rakyat pribumi mempergunakan hukum-hukum yang mereka miliki sendiri asal tidak bertentangan dengan kebenaran umum. [22]

4.3.3. Sikap masyarakat terhadap pemerintah Belanda

Pengajaran dan pendidikan yang sangat terkebelakang, mengakibatkan jumlah golongan intelektual di Bali sangat terbatas. Baru kemudian terutama setelah putra-putra Bali memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi antara lain di Pulau Jawa, jumlah golongan intelektual makin bertambah juga. Nasionalisme sebagai pencerminan rasa anti kolonialisme Belanda, tumbuh dan berkembang subur. Benih-benih nasionalisme putra-putra Bali baru muncul tahun 1920, yaitu sejak berdirinya Budi Utomo, di kota Denpasar. Organisasi ini muncul berkat kegiatan I Putu Kaler, seorang intelektual yang pada saat itu menjabat penilik sekolah wilayah Bali. [23]

Keterbelakangan rakyat Bali terutama di dalam bidang pendidikan mengakibatkan Budi Utomo giat mengadakan kursus-kursus pembrantasan buta huruf di desa-desa [24]

Pada tanggal 9 September 1933 Komite Taman Siswa berdiri di Kota Denpasar dibawah pimpinan I Gusti Ngurah Pemecutan. Tujuan Komite Taman Siswa adalah untuk melanjutkan usaha-usaha rakyat Bali dalam pendidikan. [25] Usaha-usaha Komite Taman Siswa di Bali banyak mengalami kemajuan. Setahun sebelum Tentara Jepang mendarat di Bali, yaitu pada tanggal 8 Mei 1941 berdirilah *Wanita Taman Siswa* dengan pengurus antara lain: Nyi Suryo Kusumo; Penulis Nyi Mohasim; Ben-

dahara Nyi Cokorda Rai. Akibat-akibat peperangan mulai terasa di Hindia Belanda dan Majelis Luhur Taman Siswa dengan rapat tertanggal 31 Oktober 1941 memutuskan untuk mengangka Moehasim Malaca menjadi Instruktur Taman Siswa Wilayah Bali. Sementara itu iuran setiap bulan dari masing-masing cabang Taman Siswa di Bali seperti setiap bulan dari masing-masing cabang Taman Siswa di Bali seperti cabang Badung dan Karangasem bisa berjalan seperti biasa. [26] Berkat Budi Utomo dan Taman Siswa rakyat Bali makin lama makin maju di dalam bidang pendidikan.

Di dalam bidang politik, reaksi rakyat Bali juga boleh dikatakan lebih terkebelakang daripada rakyat di Pulau Jawa. Budi Utomo yang berdiri di kota Denpasar sama sekali berdiri diluar politik. Secara resmi organisatoris, paham-paham politik rakyat Bali baru muncul dalam tahun 1938, yaitu sejak berdirinya organisasi pergerakan yang secara tegas memakai nama partai yaitu Partai Indonesia Raya. Paham kebangsaan mulai masuk ke dalam tubuh organisasi ini sejak Dr. Murjani secara giat memberi penerangan-penerangan politik, menamakan rasa kebangsaan terhadap putra-putra Bali, walaupun usaha ini mendapat tantangan yang cukup keras dari pemerintah kolonial Belanda di Bali. [27]

Walaupun Partai Indonesia Raya lebih menunjukkan sikap kerjasama (koperasi) terhadap pemerintah Belanda namun sikap politik yang diambil oleh organisasi ini cukup mencerminkan bahwa rakyat Bali telah mempunyai kesadaran berbangsa dan oleh karenanya mengambil sikap tertentu dalam berhadapan dengan kekuasaan kolonial. Sikap Partai Indonesia Raya di Bali dapat dilihat dari keputusan konperensi Partai Indonesia Raya seluruh Bali. Konperensi pertama dan kedua berlangsung masing-masing di kota Tabanan pada tahun 1939 dan pada tahun 1940 di kota Klungkung. Keputusan yang diambil antara lain: Membentuk Rukun Pelajar Indonesia di Bali.

Rupanya hal yang lebih penting adalah usul dan resolusi Partai Indonesia Raya seluruh Bali kepada Residen Bali dan Lombok sebagai wakil Pemerintah Belanda. Partai Indonesia Raya mengusulkan agar pemerintah Belanda menempatkan wakil Parindra di Paruman Agung. Mengajukan resolusi agar pemerintah Belanda melarang orang-orang asing memotret wanita-

wanita Bali yang sedang telanjang, melarang mencetak dan mengedarkan buku-buku atau brosur lainnya yang isinya menghina suku bangsa Bali. [28]

Khusus dari kalangan pemuda, timbul juga rasa kebangsaan dan secara tegas memakai kata "Indonesia didalam organisasi pergerakannya". Sebagai contoh misalnya adalah Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia yang berdiri pada tahun 1940, dua tahun sebelum Jepang mendarat di Bali. [29]

Memang sejak mulai timbulnya rasa kebangsaan di Bali mempunyai hubungan dengan perkembangan rasa kebangsaan di pulau Jawa. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa rasa nasionalisme rakyat Bali sebagian besar diakibatkan oleh pengaruh yang datang dari Pulau Jawa. Gabungan politik Indonesia sebagai organisasi pergerakan menuntut agar pemerintah Hindia Belanda, membentuk parlemen untuk rakyat Indonesia. Tanggapan yang tidak positip pemerintah kolonial Belanda mengakibatkan terjadinya momen aksi di seluruh Hindia Belanda. Pada tahun 1940 rakyat Indonesia yang ada diseluruh Bali di bawah pimpinan Abikusno Cokrosuyoso, mengadakan momen aksi secara serentak. Kaum pergerakan memakai jas dengan peci hitam, lencana bulat merah putih dan menyerukan "Indonesia Berparlemen". [30]

Dari uraian di atas jelas bahwa rakyat Bali banyak menunjukkan sikap kerjasama (koperasi) terhadap pemerintah kolonial. Sikap pemerintah kolonial Belanda, yang tidak mempercayai rakyat Indonesia di Bali untuk ikut mengambil bagian di dalam usaha memikirkan nasib bangsa, membela serta mempertahankan daerah mengakibatkan rakyat Bali memperlihatkan sikap pasif, membiarkan tentara Jepang menduduki Pulau Bali. [31]

4.3.4. Keadaan pemerintahan Hindia Belanda pada saat terakhir di Bali

Pada umumnya, sistem pemerintahan Hindia Belanda di Bali terutama pada saat-saat menjelang pendaratan tentara Jepang tetap sama. Pemerintah kolonial Belanda masih tetap menterapkan sistem pemerintahan tidak langsung *(indirect)*. [32]

Rupanya pemerintah kolonial Belanda secara sungguh-sungguh memperhatikan pendapat-pendapat daripada ahli un-

tuk menentukan dan menetapkan kebijaksanaan politik. Van Eck adalah seorang ahli yang cukup lama tinggal di Bali dan mempunyai pengetahuan cukup mendalam pula tentang Bali. Pendapat-pendapatnya, sangat berpengaruh kepada kebijaksanaan politik pemerintah kolonial di Bali. Menurut Van Eck, orang-orang Belanda tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai masyarakat Bali. Petugas pamong praja Belanda adalah sumber konflik sehingga sering gagal di dalam menjalankan tugas. [33] Rupanya inilah yang menjadi salah satu sebab sehingga pemerintah kolonial Belanda mempertahankan penguasa-penguasa pribumi sebagai alat administrasi di dalam menjalankan pemerintahannya di Bali.

Penguasa tertinggi di dalam bidang pemerintahan terletak di tangan residen yang mempunyai kekuasaan di seluruh Pulau Bali dan Lombok. [34]
Khusus untuk memegang pemerintahan di Bali, pemerintah Belanda menempatkan seorang asisten residen yang berkedudukan di kota Denpasar sedangkan residen berkedudukan di kota Singaraja. [35]

Pada tanggal 21 Juni 1938, pemerintah kolonialisme Belanda menghapuskan *stedehouder* (Regent) dan kemudian Pulau Bali terbagi menjadi dua buah *afdeling* yaitu *afdeling* Bali bagian Utara dan *afdeling* Bali Selatan. Pada tahun itu juga daerah-daerah kerajaan ditetapkan menjadi *selfbestuur.* [36]

Penetapan tiap *regentschap* menjadi *zelfbestuurlandschap* biasanya didahului oleh pernyataan (verklaring) dari *zelfbestuurder* yang bersangkutan. Pernyataan ini berisi kewajiban-kewajiban terpenting *zelfbestuurder* baik dalam hubungannya dengan pemerintah kolonial Belanda maupun dengan dunia luar. [37]

Mengenai struktur pemerintahan yang ada dibawah Asisten residen masih tetap sama yaitu terdiri dari *controleur,* mendampingi raja-raja pribumi yang memegang pemerintahan di daerah kerajaan masing-masing *(onderafdeling).* Sebagai akibat perubahan-perubahan politik ketatanegaraan di Bali, khususnya mulai tahun 1938 maka tiap-tiap kerajaan *(landschap)* berdiri sendiri. Oleh karena itu untuk mewujudkan kerjasama di antara delapan buah kerajaan di Bali terbentuklah Paruman Agung yang berkedudukan di Denpasar. Ketua Paruman Agung

adalah Residen Bali dan Lombok. [38]

Pemerintah kolonial Belanda mengadakan perubahan-perubahan intern di dalam politik ketatanegaraan di Bali dan sementara itu hubungan antara pemerintah Hindia Belanda dengan Nederland terputus sebagai akibat peperangan di Eropah. Hindia Belanda telah mulai terancam karena Jepang telah mengumumkan Perang Pasifik. Untuk mempertahankan Hindia Belanda, terbentuklah pertahanan bersama tentara Sekutu. Pemerintah Hindia Belanda bertugas mempertahankan Pulau Jawa, Madur adan Bali sedangkan daerah-daerah lain diserahkan kepada Amerika dan Inggris. [39]

Untuk mempertahankan pulau Bali, alat-alat kekuasaan pemerintah Belanda terdiri dari kesatuan Prayoda, semacam milisi yang diambil dari putra-putra Bali.
Kesatuan Prayoda mempunyai persamaan dengan Legiun Mangku Negaran di Surakarta dan Legiun Paku-alam di Yogyakarta demikian juga barisan Cokro di Madura. [40]

4.4. KEDATANGAN PASUKAN JEPANG

Jepang telah mengumumkan perang kepada Sekutu sehingga mulailah Perang Pasifik. Jepang menyusun rencana pendaratan tentaranya di seluruh daerah Hindia Belanda. Dari daerah Pilipina, tentara pendudukan Jepang terus berlayar ke daerah Sulawesi, melalui Selat Lombok masuk ke Bali. [41]

4.4.1. Propaganda Jepang yang terasa di Bali

Untuk menarik hati rakyat di daerah-daerah yang akan diduduki oleh tentara Jepang sehingga bisa memperlancar pendaratannya, Jepang melancarkan propaganda. Untuk daerah Asia Jepang melancarkan gerakan Tiga A yang pada hakekatnya mencerminkan superioritet bangsa Jepang di atas semua bangsa Asia lainnya. Bangsa Jepang adalah bangsa Asia yang berkewajiban memimpin, melindungi bangsa Asia lainnya. Jepang menyiarkan lagu Indonesia Raya secara langsung dari ibukota Tokyo kemudian studio radio Jepang di daerah-daerah pendudukan menyiarkan kembali sehingga rakyat Hindia Belanda dapat mendengarkannya. [42]

Propaganda bangsa Jepang boleh dikatakan cukup berhasil menarik hati rakyat Bali, khususnya golongan atasan. Jepang

mempunyai barisan yang mempunyai tugas khusus untuk melancarkan propaganda yaitu *Sendenbu-Sendenka* dan *Naimobu*. Kedua badan propaganda ini secara giat melancarkan propaganda untuk memudahkan pendaratan tentara Jepang dengan jalan menyiarkan berita kehancuran tentara Sekutu dan kemenangan secara terus-menerus pihak tentara Jepang. Kedatangan bangsa Jepang ke Bali membawa misi untuk memperbaiki nasib rakyat dalam rangka kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. [43]

Jepang datang ke Bali bukanlah untuk menggantikan penjajahan Belanda tetapi hanya bertugas mengusir penjajah Belanda dari Pulau Bali. Oleh karena itu menurut bangsa Jepang, rakyat Bali yang mengungsi ke pedalaman harus kembali melakukan kegiatan seperti biasa untuk ikut membantu menyusun pemerintahan. [44]

Memang pada permulaannya, propaganda Jepang cukup berhasil menarik hati rakyat Bali tetapi kemudian setelah keadaan perang Asia Timur Raya betul-betul diketahui oleh rakyat Bali, mulailah rakyat Bali mengambil kesempatan yang baik untuk melancarkan sikap anti Jepang. Mula-mula dengan diam-diam dan kemudian secara terang-terangan.

4.4.2. Waktu pendaratan Jepang di Bali

Jauh sebelum tentara Jepang mendarat, telah ada beberapa orang Jepang di Bali yang bekerja sebagai pedagang. Sebenarnya di antara mereka ada yang mempunyai pangkat tinggi tetapi melakukan pekerjaan sebagai mata-mata, menyelidiki kegiatan pemerintah Belanda. [45] Dari udara, tentara Jepang juga berusaha untuk melakukan pengintaian terhadap tempat-tempat pertahanan Belanda seperti Tuban, Benoa. [46]

Pada tanggal 16 Pebruari 1942 terjadi pertempuran laut di sebelah Selatan kota Denpasar. Pertempuran semacam ini terjadi juga di perairan Selat Bali. [47] Sebelum Jepang mendarat di Bali, terjadilah pertempuran udara yang sangat hebat antara pasukan Jepang melawan Sekutu sehingga dua buah pesawat pemburu milik Australia jatuh masing-masing di Tuban dan di desa Blahkiuh, Kabupaten Badung. [48]

Pertempuran-pertempuran antara pasukan Jepang melawan tentara Sekutu berhenti dan kemudian barulah Jepang men-

daratkan pasukannya di Bali. Pasukan Jepang berlayar dari Pilipina menuju ke Selatan kemudian menduduki daerah-daerah penting di seluruh Sulawesi. Dari Sulawesi pasukan Jepang terus berlayar ke Selatan masuk ke Selat Lombok akhirnya sampai di sebuah selat antara pulau Nusa Penida dengan Pulau Bali yaitu di Selat Badung, pada tanggal 19 Pebruari 1942. [49]

Berbeda dengan pendapat tersebut di atas, ada sumber lain yang mengatakan bahwa tentara Jepang telah mendarat dan berhasil menaklukkan Pulau Bali pada tanggal 18 Pebruari 1942. [50] Pendapat Nyoman S. Pendit, mempunyai persamaan dengan pendapat yang telah disebut pertama. Menurutnya pasukan Jepang mendarat di pantai Sanur pada tanggal 19 Pebruari 1942. [51]

Menurut informan, kapal perang Jepang telah merapat di pantai Sanur pada malam hari. Besok pagi sebelum matahari terbit, barulah pasukan Jepang turun ke pantai dan meneruskan perjalanan menuju kota Denpasar dengan tenang. [52] Informan lain mengatakan bahwa tentara Jepang mendarat di pantai Padang Galak (Sanur) pada tanggal 17 Pebruari 1942 dan pada pukul 06.00 (WIB) tentara Jepang mulai bergerak memasuki kota Denpasar. [53]

Pendaratan tentara Jepang di Bali boleh dikatakan tidak mendapat perlawanan dari alat-alat kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah melakukan taktik mundur dan siasat bumi hangus. Pulau Bali tidak mungkin dipertahankan lagi. Oleh karena itu alat-alat kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Bali, khususnya regu perusak *(vernielingsbrigade)* membakar berpuluh-puluh gudang persediaan bersama isinya. Beratus-ratus drum bensin yang ada di gudang-gudang BPM dan DPM., baik di kota Singaraja maupun yang ada di kota Denpasar terbakar habis. [54] Di kota Denpasar, regu perusak mengarahkan sasarannya kepada persediaan bensin di Suci, Benoa dan Tuban. [55]

Sementara itu, alat-alat kekuasaan pemerintah kolonial Belanda yang tergabung di dalam kesatuan-kesatuan Prayoda mengikuti perintah opsir-opsir Belanda untuk segera mengundurkan diri dari tempat-tempat pertahanan seperti Tuban, menuju daerah pedalaman. Di desa Penebel, Kabupaten Tabanan para opsir Belanda memerintahkan kepada kesatuan-kesatuan

Prayoda untuk membuka pakaian masing-masing. Semua senjata dimusnahkan kemudian bubar menuju tempat asal masing-masing. [56]

Dari kota Denpasar, serangan-serangan tentara Jepang dilancarkan ke seluruh pulau Bali. Kota Tabanan, dan Negara jatuh demikian juga kota Gianyar. Jepang menyerang kota Klungkung dari pantai Batuklotok sedangkan dari kota Singaraja, Jepang melancarkan serangannya terhadap kota Karangasem. Jepang menduduki seluruh pulau Bali tanpa perlawanan yang berarti dari pihak alat-alat kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Bali. [57]

4.4.3. Sikap Jepang terhadap aparatur pemerintah Belanda

Pasukan Angkatan Darat Jepang (Rikugun) berhasil menaklukkan Pulau Bali, kemudian mengambil tindakan-tindakan tegas terhadap orang-orang kulit putih terutama terhadap orang-orang Belanda yang memegang posisi penting di dalam bidang pemerintahan kolonial. *Resident, Assistent Resident* dan *Controleur* ditangkap dan kemudian diangkut ke luar Bali, dimasukkan ke dalam tahanan di Pulau Jawa. [58]

Jepang merasa curiga terhadap setiap bangsa kulit putih yang masih ada di Bali. Hotel milik bangsa Amerika dihancurkan sama sekali. Walaupun demikian Jepang mempunyai sikap yang lebih lunak terhadap masalah warna kulit apabila dibandingkan dengan pemerintah kolonial Belanda. [59] Terhadap sistem pendidikan, Jepang mengambil sikap yang tegas juga. Sekolah-sekolah yang memakai sistem pendidikan Belanda diganti dengan sistem pendidikan Jepang. [60]

Selama lebih kurang tiga bulan, *Rikugun* memegang kekuasaan maka pada bulan Mei 1942 pasukan ini meninggalkan Pulau Bali kemudian diganti oleh angkatan laut *(Kaigun).* Di Bali Jepang membentuk pemerintahan sipil. Walaupun demikian pemerintahan Jepang tetap bersifat asis karena angkatan laut memegang peranan penting di dalam pemerintahan. *61*

Sebenarnya Jepang masih tetap mempertahankan struktur pemerintahan yang dipergunakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Jepang hanya mengadakan perubahan di dalam nama-nama jabatan dan dengan sendirinya mempergunakan nama-nama yang diambil dari bahasa Jepang. Hal ini dilakukan untuk

menghilangkan kesan-kesan penjajahan Belanda di kalangan rakyat Bali.

Menseibu Cookan adalah orang Jepang yang memegang jabatan tertinggi di dalam pemerintahan Jepang di Bali. [62] *Menseibu Cookan* berkedudukan di kota Singaraja dan jabatan ini bisa disejajarkan dengan Residen pada jaman pemerintahan kolonial Belanda. Wilayah kekuasaan Cookan sama dengan wilayah kekuasaan Residen yaitu meliputi Pulau Bali dan Lombok. *Cookan,* mempunyai kekuasaan dalam bidang pemerintahan sipil sedangkan kekuasaan tertinggi militer, dipegang oleh *Sirei* yang berkedudukan di kota Denpasar. [63]

Pemerintahan Jepang yang bersifat fasis memberi kekuasaan yang lebih besar kepada golongan militer. Oleh karena itu *Sirei* yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam bidang militer berhak mengawasi pemerintahan sipil. [64]

Khusus untuk pemerintahan militer, Jepang membagi Pulau Bali menjadi dua wilayah kekuasaan militer. *Hokubu Baliken* adalah wilayah Bali Utara, rupanya dapat disejajarkan dengan *afdeling* Bali Utara pada jaman pemerintahan kolonial Belanda, sedangkan *Nanbu Baliken* adalah wilayah Bali Selatan. [65]

Untuk mengawasi pemerintahan raja-raja pribumi, Jepang menempatkan seorang *Bunken Kan Rih Kan* di tiap-tiap kerajaan *(Syu). Bun Ken Kan Rin Kan* rupanya dapat disejajarkan dengan *Controleur* pada jaman pemerintahan Kolonial Belanda. [66]

Dari apa yang telah diuraikan di atas jelaslah bahwa struktur pemerintahan pada jaman pendudukan Jepang tidak berbeda dengan struktur pemerintahan kolonial Belanda di Bali pada umumnya. Hanya saja oleh karena pemerintahan Jepang bersifat fasis, peranan golongan militer tampak lebih menonjol.

4.4.4. Sikap Jepang terhadap Bangsa Indonesia

Sejak pendaratan sampai kekuasaannya berakhir di Bali, Jepang terlalu banyak menuntut dari rakyat Bali untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya, sehingga sering menimbulkan tindakan kekerasan. Kesulitan komunikasi dalam bidang bahasa menimbulkan tindakan emosional. Pukulan, tamparan dan

tendangan merupakan pekerjaan biasa yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap rakyat Bali. 67 Dalam hal ini *Tokke Tei* yaitu polisi militer Jepang di Bali banyak mengambil peranan. 68

Rakyat Bali harus bisa berbahasa Jepang. Jepang melarang rakyat Bali mempergunakan bahasa Inggris maupun Belanda. Oleh karena itu, Jepang mengadakan kursus-kursus bahasa Jepang. 69 Dalam bidang pendidikan, tampak adanya sistem yang lebih demokratis. Jepang membubarkan sekolah-sekolah swasta dan mendirikan sekolah-sekolah untuk menampung murid-murid yang berasal dari semua golongan penduduk. Rakyat Bali bebas masuk sekolah-sekolah seperti Sekolah Menengah Umum *(Hutsu Cu Gakko);* Sekolah Menengah Atas *(Katto Cu Gakko)*; Sekolah Guru Desa *(Kyo In Yo Seidyo);* Sekolah Guru B *(Sihan Gakko)* dan Sekolah Guru A *(Katto Sihan Gakko).* Di samping itu rakyat Bali juga memperoleh kesempatan untuk memasuki sekolah-sekolah pertanian dan pertukangan. 70

Bahasa pengantar yang dipakai di sekolah-sekolah adalah bahasa Jepang dan Bahasa Indonesia. Lagu kebangsaan Jepang yaitu *Kimigayo* harus dinyanyikan setiap pagi disamping menghormati *Tenno Heika.* 71 Jepang juga menganti tahun Masehi yang dipergunakan sebelumnya dengan tahun *Sumera* yang biasa dipergunakan di negeri Jepang. 72

Kegiatan ekonomi ditujukan untuk menunjang keperluan perang. Pemerintah sipil membeli semua hasil bumi dan ternak rakyat kemudian dikumpulkan dan diolah. Padi digiling di pabrik Sing Bie, Tjio Ponie, Gendo Tjan Tok Kiong dan Sumber Bali. 73

Rakyat Bali terpaksa menyerahkan kekayaannya untuk keperluan perang seperti beras. Oleh karena itu rakyat Bali kekurangan makan, disamping kekurangan pakaian. Memang pendudukan tentara Jepang mengakibatkan kehidupan ekonomi di Bali sangat menyedihkan. Dalam kehidupan ekonomi, rakyat Bali tidak pernah mengalami kesulitan seperti pada pendudukan Jepang. 74

Untuk keperluan perang, Jepang memerlukan tenaga kerja yang cukup banyak. Jepang memaksa rakyat Bali menggali lubang-lubang perlindungan yang letaknya terpencar di seluruh

Bali seperti di Singaraja, Tabanan, Denpasar, Bangli dan lain sebagainya. Pekerja Sukarela yang terdiri dari rakyat Bali juga dikirim ke luar daerah. Dalam hal ini sangat terkenal Barisan Pekerja Sukarela Bali yang dikirim ke daerah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Nasib mereka tidak pernah diperhatikan. Banyak rakyat Bali yang tidak kembali walaupun perang telah selesai. [75] Sebelum berangkat, Jepang memberi janji yang muluk-muluk. Rakyat Bali yang mau menjadi pekerja sukarela akan dijamin, diberikan tugas untuk membuka tanah di daerah-daerah baru tetapi maksud sebenarnya adalah membantu Jepang untuk membuat tempat pertahanan. Ditengah perjalanan banyak kapal yang mengangkut pekerja-pekerja ini dimusnahkan dengan bom oleh tentara Sekutu. Ada diantara mereka yang bisa kembali walaupun seluruh badannya hangus terbakar. [76]

Dalam bidang politik, rakyat Bali mengalami nasib yang sama. Jepang mengeluarkan undang-undang yang melarang semua organisasi pergerakan. Keinginan untuk bersidang dan berkumpul kedalam gerakan Tiga A yang kemudian diganti dengan Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA). [77] Hubungan dengan luar daerah tertutup, kehidupan pers, radio sangat terkekang. [78] Kecurigaan bangsa Jepang terhadap kaum pergerakan mengakibatkan *Tokke Tei* di bawah pimpinan Ya mamoto melakukan penangkapan dan penyiksaan selama tiga bulan terhadap golongan nasionalis seperti I Wayan Bina. Ketut Buana di kota Tabanan. [79]

Kepada penguasa-penguasa pribumi yang terdiri dari raja-raja beserta aparat yang ada di bawahnya seperti: Punggawa, Perbekel dan sebagainya diijinkan tetap memegang pemerintahan. Istilah *zelfbestuurder* tidak lagi dipergunakan. Pada jaman pendudukan Jepang, raja disebut: *Syu Co* dan di dalam pemerintahan didampingi oleh *Bun Ken Kan Rin Kan,* semacam *Controleur* pada jaman pemerintahan kolonial Belanda. Para Punggawa tetap juga memegang kekuasaannya demikian juga Perbekel dan masing-masing disebut *Gun Co* dan *Son Co.* [80]

Dengan sendirinya raja-raja yang kerjasama dengan pemerintah Belanda sebelumnya dibuang. Sebagai contoh misalnya adalah raja Gianyar yang disingkirkan ke Pulau Lombok. [81] Bagaimanapun kekerasan bangsa Jepang terhadap rakyat Bali, secara tidak langsung mengakibatkan timbulnya harga diri dan

semangat yang tinggi didalam memperjuangkan kemerdekaan. Jepang membentuk *Syu Kaigi* yaitu semacam pewakilan untuk rakyat Bali walaupun tidak mempunyai arti sama sekali. [82]

Kepada rakyat Bali diberikan ikut mengambil tanggung jawab terhadap nasib bangsa dan daerahnya. Untuk pertahanan wilayah, Jepang membentuk PETA yaitu pasukan sukarela Pembela Tanah Air. Mendaftar calon anggota PETA mulai dilakukan pada bulan Pebruari 1944. Pendidikan tentara PETA, bertempat di Singaraja dan setelah tiga bulan, disebar ke seluruh Bali ditempatkan di *Daidan* (batalyon, Ksatryan) sebagai kader. [83] Selain PETA, rakyat Bali juga memperoleh kesempatan untuk dididik menjadi pembantu angkatan laut yaitu *Kaigun Heiho;* Polisi (Jumpo); Barisan Pemuda *Seinendan*); Barisan Wanita *(Fujinkai)* dan kesatuan Hansip (Keibodan). [84]

Kepercayaan Bangsa Jepang kepada rakyat Bali tampak juga didalam tindakannya untk melimpahkan tanggung jawab kepada rakyat Bali untuk memegang pimpinan didalam aparatur pemerintahan Jepang. Sebagai contoh yang sangat jelas adalah kepala wilayah Bali. Kepala wilayah Bali Selatan *(Nanbu Bali Ken)* dipegang oleh Putu Serangan dan kepala wilayah Bali Utara *(Hokubu Bali Ken)* dipegang oleh I Gusti Ketut Puja. [85]

Dalam masa pendudukan Jepang tampak juga diantaranya ada yang menaruh perhatian kepada masalah kehidupan Agama Hindu. J. Miura pernah berusaha untuk ikut menghubungi para pendeta Agama Hindu di seluruh Bali dengan maksud membentuk organisasi para pendeta. Oleh karena itu, pada tanggal 22 April 1945 diadakan rapat di Klungkung, dihadiri oleh *Bunken kan Rin Kan* Klungkung, raja-raja *Syu Co)* seluruh Bali, tujuh belas pendeta mewakili pendeta seluruh Bali, ditambah beberapa orang pemuka Agama Hindu. Rapat memutuskan untuk membentuk sebuah organisasi dengan nama *Paruman Pandita Dharma* dan dalam bahasa Jepang disebut *Pedanda Renmei.* [86]

Bagaimanapun juga, Jepang telah membuat kesengsaraan rakyat Bali selama tiga tahun yang tidak pernah dialami sebelumnya.

4.4.5. Sikap Bangsa Indonesia terhadap Jepang.

Sejak masyarakat Bali mendengar bahwa tentara Jepang

telah mendarat di pantai Sanur, mulailah timbul perasaan takut sebab dalam pikiran rakyat telah terbayang bahwa bangsa kulit kuning bertubuh pendek akan menguasai dan memerintah di Pulau Bali dengan sangat kejam. [87]

Kesan-kesan Puputan Badung masih segar di dalam ingatan rakyat lebih-lebih golongan tua. Oleh karena itu banyak rakyat lari tunggang langgang ke pedalaman. Rakyat pedalaman yang didatangi oleh gerombolan pengungsi, lari lebih ke pedalaman lagi. [88]

Rasa takut mulai reda setelah tentara Jepang berhasil menguasai Pulau Bali seluruhnya. Jepang menginstruksikan kepada rakyat Bali agar kembali ke tempat tinggal masing-masing bekerja seperti biasa. [89]

Lain halnya dengan sikap para pemuda terutama golongan pergerakan dan intelektual. Pemuda-pemuda Denpasar yang tergabung didalam Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia mulai yang berdiri pada akhir tahun 1940 menyambut kedatangan tentara Jepang dengan meriah dengan menyanyikan lagu-lagu Jepang. [90] Sambutan demikian itu adalah sebagai akibat propaganda Jepang dan memang didalam kenyataan di Bali, Jepang meperlihatkan keungulan berhasil mengusir Belanda. [91]

Kekejaman Jepang mulai tampak lagi terutama setelah Jepang mulai terdesak didalam perang melawan tentara Sekutu. Latihan baris-berbaris, menggali tempat-tempat perlindungan, menyerahkan beras dan penghasilan lainnya dilakukan oleh rakyat Bali dengan perasaan takut dan terpaksa. [92] Walaupun demikian Jepang secara tidak sengaja menanamkan semangat patriot dan rasa harga diri sebagai bangsa. [93]

Perasaan anti Jepang mulai timbul tetapi rakyat Bali tidak berani menentang dengan terang-terangan. Di desa Paseban, Karangasem rakyat Bali pernah melakukan perlawanan dan perampokan kemudian karena tertangkap, kepalanya dipenggal oleh tentara Jepang. [94]

Kaum pergerakan menentang bangsa Jepang dengan jalan bekerja dibawah tanah. [95] Gerakan pelajar *Cu Gakko, Sihan Gakko, Kyo In Yo Seidyo* dan lain sebagainya masing-masing dibawah pimpinan I Made Pastika, I Ketut Nara, I Nyoman Widia dengan pusat di Singaraja, sering mengadakan kerjasama dengan kaum pergerakan dan PETA. Sebagai tanda pengenal, para

anggota memakai simbul kecil berwarna merah, putih, hijau. [96]

Para pemuda seperti Made Wijayakusuma, I Gusti Ngurah Rai, Nyoman Mantik membentuk organisasi dibawah tanah dan pada permulaan tahun 1944 gerakan ini berkembang ke seluruh daerah Bali seperti Denpasar, Tambanan, Jembrana, Singaraja, Karangasem dan Klungkung. [97]

Di samping itu ada juga rakyat Bali yang mengorganisasi diri ke dalam organisasi rahasia yang bernama *Gerakan Anti Fasis.* [98] Gerakan rahasia berkembang dan berpengaruh besar kedalam berbagai organisasi kemiliteran, seperti: PETA, *Heiho, Kaigun, Seinendan.* Bahkan tentara PETA dibawah pimpinan *Codanco* merencanakan untuk mengurung pos polisi di kota Gianyar tetapi gagal. [99]

Untuk mengetahui berita tentang perkembangan perang antara Jepang melawan Sekutu, kaum pergerakan berusaha mendengarkan radio secara rahasia di kota Singaraja. [100] Gerakan bawah tanah rakyat Bali mulai kentara sejak Jepang terdesak di mana-mana melawan Sekutu. Demikian juga peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh tentara PETA bersama kaum pergerakan mengakibatkan gerakan rahasia dapat diketahui oleh Jepang.

Walaupun demikian gerakan rahasia tidak tinggal diam dan setelah rapat di desa Gaji, Kerobokan, Kabupaten Badung, diputuskanlah untk mengadakan pembrontakan serentak di seluruh Bali. Oleh karena itu seluruh anggota PETA, organisasi pemuda dan pelajar, pencak silat dan lain sebagainya harus bersiap-siap.

Sementara itu suasana sudah cukup panas terjadilah perkelahian antara anggota PETA dengan pelatih Jepang di berbagai daerah seperti perkelahian antara Cudanco Sugianyar di Klungkung. Oleh karena itu diadakan rapat kembali di desa Gaji. Sementara rapat berlangsung datanglah seorang utusan dari *Daidan* Tabanan yang mengatakan bahwa PETA dibubarkan, senjata dilucuti dan rencana ini mengalami kegagalan sebelum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. [101]

Di Jakarta. Mr. I. Gusti Ketut Puja sibuk mengikuti rapat-rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan baru pada tanggal 23 Agustus 1945 membawa berita bahwa Indonesia telah merdeka. [102].

Catatan Bab (4).

1. Lihat: B.J. Haga: *Balische Bestuursprobleem en Karangasemraad.* Kol. Tijdschrift XIII (1923), *jassim.*
2. Perbedaan-perbedaan pendapat mengenai masuknya agama Nasrani di Bali, Lihat: o. Lekkerkerker: "Drieerlei visie op het Balische zendings vraagstuk" Kolonial Tijdschrift, 22e Jaargang, No. 4 (Juli 1933) pp. 343 - 358.
3. Lihat Statuten Eka Laksana pada lampiran: VI.
4. Lihat Statuten *Bali Darma Laksana* padalampiran VII.
5. Majalah Djatajoe (No. 2 Th. II 25 September 1937), pp. 33 - 36.
6. Lihat lampiran VIII. Statuten *Perkoepoelan Poetri Bali Sadar.*
7. *Djatajoe* no. 6 (25 Januari 1939), pp. 171 - 174.
8. Nama-nama beberapa anggotanya dapat dibaca pada *Bali Berjuang.* oleh Nyoman S. Pendit. (Jajasan Kebangkitan Pedjuang Daerah Bali, 1954), pp. 24 - 25.
9. *Djatajoe* No. 10 (25 Mei 1939), pp. 303.
10. Njoman S. Pendit, *op.cit.* p. XXII.
11. Bwana Winasa. (manuskrip). Koleksi Geding kirtya Singaraja. Lihat juga arsip Nasional, *Surat-surat Perdjanjian antara Keradjaan-keradjaan Bali/Lombok* (Djakarta, 1964), pp. 75 - 76. cf. E, Utrecht, *Sedjarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok.* (Sumer Bandun, 1962), pp. 278 - 279.
12. I Gst. Ngr. Anandakusuma, *Pergolakan Hindu Dharma.* (Denpasar: Pustaka Balimas, 1966), p. 59.
13. Njoman S. Pendit, *loc.cit.*
14. Ketut Tantri, *Revolusi di Nusa Damai.* Alih bahasa: Maj. Abd. Bar Salim. (Djakarta: Gunung Agung, 1965), pp. 25; 39; 53.
15. Njoman S. Pendit, *op.cit.* p. XXIII.
16. *Ibid.* p. 77. Lihat juga *Peringatan 1 Tahun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali.* (Denpasar, 1951), pp. 1 - 2.
17. I Gst. Ngr. Anandakusuma, *loc.cit.*
18. I Ketut Sukarta, "Onderwijs Langkah Jang Terkebelakang" *Bhawanegara,* no. 11, 1932, p. 176. Lihat juga Onderwijs dengan Djaman Malaise Memundurkan Pendi-

dikan, dalam Bhawanegara, Mei, 1932, pp. 186 - 188.

19. Untuk lebih jelas lihat I Gusti Ngurah Bagus, *Pertentangan Kasta Dalam Bentuk Baru Pada Masyarakat Bali, passim.*
20. I Gusti Ngr. Anandakusuma, *op.cit.* p. 62, Cf, Njoman S. Pendit, *op.cit.*, p. XXVIII. Timbulnya perkumpulan Bali Darma Laksana dicatat juga di dalam *Ensiklopedi.* Lihatlah: Hassan Shadily, *(at.al), Ensiklopedi Umum,* (Djakarta; Jajasan Kanisius, 1973), p. 150.
21. I Gusti Ngurah Anandakusuma, *op.cit.*, p. 64.
22. *Ibid,* pp. 62 - 63.
22. Ketetapan pemerintah Belanda ini terdapat di dalam Staatblad tahun 1927, no. 760. Lihat Harsa, "Pengadilan di Bali dan Lombok. *Bhawanegara,* April, 1932, pp. 174 - 176.
    Lihat juga Sedikit Tentang Pengadilan di Bali" di dalam *Bhawanegara,* Oktober 1932, pp. 74 - 75.
23. Nyoman S Pendit, *op.cit* P. XXII.
24. *Ibid.*
25. Informan: Cokorda Bagus Sayoga, 51 Tahun, Puri Satrys, Denpasar.
26. Lihat *Poesara : Madjalah Persatoean Taman Siswa* no. 1 Januari, 1942. (Jogjakarta; Madjelis Loehoer Taman Siswa, 1942), pp. 13 - 18.
27. Lihat Nyoman S. Pendit, *loc.cit.*
28. *Ibid,* p. XXV.
29. Informan: I Made Pugeg, 55 Tahun, Br. Langon, Denpasar.
30. Lihat Nyoman S Pendit, *op.cit.* p. XXVII.
31. *Ibid.* p. 5
32. Lihat. G.M.T. Kahin *loc.cit.*
33. E Utrecht, *op.cit.*, p. 225.
34. *Ibid,* p. 226.
35. *Ibid.*
36. I Gusti Gde Raka, *Monografi Pulau Bali,* (Djakarta: Bagian Penerbitan Publikasi Pusat Djawatan Pertanian Rakyat, 1955), p. 12 Lihat juga *Staatblads* van Bali, 1938.
37. Untuk jelasnya lihat *Arsip Nasional loc.cit.*
38. Lihat Sekretariat DPRD Bali, *loc.cit.* Cf. Nyoman S. Pen-

dit *loc.cit.*

39. Awyong, *(at.al). Perang Pasifik, 1941 - 1945.* (Djakarta: Kengpo, 1960), p. 6.
40. Djamal Marsudi, *loc.cit.* cf. Nyoman S Pendit, *p.cit.*, p. 4.
41. Awyong, (at.al), *op.cit.*, p. 7.
42. Soebekti, *Sketsa Revolusi Indonesia, 1945 - 1950,* (Surabaya: Grip, 1966), p. 35.
43. Nyoman S. Pendit, *op. cit.*, pp. 8-9
44. Informan: I Ketut Mandra, 63 Tahun, Br. Anyar Penyaringan Negara.
45. Informan: Pancer Ardana, 54 Tahun, Tabanan. Lihat juga I Gusti Ngurah Anandakusuma, op.cit., p. 69.
46. Informan: Pancer Ardana, sama dengan di atas.
47. Informan: I Ketut Mandra sama dengan di atas.
48. Nyoman S. Pendit, *op. cit.*, p.3.
49. Awyong, (at.al), *loc.cit.*
50. Soebekti, *op.cit.*, p. 31.
51. Nyoman S. Pendit, *loc.cit.*
52. I Wayan Rubag, 57 Tahun, Kesiman.
53. Informan: I Gusti Agung Mantra, 51 Tahun, Kramas, Gianyar.
54. Nyoman S. Pendit, *loc.cit.*
55. I Nyoman Sardja Udaya, 50 Tahun, Denpasar.
56. Nyoman S Pendit, *loc. cit.*,
57. I Gusti Gde Jelantik, 78 Tahun, Puri Paku Karangasem.
58. Nyoman S. Pendit, *op. cit.*, p.6.
59. Ketut Tantri, *op.cit.* pp. 166 - 171.
60. I Made Wedastra Suyasa, 52 Tahun, Denpasar.
61. I Made Wijakusuma, 63 Tahun, Denpasar.
62. Ida Bagus Ketut Rurus, 63 Tahun, Denpasar, Kecuali Sirei, Jepang menempatkan juga seorang Ken Kan Rin Kan yang dapat disejajarkan dengan Asisten Residen pada jaman pemerintahan Kolonial Belanda.
63. Informan: I Putu Serangan, 60 Tahun, Singaraja,
64. Informan: Tairo Teiza (55 Tahun, asal Jepang), Denpasar.
65. Informan: I Putu Serangan, sama dengan di atas.
66. Informan: Taira Teiza, sama dengan di atas.
67. Informan: I Wayan Rubag, sama dengan di atas.
68. Informan: Taira Teiza, sama dengan di atas.
69. K'tut Tantri, *op.cit.* p. 171.

70. Informan: I Ketut Subrata, 62 Tahun, Br. Lumintang, Denpasar.
71. Informan: I Gusti Ketut Kaler, 53 Tahun, Blahkiuh.
72. I Made Wedastra Suyasa, sama dengan diatas.
73. Nyoman S. Pendit, *op.cit.*, p. 15.
74. Informan: I Wayan Rubag, sama dengan di atas.
75. Nyoman S Pendit, *loc.cit.*
76. Informan: I Wayan Rubag. sama dengan di atas.
77. Nyoman S Pendit, *op. cit.* p. 10.
78. Informan: Ida Bagus Pidada, 65 Tahun, Karangasem.
79. Nyoman S Pendit, *op. cit.* p. 14.
80. Informan: I Putu Serangan, sama dengan di atas.
81. Nyoman S Pendit, *op.cit.* p. 23.
82. Informan: I Ketut Subrata, sama dengan di atas.
83. Nyoman S Pendit, *op. cit.* p. 12
84. Informan: I Gusti Ketut Kaler, sama dengan di atas. Lihat juga Nyoman S Pendit, *loc. cit.*
85. Informan: I Putu Serangan, sama dengan di atas; I Nengah Wirta Tamu, 58 Tahun, Liligundi, Singaraja.
86. I Gusti Ngurah Anandakusuma, *loc.cit.*
87. Informan: I Wayan Rubag, sama dengan di atas.
88. Informan: I Wayan Lumbung, 59 Tahun, Kesiman.
89. I Ketut Mandra, sama dengan di atas.
90 Informan: I Made Pugeg, sama dengan di atas.
91. Nyoman S Pendit, *loc. cit.*
92. Informan: I Nengah Wirta Tamu, sama dengan di atas.
93. I Ketut Subrata, sama dengan di atas.
94. Informan: I Gusti Agung Mantra, sama dengan di atas.
95. Informan: I Nengah Wirta Tahun, sama dengan di atas.
96. Informan: I Made Wedastra Suyasa, sama dengan di atas.
97. Nyoman S Pendit, *p.cit.* p. 19.
98. I Nengah Wirta Tamu, sama dengan di atas.
99. Nyoman S. Pendit, *op.cit.* p. 20.
100. Informan: I Nengah Wirta Tamu, sama dengan di atas.
101. Nyoman S Pendit, *op.cit.* pp. 21 - 26.
102. *Ibid*, pp. 36 - 40.

5. PENUTUP

Dari apa yang diuraikan di atas dapatlah kita tarik beberapa kesimpulan antara lain: bahwa pertumbuhan pergerakan kebangsaan di Bali bila kita bandingkan dengan pertumbuhan pergerakan di Jawa boleh dikatakan masih jauh terkebelakang. Hal ini dapat kita hubungkan dengan politik kolonial Belanda di Bali dimana pemerintah Belanda selalu berhati-hati dan selalu memperketat pengawasan-pengawasan terhadap pertumbuhan pergerakan kebangsaan di Bali.

Memperhatikan pertumbuhan pergerakan nasional di Bali tampaklah bahwa benih-benih pergerakan itu timbul disebabkan karena faktor pendidikan. Hal tersebut sangat penting artinya dalam masyarakat Bali, karena dengan pendidikan masyarakat bisa melek dan memperoleh pengetahuan "modern" ala Barat, sehingga adat istiadat yang boleh dikatakan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat lama-kelamaan menyebabkan ikatan-ikatan tradisional tersebut menjadi lemah.

Di dalam membicarakan faktor pendidikan ini situasi di Bali terutama dari segi kebudayaan ikut pula menentukan. Masyarakat tidak begitu saja menerima pendidikan Barat, tetapi menerimanya itu melalui selektip. Karena itu dalam mengembangkan pendidikan di sekolah-sekolah masyarakat juga memperhatikan masalah-masalah pendidikan dari segi keagamaan. Ini berarti bahwa kemajuan masyarakat tidak hanya berorientasi pada pendidikan Barat, juga masih mengutamakan pendidikan yang telah diwarisi oleh para leluhur yang masih hidup dan berkembang di dalam masyarakat yaitu pendidikan yang diambil dari ajaran-ajaran agama yang masih tersimpan (tertulis) dalam lontar-lontar di Bali. Sehingga pada pertumbuhan organisasi-organisasi sosial di Bali yang pertama-tama, tetap berkeinginan untuk menjunjung tinggi kebudayaan Bali.

Dasar-dasar pemikiran seperti ini tetap hidup di dalam pertumbuhan pergerakan yang muncul belakangan. Lebih-lebih setelah tahun "dua puluhan" banyak pelajar-pelajar Bali yang melanjutkan pelajarannya ke Jawa. Dari kontak-kontak inilah mulai ditanam benih-benih nasionalisme, dimana pelajar yang

dulunya bersekolah di Jawa, kemudian di Bali untuk bekerja sambil mengambil bagian aktif dalam memajukan masyarakat Bali. Inilah yang kemudian melahirkan "paham kemajuan" yang mana kompetisi kedua golongan ini besar artinya di dalam menanamkan benih-benih nasionalisme di Bali.

Demikian pula kalau kita lihat sikap-sikap pemerintah Belanda terhadap pertumbuhan Pergerakan Nasional di Bali, kelihatan bahwa pemerintah Belanda cukup berhati-hati agar Bali jangan sampai kena pengaruh dari Jawa. Hal ini jelas kelihatan seperti misalnya dalam aspek pemerintahan bahwa pemerintah Belanda di dalam memberikan hak-hak otonomi daerah sangat menyesuaikan kepada situasi daerah dimana pemerintah tetap menyerahkan pengaturannya dan pelaksanaannya kepada penguasa tradisional. Walaupun hal ini hampir sama halnya dengan di Jawa pada abad ke-19, tetapi untuk memperoleh imbas terhadap pengaruh-pengaruh pergerakan di Jawa menjadi lebih tertutup dan ini berarti seolah-olah pemerintahan di Bali boleh dikatakan terasa berdiri sendiri.

Bagaimana kemajuan-kemajuan yang telah diperoleh di Jawa oleh golongan cendekiawan atau oleh golongan intelek kita, pada masyarakat di Bali baru pada tingkat angan-angan saja. Walaupun secara kenyataannya seolah-olah pergerakan di Bali tidak langsung ada interaksi dengan Sumpah Pemuda, rupanya situasi dan kondisi di masing-masing daerah memang tidak sama, walaupun demikian di Bali hidupnya pergerakan sesuai dengan alam lingkungan dan semangat jamannya sendiri-sendiri waktu itu.

Tetapi pengaruh-pengaruh tidak langsung dari pergerakan di Jawa lewat surat-surat kabar dan majalah toh dapat pula memberikan angin bagi pertumbuhan pergerakan di Bali sampai timbulnya organisasi-organisasi pergerakan yang mengarah kepada timbulnya nasionalisme.

Sebagai alasan terakhir kita tidak dapat ungkiri bahwa semangat cinta tanah air yang ditanam oleh pemerintah Jepang besar pula andilnya dalam memupuk semangat perjuangan ke arah cita-cita Indonesia Merdeka.

DAFTAR BIBLIOGRAFI

MANUSKRIP

Brahmokta Widi Sastra. Koleksi Gedung Kirtya, Singaraja *Bwana Winasa.* Koleksi Gedung Kirtya, Singaraja.
Paswara Akutus Negara. Koleksi Gedung Kirtya, Singaraja.

DOKUMEN

Corn, L.J.J. *Memorie van overgave van den Risident van Bali en Lombok.* Augustus, 1929.
Grader, C.J : *Nota van toelichtingen betreffende het in te steller zelfbesturend Landschap Buleleng.* (tanpa tahun).

MAJALAH

Agung, Anak Agung Gde Putra : "Masalah perdagangan budak Bali", Abad 17 – 19. *Basis.* Nopember , 1974. pp. 38 – 48.
---------- : "Lahirnya idee-idee pembaharuan dalam organisasi sosial di Bali". *Basis.* (Maret, 1972, pp. 183-18.
Bali Adnyana. Majalah bulanan. tahun 1924 – 1929.
Bawa Negara. Majalah Bulanan. April – Mei, tahun 1932.
Beets, K. Th : "De Karangasem read." *Kol. Tijdschr.* XIII, 1924,
Haga, B.J. "Balische Bestuursprobleem en Karangasemraad." *Kol. Tijdschr.* XIII, 1924.
Lekkerkerker, C : "Het voorspel der vestiging van den Nederland dsche macht op Bali en Lombok" *B.K.I.* 79, 1923.
Leifrinck, F.A. "Slavernij op Lombok" *T.B.G.* 9XIII, blz 508, 198.
Kartodirdjo, Sartono : "Struktur sosial dari masyarakat tradisional dan kolonial". *Lembaran Sedjarah.* no. 4. 1969.
Korn, V.E : "Balische Decentralisatie". *Koloniale Studien.* No. 2,10 de Jaargang, April, 1926.
Suryakanta. Majalah bulanan. Singaraja, 1925 – 1927.

BUKU

Anandakusuma : *Pergolakan Hindu Dharma.* Denpasar, Pustaka Balimas 1966.

Arsip Nasional : *Surat-surat Perdjandjian Antara Keradjaan Keradjaan Bali/Lombok dengan Pemerintah Belanda. 1841 – 1938* Djakarta, Arsip Nasional, 1964.

Bagus, I Gusti Ngurah, *Pertentangan Kasta Dalam Bentuk Baru Pada Masyarakat Bali. Denpasar. Univ. Udayana.* 1969.

Fisscher, H : 9 *Met de Tropen naar Bali; Berichten unit Nederland Oost Indie voor de leden van den Sint Claverband* 1907.

Flierhaar H. Ter : *De Aanpassing van het Inlandsch Onderwijs op Bali aan de eigen sfeer.* Batavia, 1931.

Geertz, Clifford : *Pejaja & Raja.* Djakarta, Indonesia Raya, 1973.

Kahin, G.M.T. : *Nationalism and Revolution in Indonesia.* New York : Cornel Unniversity Press, 1949.

Korn, V.E : Het Adatrecht van Bali. 's-Gravenhage, C. Naeff, 1932.

Liefrinck, F.A : *Nog eenige verordeningen en overenkomsten van Balische vorsten.* 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1921.

———— : *Bali en Lombok.* Amsterdam : J.H. de Bussy, 1927.

Nielsen, A.K. : *Leven en avonturen van een oostinjevaarder op Bali.* Amsterdam, 1928.

Parson, Talcott : *The Social System.* New York, The Free Press, 1964.

Pendit, Nyoman S. *Bali Berdjuang.* Denpasar, Yayasan Pedjuang Daerah Bali, 1954.

Raka, I Gusti Gde : *Monografi Pulau Bali.* Djakarta, 1955.

Tantri, K'Tut: *Revolusi di Nusa Damai.* Alih bahasa Abdul ber Salim. Djakarta, Gunug Agung, 1964.

Utrecht, E. *Sedjarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok.* Sumur Bandung, 1962.

Vollenhoven, C. van : *Het Adatrecht van Nederlandch Indie* Leiden, 1933.

Lampiran : I. a.

STATUTEN
PERHIMPOENAN SATYA SAMOEDAJA BAOE DANDA BALI LOMBOK

Art. 1. 1. Perhimpoenan ini bernama, SATYA SAMOEDAYA BAOE DANDA BALI LOMBOK (S.S.B.B.L.) terdiri pada 1 Januari 1925 boeat lamanja 29 tahoen dan terdoedoek di KARANG ASEM.

A.rt. 2. Kasad permimpoenan ini
a. Menjimpan wang
b. Mendjalankan (Mengoesahakan) wang
c. Membikin fonds (taboengan persediaan)

Art. 3. 1. Perhimpoenan terdiri dari pada :
a. Pegawe Negeri
b. Orang lainnya jang ditimbang patoet dan boleh, olih Bestuur Perhimpoenan.

2. Oentoek masoek mendjadi Lid Perkoempoelan, haroes memberi taoe dengan soerat atau bitjara sendiri pada Bestuur Perhimpoenan.

Art. 4. Perhimpoenan hendak mentjapai maksoednya itoe dengan djalan :

a. Menaboeng wang sekoerang-koerangnja f2.50 (satoe ringgit) tiap boelan.

b. Mengoesahakan wang taboengan itoe sebagai pokok (bedrijfskapitaal) supaya mendapat hasil peratoeran oemoem.

c. Membagi hasil bersih dari wang tadi atas 2 bahagian jang sama rata, sesoedahnja tjoekoep 5 tahoen.

Bahagian jang pertama oentoek lid jang menaboeng wang itoe.

Bahagian jang ke doea digoenakan oentoek menjokong anak lid atau bukan anak lid, jang telah tamat peladjarannja (berdiploma) dan disertai keterangan jang tjoekoep dari goeroenja oentoek mentjapai pengadjaran jang lebih tinggi.

Art. 5. Anggota (Bestuur) Perhimpoenan ini terdiri dari pada :

a. `President, Secretaris dan Commissaris oentoek pekerdjaan oemoem.

b. Directeur dan Administrateur oentoek pekerdjaan harian.

Art. 6. Masing-masing lid mempoenjai hak soeara menoeroet banjak taboengannja jang dimasoekkan pada pertama kalinja (tiap-tiap satoe ringgit mempoenjai satoe soeara, hingga sebanjak banjaknja 8 soeara).

Art. 7. 1. Lid bolih menerima kembali antero simpenannja dan antero hasilnja jang bersih, walaoepoen beloem tjoekoep waktoe 5 tahoen, apabila ia :

a. meninggal doenia

b. berhenti dari djabatannja.

c. berpindah keloear karesidenan Bali dan Lombok.

2. Kalo lid keloear dari Perhimpoenan dengan tiada menoeroet hal sebagi sub a, b dan c terseboet di atas, hanja dapat antero simpenannja dan setengah dari pada hasil jang bersih, tetapi dengan tempo satoe tahoen terhitoeng moelai dari dapat ketetapan permintaaannja berhenti; dan moelai dari hari itoe simpenannja terhitoeng tiada berhasil lagi bagai dia.

art. 8. 1. Anak jang soedah tamat beladjar dengan sokongan ini perhimpoenan, serta soedah mendapat pekerdjaan dengan gadji jang tetap, haroes;

a. mengembalikan wang biaja beladjarnja pada perhimpoenan dengan menjitjil pada tiap tiap boelan berangsoer angsoer hingga loenas menoeroet kekoeatannja dengan pertimbangan, Bestuur Perhimpoenan.

b. bekerdja oentoek keperloean oemoem (kemadjuan negeri Bali dan Lombok) dalam tempo sekoerang koeranja 5 tahoen Sesoedah itoe boleh ia bekerdja menoeroet kehendaknja sendiri, tetapi kalo penjitjilannja soedah loenas.

2. Kalo ia meninggal (mati) sebeloem loenas mengembalikan bijajanja, maka perhimpoenan tiada akan

menoentoet bijaja itoe pada familie dan warisnja.

Art. 9. 1. Apa jang tiada termoeat dalam Statuten ini teratoer dalam Huish. Regl.

2. Perobahan dalam Statuten ini hanja bisa berlakoe dengan 2/3 soeara antero.

Art. 10. 1. Perhimpoenan ini hanja bisa dipetjahkan dengan kehendak dan setoedjoenja sekoerang koerangnja 2/3 dari soeara lid antero.

2. Kekajaan perhimpoenan jang tinggal akan dibagi atas lid-lidnja menoeroet perbandingan taboengannja.

Lampiran : I. b.

ALGEMEENE HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERHIMPOENAN SATYA SAMOEDAJA BAOE DANDA BALI LOMBOK

Art. 1. Permintaan mendjadi lid perkoempoelan, kepada Bestuur afdeeling di tempat tinggalnja; apabila permoehoenannja dikaboelkan, maka Bestuur haroes memberikan soerat keterangan penerimaan lid, jang haroes ditoendjuknan pada Administrateur, dengan membawa taboengannja, di mana ia laloe mendapat quitantie dari Administrateur. Sesoedahnja Bestuur Afdeeling haroes memberitahoekan hal itoe pada President.

Art. 2. Djikalo lid pindah haroes memberi taoe pada Bestuur afdeelingnja dan pada Bestuur afdeeling di mana ia akan tinggal.

Art. 3. Masing-masing lid haroes menaboeng wang sekoerang-koerangnja f. 2.50 (satoe ringgit) tiap-tiap boelan dan bolih sebanjaknja; asal berlipat ganda boelat. Oempamanja f. 5, f 7. 50, f. 10. enz. Oentoek mempoenjai hak soeara, teritoeng dari penaboengnja jang dimasoekkan pertama kali. Diperkenankan menaboeng lebih dari pembajaran jang pertama kali, tetapi menoeroet peritoengan ganda boelat sebagai terseboet di atas.

Art. 4. Lid jang tidak menepati pembajaran sebanjak taboengan jang dimasoekkannja pertama kali, hingga berganti boelan, maka ia haroes didenda f0.25 tiap-tiap f2.50 pada pertama dan kedoea kalinja dan f0.50 tiap tiap f2.50 pada ketiga kalinja.

art. 5. Haroes dikeloearkan dari lid apabila tidak dibajar loenas sama sekali pada itoe waktoe pengabisan denda (Statuten fatsal 7 ajat 2).

Art. 6. Wang taboengan itoe dioesahakan sebagai pokok dengan djalan bagaimana djoega dengan tidak melanggar peratoeran oemoem, asal dapat memperbanjakkan wang itoe ketjuali diboengakan. Sebeloem tjoekoep tempo 5 tahoen pokok dan hasil peroesahaan itoe tidak bolih diba-

hagi dan dipergunakan. Sesoedah tjoekoep 5 tahoen baharoelah hasil dan pokok bolih dibahagi seteroesnja saban tahoen. Lid boleh minta kembali wang taboengan sebagian atawa semoea dan separo hasilnja jang bersih, apabila soedah tjoekoep tempo 5 tahoen di dalam tepo selaat laatnja 15 hari terhitoeng dari hari ketetapan terkaboel permintaannja.

Art. 7. Hasil bersih dari wang simpenan haroes dibahagi doea sama rata.
Sebahagian oentoek lid jang menjimpan dia dan sebahagian lagi oentoek didermakan akan bijaja pengadjaran anak-anak jang akan melandjoetkan peladjaran lebih tinggi. Bahagian bijaja derma itoe, 4/5 bahagian oentoek anak lid 1/5 oentoek anak anak bukan lid.

Art. 8. Apabila seorang lid mempunjai anak lebih dari seorang dan jang seorang telah menerima derma tjoekoep dari perhimpoenan, maka anaknja jang kedoea haroes mendapat derma 2/3 dan jang ketiga hanja 1/3 bahagian dari mistinja seteroesnja; tetapi djikalo tidak ada anak lid lain jang wadjib ditolong pawa waktoe itoe maka anak kedoea atao ketiga dan seteroesnja terseboet tadi haroes mendapat derma tjoekoep.

Art. 9. Akan moehoen derma bijaja sekolah haroeslah enam boelan lebih dahoeloe memasoekkan permoehoenan kepada Bestuur afdeelingna, jang mana diteroeskan oleh Bestuur Afdeeling selekas lekasnja pada President.
Djoemlah pemberian derma ditetapkan olih President, terdapat dari soeara Algemeene Ledenvergadering antero terambil soeara jang terbanjak.

Art. 10. Dalam kas masing masing Afdeeling haroes senantiasa ada wang 1/3 dari adanja wang simpenan.

Art. 11. President menerima segala keterangan dan pertimbangan dari Bestuur Afdeeling dan melakoekan bagaimana mestinja. Segala kepoetoesan, President haroes memberi taoekan pada Bestuur Afdeeling, djoega ia haroes menanggoeng keselamatannja perkeoempoelan.
President koeasa menoendjoekkan salah seorang lid bestuur oentoek mewakili pekerdjaan Directeur apabila beralangan.

Art. 12. Secretaris perhimpoenan haroes dekat kediamannja pada President. Bestuur Afdeeling terdiri dari Administrateur, Secretaris, Penning meester dan leden.
Bestuur Afdeeling bolih membikin leden vergadering kalo perloe, tetapi misti memberitahoekan pada President apa maksoednja vergadering dan bagaimana kepoetoesannja.

Art. 13. Administratoer mendapat gandjaran saban tahoen 10% dari hasil bersih jang diterimanja, sebanjak banjaknja f. 720. saben tahoen.
Directeur mendapat gandjaran saben tahoen 5% dari hasil bersih sesoedah dipotong gandjaran oentoek Administrateur dalam pegangannja, sebanjak banjaknja f 1500. saben tahoen. President mendapat gandjaran saben tahoen 5% dari hasil bersih antero sesoedah dipotong gandjaran oentoek Directoer sebanjak banjaknja f 2400. saben tahoen.

Art. 14. Saben tahoen sekali dalem bolan Janoeari di adakan Algemeene Bestuur Vergadering di Kloengkoeng (Kartagosa) atau ditempat kedoedoekan President; harinja vergadering ditetapkan olih President.

Art. 15. Segala ongkost perdjalanan bestuur oentoek Alg. Best. Verg. dipikoel olih perkoempoelan (hasil oesaha).
Sebeloem perkoempoelan koeat mengongkosi perdjalanannja Directoer Commissie, maka jang moelja Stedehoeuder soeka dengan hati soetji dan djernih memberi pindjam autonya oentoek melakoekan pekerdjaan itoe.

Art. 16. Apa jang tiada termoeat dalam Huishoudelijk Reglement ini, akan diatoer dalam Algemeene Ledenvergadering.

Lampiran : II. a.

STATUTEN SOERYA KANTA. [1]

Art. 1. Perkoempoelan ini bernama Soerya Kanta, berdiri di Singaradja boeat lamanja 29 tahoen moelai 1 Nopember 1925.

Art. 2. Azas perkoempoelan ini :
a. mengoetamakan boedi,
b. memperbaiki economie,
c. memperbaiki dan melindungi nasib kaum Djaba,
d. mengoebah adat jang berlawanan dengan kemadjoean djaman.

Art. 3. Perkoempoelan mentjapai maksoed maksoed terseboet, dengan :
a. menjiarkan isi kitab-kitab (lontar-lontar) dengan menerbitkan soerat kabar.
b. mengadakan pembatjaan (lezingen) dan
c. lain-lain oesaha jang tiada melanggar wet negeri.

Art. 4. Perkoempoelan ini tiada sekali kali mengandoeng politiek.

Art. 5. Jang boleh mendjadi lid perkoempoelan ini bangsa Bali kaoem Djaba, jang beroemoer 18 tahoen ke atas dan dapat membatja dan menulis serta jang baik kelakoeannja.

Art. 6. Barang siapa jang berkehendak mendjadi lid, hendaklah menerangkan maksoednja itoe kepada Secretaris Hoofdbestuur.

Art. 7. Seorang lid hilang haknja menjadi lid, sebab :
a. permintaannja sendiri.
b. dilepas (royeering).

Art. 8. Jang koeasa mengadakan hoekoem (wet) perkoempoelan ini Algemeene-Vergadering dari lid-lid. Adapoen jang melakoekan kekoeasaan jaitoe Hoofdbestuur.

Art. 9. Belandja perkoempoelan ini dari pada toedjangan lid-lis dan derma.

Art. 10. Barang apa dalam Statuten ini perloe diterangkan, keterangannja itoe dibitjarakan dalam Huishoudelijk-Reglement.

Art. 11. Statuten dan Huishoudelijk Reglement tiada boleh diobah, melainkan dengan mufakatnja soeara lid jang terbanjak, dalam Algemeene-Vergadering.

Hoofdbestuur Soerya Kanta :

Menoeroet pilihan oprichtingsvergadering 1 November 1925 :

1. President	:	Ketoet Sandi
2. Vice-President	:	Ketoet Nasa
3. le Secretaris	:	Nengah Metra
4. 2e Secretaris	:	Ketoet Kaler
5. Penningmeester	:	Ketoet Poerna
6. Commissarissen	:	1. Ketoet Moedasara
		2. Wajan Roema.

---

1). Madjalah Soerya Kanta No. 2, Th. I, November 1925 hal. 16.

Lampiran : II. b.

HUISHOUDELIJK-REGLEMENT "SOERYA KANTA" [1]

Algemeene Bepaling :

Art. 1. Perhimpoenan "S.K." tiada sekali kali akan toeroet :

a. membicarakan keadaan pemerintah (politiek),
b. tjampoer atau memberi pertimbangan kepada perkoempoelan perkoempoelan politiek jang soedah ada atau jang akan didirikan.

Leden :

Art. 2. Perkoempoelan ini terdiri atas lid-lid biasa, donateurs, dan lid-lid kehormatan (eere leden).

Art. 3. Segala leden perhimpoenan haroes memperhatikan dan menjalani barang apa jang terseboet dalam Statuten dan Huishoudelijk Reglement.

Art. 4. Barang siap maoe mendjadi lid, haroeslah menerangkan maksoednja itoe dengan soerat kepada Secretaris-Afdeeling di mana ia maoe toeroet, dengan menjebutkan oemoernja, djabatannja dan addresnja.

Art. 5. Seorang berenti mendjadi lid, sebab :

a. mati,
b. permintaan sendiri,
c. dilepas oleh Hoofd-bestuur, sebab koerang baik kelakoeannja, memboesoekkan nama perhimpoenan dan melanggar Art. 3.

Lid-biasa :

Art. 6. Jang boleh mendjadi lid biasa jaitoe orang Bali kaoem Djaba, jang beroemoer 18 tahoen ke atas, jang dapat membatja dan menulis.

Art. 7. Dia haroes berdjandji akan menjokong perkoempoelan dengan sekoet-koeatnja, atau dengan tenaga, baik pun de-

---

1) *Soerya Kanta*, (no. 8, Th. II, Agustus 1926), pp. 114-117.

ngan pikiran, dan djika perloe joega dengan wang.

Art. 8. Lid lid biasa poenja hak stemmen dan memilih atau dipilih. Dia membajar contributie tiap-tiap boelan banjaknja 40 sen (ditetapkan oleh Algemeene-Vergadering).

Donateurs dan eere-leden:

Art. 9. Jang boleh mendjadi donateur jaitoe segala bangsa jang sanggoep menjokong perkoempoelan dengan oeang, sedikit-dikitnja membajar sekali 25 roepiah, atau tiap-tiap boelan F. 1,–

Art. 10. Barang siapa jang njata djasanja kepada perkoempoelan ini Algemeene Vergadering ada hak mengangkat dia djadi eerelid (lid kehormatan).

Art. 11. Donateur dan Ere-leden di dalam vergadering hanja boleh mengeloearkan boeah pikirannja sebagai pertimbangan sahadja (advies).

Hoofd-Bestuur :

Art. 12. Perhimpoenan ini dipimpin oleh satoe Hoofdbestuur, jang terdjadi dari sedikitnja 7 orang jaitoe : 1. President, 1 Vece-president, 1 Eerste Secretaris, 1 Tweede Secretaris, 1 Penningmeester dan 2 Commissarissen.

Art. 13. Hoof-bestuur dipilih oleh Alg. Verg. oentoek setahoen lamanja. Lid-lid Hoofdbestuur lama, jang meletakkan pekerdjaaannja itoe, boleh dipilih poela. (lihat Art. 23).

Art. 14. Sebelumnya Alg. Verg. diadakan, maka ada salah satoe lid bestuur jang berenti disebabkan sesoeatoe hal, maka Hoofd-Bestuur boleh menggantikannja.
Hal ini nanti ditetapkan oleh Alg. Verg. jang akan datang (lihat Art. 23 sampai 27).

Art. 15. Hoofd-Bestuur haroes mendjalankan hoekoem-hoekoem (wet) dan keputusan-keputusan Alg. Verg. dan djoega mendjadi wakilnja perkoempoelan, baik di dalam ataupoen diloear Pengadilan.

President :

Art. 16. Dalam Hoofd-Bestuur Presidentlah jang berkoeasa. Segala soerat-soerat ideran, pemberian tahoe, dan soerat-soerat lainnja, haroes dikirim dengan setahoenja dia. Soerat-soerat jang perloe, haroeslah ditanda tangani oleh President dan Secretaris.
Dia haroes memboeka mendjalankan dan menoetoep Vergadering. President haroes menanda tangani notoelen, jang disetoedjoei oleh vergadering, bersama-sama dengan Secretaris.

Vice-President :

Art. 17. Soerat-soerat jang diterima dari Secretaris haroes di boeboehi pertimbangannja. Sesoedahnja haroes dikirimkan kepada President. Dia haroes membantoe President, dan waktoe President tidak ada, dialah jang mengganti.

Eerste Secretaris :

Art. 18. Eerste Secretaris memegang Archief dan melakoekan semoea pekerdjaan toelis. Dia haroes memboeka soerat-soerat jang diterima, dan haroes memberikan soerat itoe kepada Vice President, sesoedahnja diboeboehi perimbangannja. Dia haroes memboeat verslag (notulen) dari vergadering-vergadering. Tiap-tiap tahoen dia haroes memboeat Jaarverslag.

Tweede Secretaris :

Art. 19. Tweede Secretaris haroes memegang inventaris dan ledenlijst dan menolongi Erste secretaris dalam pekerdjaannja.

Prenningmeester :

Art. 20. Penningmeester haroes memegang keloear dan masoeknja wang (kasboek) sebagai : menerima contributie, derma dan lain-lainnja dan membelandjakan perkoempoelan. Tiap-tiap Alg. Verg. dia haroes memboeat verslag oeang dari tahoen jang laloe.

Commissarissen :

Art. 21. Kedoea commissarissen itoe selaloe menjelidiki keadaan perkoempoelan dan mengoeroes perkara-perkara jang tidak sjah. Senantiasa ia boleh periksa kasboek, iventaris dan archief.

Dagelijkch Bestuur :

Art. 22. Dagelijkch Bestuur itoe terjadi oleh President, Eerste Seccretaris, dan Penningmeester.

Vergaderingen :

Art. 23. Tiap-tiap tahoen diadakan openbare-Algemeene-vergadering (congres) jaitoe pada waktoe liboeran poeasa.
Alg. Verg. loear biasa boleh diadakan kalau Hoofd Bestuur memandang perloe dan patoet.

Art. 24. Seminggoe sebeloemnja Alg. Verg. diadakan agenda haroes telah tersiar. Agenda itoe haroes ditetapkan pada Bestuur-Vergadering. Sesoeatoe hal jang tidak ada dalam agenda, tidak boleh dibitjarakan, ketjoeali dengan idjinnja Algemeene-vergadering.

Art. 25. Hanja Algemeene-Vergadering ada hak memboeat wet–wet (hoekoem) boeat perkoempoelan.

Art. 26. Bestuur-Vergadering boleh diadakan pada sebarang waktoe, apabila perloe. 7 hari sebeloemnja vergadering lid-lid bestuur haroes soedah diperingatkan oleh secretaris.

Stemmen :

Art. 27. Akan mengambil kepoetoesan dalam vergadering, haroeslah menoeroet stem jang terbanjak (lebih dari 1/2). Stem-stem blanco ditoeroetkan kepada stem jang terbanjak, Voorstel akan meroebah Statuten haroeslah ditoendjang dengan sedikitnja 3/4 dari pada soeara Alg. Vergadering. Kalau stemmen itoe stakking (jang setoedjoe sama bajaknja dengan jang anti haroes distem lagi.

Kalau stakking 2 kali, haroeslah dipoetoeskan :

a. Kalau memilih orang dengan undi (lot).
b. Kalau memilih barang dengan President (Voorzitter).

Art. 28. Stemmen itoe, apabila hendak memilih orang haroeslah memakai soerat. Djika barang dengan soeara sadja.

Art. 29. Oeang perkoempoelan itoe dapat dari :

A. contributie leden.
b. derma-derma dan toendjangan dari orang-orang (donateurs) atau perkoempoelan-perkoempoelan lainnja.
c. pendapatan dari lain-lainnja jang tiada bertentangan dengan wet negeri (sebagai : pasar derma, voetbal dan lain-lainnja).

Art. 30. Segala hasil-hasil jang diperoleh dipergunakan oentoek perkoempoelan.

Orgaan dan Redactienja :

Art. 31. Perkoempoelan ini menerbitkan satoe orgaan jang djoega "Soerya Kanta" namanja jang didjaga dan diamati-amati oleh satoe commissie van Redactie, jang diangkat dan dilepas oleh Hoofd Bestuur. Jang boleh menjadi lid Redactie, jaitoe hanja seorang lid biasa.

Art. 32. Orgaan itoe terbit pada tiap-tiap boelan. Karangan-karangan boleh senantiasa dikirimkan kepada redactie.

Art. 33. Karangan-karangan jang mengandoeng antjaman atau kritiek kepada perkoempoelan atau Bestuur haroeslah dikirimkan kepada Hoofd-Bestuur.

Art. 34. Lid-lid biasa, donateur dan eere leden mendapat orgaan graties (dengan pertjoema).

Art. 35. Administratienja orgaan itoe didjalankan oleh Hoofd-Bestuur sendiri.

Lezingen :

Art. 36. Tempo-tempo diadakan pembatjaan (lezingen) perkara economie, cultuur dan lain-lainnja di hadapan orang banjak.

Controle :

Art. 37. Tiap-tiap tahoen Alg. Vergadering mengadakan 5 orang oentoek memeriksa keadaan oeang kas perkoempoelan (verificatie).

Afdeelingen :

Art. 38. Djika pada satoe tempat ada sekoerang-sekoerangnja 10 leden dari perkoempoelan, maka disitoe bolehlah diadakan satoe afdeeling. Afdeeling itoe dipimpin oleh satoe Bestuur, jang terdiri dari pada sedikitnja 5 orang jaitoe: 1 Voorzitter, 1 Secretaris, 1 Penningmeester dan 1 Commissaris.

Art. 39. Afdeeling itoe boleh mengatoer djalannja dengan satoe Reglement sendiri asal djangan bertentangan dengan Algemeene Huishoudelijk Reglement.
Huishoudelijk Reglementnja Afdeeling boleh dipakai, sesoedahnja disetoedjoei oleh Hoofd Bestuur.

Art. 41. Afdeeling Bestuur tiada boleh melebihi atau mengoerangi memoengoet contributie dari pada jang telah ditentoekan oleh Alg. Vergadering (congres).
75% dari pada pendapatan contributie haroes dikirimkan kepada Hoofd Bestuur (Algemeene-kas).

Art. 42. Satoe boelan sebeloemnja Alg. Vergadering (Congres) tiap-tiap afdeeling haroes mengirim satoe Jaar-verslag kepada Hoofd Bestuur, beserta voor stel-voorstel jang maoe akan dikemoekakan di dalam congres.

Art. 43. Tiap-tiap boelan Secretaris Afdeeling haroes berkirim soerat kepada Hoofd-Bestuur, menerangkan keadaan Afdeeling dan banjaknja leden (tambah atau koerangnja).

Slotbepaling :

Art. 44. Segala hal-hal jang tiada diatoer di dalam statuten dan Huishoudelijk Reglement ini dipoetoeskan oleh Hoofd-Bestuur.

Disjahkan dalam Openbare
Algemeene Vergadering "S.K."
pada tanggal 21 Maart 1926.

Lampiran ; III

JUMLAH PENDUDUK GOLONGAN TRIWANGSA DAN JABA DI BALI DAN LOMBOK

(Sensus Penduduk pada bulan Nopember 1920)

Dareah	Jumlah Golongan Hindu – Bali	Golongan Tri Wangsa				
		Brah-mana	Ksa-tria	Wesia	Total	Persentage
1. Buleleng	133.000	1.600	2.300	4.000	7.900	6
2. Jembrana	28.000	100	60	300	460	1,6
3. Karangasem	164.000	1.300	3.000	3.400	7.700	4,7
4. Gianyar	141.000	750	6.500	1.250	8.500	6
5. Badung	170.000	3.000	4.300	6.100	13.400	8
6. Tabanan	148.000	1.700	3.100	5.900	10.700	7,2
7. Klungkung termasuk Bangli	133.000	1.400	6.000	2.500	9.900	7,5
Pulai Bali	917.000	9.850	25.260	23.450	58.560	6,4
Pulau Lombok	29.000	2.300	250	3.700	6.250	21,5

Dikutip dari: C. Lokkerkerker, "De kastenmaatschappij" in Britisch Indie en op Bali"
Mensch en Maatschappij: Driemaandelijksch Tijdschrif. (P.Noordhoff & Groningen, overdruk 1 Juli 1926), NO.3, p. 4.

Lampiran: IV

KEADAAN SEKOLAH-SEKOLAH DI BALI
1 OKTOBER 1926 – 1 JUNI 1929

Onderafdeling	Aantal der scholen		Aantal der op						Toelichtingen
	1 Oct 1926	1 Juni 1929	1 Oct 1926			1 Juni 1929			
			aanwezige						
			Onder wijzers	Leerlingen j	Leerlingen m	Onder wijzeres	Leerlingen j	Leerlingen m	
Europeesche Lagere School									
Boeleleng	1	1	2	23	16	2	31	14	
Holl. Inlandsche School.									
Boeleleng	1	1	7	127	15	7	174	25	
West-Lombok	1	1	6	133	27	8	161	36	
Badoeng	1	1	7	201	24	9	158	36	
Kloengkoeng	—	1	—	—	—	3	100	9	goepond op 1 Juli 1928.
2e Klasse Schoolen.									
Boeleleng	8	8	28	758	28	31	1265	109	
Jembrana	2	2	9	243	15	9	337	37	
Oost-Lombok	3	3	11	398	19	14	579	59	
West Lombok	5	5	17	565	28	17	714	53	
Midden "	1	1	4	138	18	4	191	13	
Badoeng	3	5	12	355	29	17	727	122	1. vervolgschool to Blahkioeh opgericht 14 Mei 1928 1 2e kl.school te Denpasar opgerichtop 13 April 1928.

Tabanan	5	6	20	577	40	21	839	106	1 2e kl. school to Tegallinggah opgericht 22 April 1927.
Gianyar	2	3	9	326	16	11	402	44	1 vervolgschool te Oeboed opgericht op 4 April 1928.
Kloengkoeng	3	3	13	419	20	14	526	92	
Karangasem	2	2	7	213	11	7	299	27	
	Volks schoolen								
Boeleleng	15	16	24	1029	41	33	1479	67	1 volksschool te Pandji opgericht op 18 Januari 1928. Een nieuwe volkschool werd 11 Juli 1929 geopend te Sidatapa (Bandjar) met 37 jongens leerlingen
Djembrana	—	—	—	—	—	6	279	9	1 volkschool te Jeh Embang opgericht op 15 Maart 1927. 1. Idem te Poeloekan opgericht op 9 Juli 1927.

									I. idem te Baloek opgericht op 1 Augustus 1928.
Oost-Lombok	13	24	17	727	21	32	1579	86	1. id.te Montongbetok opgericht op 12 Mei 1928. I. id.te Andjani opgericht op 7 Juni 1928. 1.id.te Dasanlekong op 2 Augustus 1928. 1.id. te Kalidjaga op 30 Mei 1928. 1.id.te Mamben op 12 September 1928. 1.id.te Pringgasela op 25 Augustus 1928. 1.id.te Kesik op 1 Nopember 1928. 1.id.te Roemboek op 21 Juni 1927. 1.id.te Lepak op 20 Juni 1927. 1.id.te Apisik op 17 Mei 1928. 1.id.te Korleko op 25 Augustus 1928.

West Lombok	6	15	7	359	3	18	820	4	1.id.te Prampoean opgericht op 28 Mei 1927. 1.id.te Lingsar id.op 2 April 1928. 1.id.te Dasangeria id. op 8 Mei 1928. 1.id.te Godang id. op 25 Mei 1927. 1.id.te Koeripan id. op 30 Juni 1927. 1.id.te Roemak id. op 30 Juli 1928. 1.id.te Goenoeng Malang. id. op 16 Augustus 1928. 1.id.te Pagesangan id. op 7 December 1928.
Midden Lombok	6	10	8	341	25	12	615	38	1 id.te Darek id. op 3 Juli 1928. 1.id.te Penoedjak id. op. 28 Juli 1928. 1 id.te Darmadji id.op 30 Oktober 1928. 1 id.te Sintoeng id. op 5 November 1928.

Badoeng	20	22	36	1365	74	42	1854	252	2 volkscholen op gericht resp. te Plaga en Serangan op 1 en October 1928.
Tabanan	20	22	38	1732	70	47	1995	235	2 id.te Pedjabat en Batoeriti id. resp. op 30 Januari 1928. en 1 Juni 1928.
Gianjar	9	12	14	718	26	24	941	132	3 volkscholen te Tampaksiring Keraen Mas opgericht resp. op 26 Juli 1928, 3 Juli 1928 en 1 Augustus 1928.
Kloengkoeng	6	23	11	522	24	39	1743	195	1 Volkschool te Djoengoetbatoe opgericht 1 Nov. 1926. 1 id. te Kintamani id. op 1 Mei 1927. 1 id.te Aanid. op 1 Juli 1927 4 volkscholen te Sowana, Pasinggahan, Gulgel en Tjatoer opge-

									richt op 5 Maart 1928. 1 id.te Batoe-Madeg op 7 Maart 1928. 1 id.te Tanglad in op 22 Maart 1928. id.te Penindjoan id op 23 April 1928 1 id. te Kamasan id. op 18 Februari 1929. 1 Volkschool te Nyalian opgericht op 1 April 1929. 3 id.te Bangli Koeboe en Kajoebihi id. op 4 April 1929. 1 id.te Apoan id. op 5 April 1929. 1 id.te Selat id.op 7 Mei 1929.
Karangasem	10	11	13	743	76	17	1019	64	1 id.te Karangasem id. op 1 Mei 1929.

Dikutip dari: L.J.J. Caron, *Memorie van overgave van den Resident van Bali en Lombok.* (Augustus 1929), pp.94–97.

Lampiran : V.

STATUTEN
PERHIMPOENAN TJATOERWANGSA DERJA GAMA HINDOE BALI

Hal nama dan tempat.

Fatsal. I. Perhimpoenan ini bernama Tjatoer Wangsa Derja Gama Hindoe Bali dan bertempat di Kloengkoeng.

Hal lama pendirian perhimpoenan.

Fatsal. II. Perhimponen Tjwadega Hindoe Bali didirikan oentoek sementara waktoe 29 tahoen dihitoeng dari pada hari berdirinja 2 Mei 1926.

Hal Maksoed.

Fatsal. III. Perhimpoenan Tjwadega Hindoe Bali bermaksoed:

1. menegoehkan agama Hindoe Bali.
2. menegoehkan hal persaudaraan.
3. menetapkan kemadjoean negeri agar ladju djalannja dengan djalan yang patoet, jang tidak bertentangan dengan adat istiadat.
4. memelihara kepertjajaan diantara ke 4 soekoe bangsa. Hal. 79. (Tjatoer Wangsa) dengan mengingat Dharma soepaja moeka itoe merasa seperti mendjadi sebadan dan sehati dengan bersama sama menanggoeng hal ihoewal di Bali dan Lombok.
5. Dengan tertib memperbaiki lakoenja adat-istiadat jang berlawanan dengan kemaoean zaman.

Hal daja.

Fatsal. IV. Akan mentjapai maksoed terseboet, maka perhimpoenan akan:

a. mendirikan sekolah sekolah baroe dan memperbaiki sekolah-sekolah jang telah terdiri dengan dasar tjara Bali.

b. menjimpoelkan dan mengeloearkan (isi) lontar-

*) Surya Kanta, Mei 1926 Th. II no. 5 hal. 78.80.

lontar Bali dengan minta soerat pemberita.

c. lain2 djalan jang menjalahi peratoeran oemoem.

Hal Anggota-anggota (Lid).

Fatsal. V.

1. Jang boleh mendjadi anggota jaitoe keempat soekoe bangsa Bali (Tjatoer Wangsa) jang memeloek Agama Hindoe jang beroemoer sekoerang2nja 18 tahoen.
2. Akan mendjadi anggota haroeslah memberi tahoe, baik poen dengan soerat maoepoen dengan moeloet (mondeling) kepada Secretaris district atau onderafdeeling tempat kediaman orang jang hendak mendjadi anggota itoe.
3. Apabila ada permintaan, ditolak oleh district atau afdeelingsbestur, haroes permintaan itoe disertai dengan soerat keterangan bestuur terseboet kepada hoofdbestuur, jang menimbang dan mengambil poetoesan atas permintaan itoe.

Hal Contributie.

Fatsal. VI.

1. Anggota-anggota haroes membagi contributie menoeroet kekoeatannja sendiri sendiri, tetapi tiada boleh mengoerangi batas, jang soedah ditentoekan dalam Alg. Huishoudelijk Reglement.
2. Tahoen Contributie ini dihitoeng moelai pada 1 hari boelan Januari sampai 31 hari boelan December.
3. Diberhentikan mendjadi anggota:
   a. Atas permintaan anggota sendiri hendak berhenti, meminta berhenti itoe haroes kirim soerat kepada secretaris district, onderafdeeling atau hefdbestuur.
   b. menoeroet kepoetoesan hoofdbestuur dengan mendengar keterangan keterangan district atau ondoorafdeelingsbestuur.
4. Djikalau tiada bajar contributie.
5. Djikalau njata anggota itoe merugikan dari sebab

perkataannja atau soerat karangannja ataupun dari sebab njata melawan atasan dan haloean perkoempoelan.

6. Menoeroet kepoetoesan Algemeene Vergadering, teratas atau atas permintaan Hoofdbestuur.

Hal district dan onderafdeeling.

Fatsal. VII. Tempat melakoekan pekerdjaannja dibagi dalam beberapa bilangan, District dan onderafdeeling. Luasnja district dan onderafdeeling jang ditetapkan pemerintah.

Hal perkoempoelan oemoem (Alg.Verg.).

Fatsal. VIII. 1. Tiap2 tahoen diadakan satoe kali atau lebih pembitjaraan oemoem dari anggota-anggota Algemeene vergadering.

2. Alg.Verg. ini diangap sjah apabila lebih dari pada ½ dari pada banjaknja anggota jang berhadir.

3. Perkoempoelan oemoem ini dipimpin oleh Hoofdbestuur.

4. Hari dan tempat persidangan oemoem itoe ditetapkan oleh Hoofdbestuur.

Hal Bestuur.

Fatsal. IX Perhimpoenan Tjatoer Wangsa Derja Gama Hindoe Bali ini dipimpin oleh Hoofdbestuur banjaknja anggota Hoofdbestuur ini tiada boleh melebihi dari pada 15 orang.
Diantara 15 orang ini adalah:

1 Voorzitter
1 Onder Voorzitter
1 Secretaris
1 Penningmeester
11 Comissarissen

3. Hoofdbestuur itoe dipilih oleh Reglement vergadering.

4. Hoofdbestuur dipilih oentoek 1 tahoen lamanja tetapi selewatnja 1 tahoen itoe boleh dipilih lagi.

5. Apabila dalam hoofdbestur sendiri jang mengisi djabatan itoe sambil menoenggoe kaboelnja perhimpoenan oemoem.

Fatsal. X. 1. Hoofdbestuur berkoeasa memoetoes segala hal jang tiada terseboet dalam Statuten atau dalam Reglemeene Huishoudelijk Reglement.

2. Kepoetoesan ini tiada sjah, apabila vergadering Hoofdbestuur ini tiada dihadliri oleh lebih dari pada ½ anggota Hoofdbestuur.

3. Tegak soerat-soerat jang keloear dari perhimpoenan atas nama Hoofdbestuur perloe ditanda tangani oleh Voorzitter dengan Scretaris.

4. Diantara anggota Hoofdbestuur itoe ada jang mendjadi bestuur harian (Dagelijksch Bestuur) jaitoe terdiri dari Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, dan 2 orang Commissaris.

5. Dagelijksch Bestuur jang tjoekoep anggotanja berkoeasa menjoesoen segala hal diloear dan di dalam pengadilan.

6. Onder Voorzitter mengganti Voorzitter pada waktoe Voorzitter berhalangan.

Fatsal. XI. Onderafdeeling bestuur terdjadi oleh sebanjak-banjaknja 5 orang anggota jaitoe :

1. Voorzitter
1. Secretaris
1. Penningmeester
2 Commissaris.

Fatsal. XII. Districtbestuur terdjadi oleh sebanjak banjaknja 3 orang anggota jaitoe :

1. Voorzitter
1 Secretaris Penningmeester
1 Commissaris

Hal Oeang

Fatsal. XIII. 1. Penghidoepan perkoempoelan Tjawadega Hindoe Bali jaitoe dari Constitutie, Donatie dan lain-lain pendapatan.

2. Segala oeang ini dipegang oleh Penningmeester, jang tiap-tiap tahoen haroes memberi keterangan hal keloear masoeknja, oeang itoe kepada Alg. Vergadering.

Hal Peroebahan Statuten

Fatsal. XIV. 1. Djika hal hal jang terseboet dalam Statuten itoe ada jang akan dioebah maka peroebahan itoe boleh dilakoekan oleh persidangan oemoem, apabila dibenarkan oleh sedikit dikitnja dari anggota anggota jang berhadlir.

2. Akan meroebah Statuten itoe maka Voorstelen peroebahan itoe haroes 1 boelan sebeloemnja diadakan Alg. Vergadering soedah dikirim kepada anggota anggota.

Hal Memetjah perhimpoenan

Fatsal. XI. 1. Perhimpoenan Tjatoer Wangsa Derja Gama Hindoe Bali ini boleh dipetjah apabila sekoerangnja 2/3 dari sekalian anggota jang moefakat.

2. Soeara akan memetjah perhimpoenan ini tiada didengar dalam Alg. Vergadering, tetapi dengan soerat (Reerandum).
Djikalau soeara Reerandum itoe ada jang moefakat maka perhimpoenan itoe dipetjah dengan sjah.

3. Apabila perkoempoelan itoe dipetjah maka kekajaannja dibagi sama rata anggota anggota jang tinggal di belakang dengan mengingat fatsal 1665 Burgerlijk Wetboek.

Ditetapkan di dalam Algemeene
Vergadering di Kloengkoeng
pada 2 hari boelan Mei 1926.

Lampiran : VI.

STATUTEN
DARI "EKA LAKSANA"[1])

Art. 1. Adapoen perkoempoelan ini ialah perkoempoelan peladjar-peladjar dari Bali dan Lombok. Nama perkoempoelan ini "Eka Laksana".

Art. 2. Perkoempoelan ini didirikan pada tanggal 14 Juli 1935 di Denpasar.

Art. 3. Perkoempoelan ini tiada toeroet tjampoer dalam hal-hal politiek.

Art. 4. Toedjoean :

Toedjoean perkoempoelan ini misalnja :

A. Mempeladjari dan djikalau dapat memadjoekan cultuur dan kunst di Bali dan Lombok.

b. Mengoekoehkan tali persaudaraan lid-lidnja.

c. Bekerdja oentoek keperloean lid-lidnja.

Art. 5. Daja oepaja boeat mentjapai toedjoean jang terseboet dalam art. 4 :

a. Contributie.
b. Toedjoean dari loear beroepa oeang dan nasehat-nasehat dan sebagainja.
c. Menerbitkan madjalah (ini djika dapat).
d. Mengadakan Congres di salah satoe tempat dipoelau Bali atau Lombok.
e. Menjokong lid-lidnja dengan oeang.

Art. 6. Dari hal lid-lid :

Lid-lid perkoempoelan ini terdiri dari lid biasa, ereleden dan donateurs.

Jang boleh mendjadi lid biasa hanja orang-orang jang sedang beladjar atau jang soedah keloear dari sekolah-sekolah jang tersebut di bawah ini:

a. Mulo, Normaalschool, Verplegersopleiding, Ambachtsscholen, Cultuurscholen, Handelsscholen.
b. Segala sekolah pertengahan.

---

1). Dikutip dari: madjalah "Djatajoe" (No. 1, Februari 1936) pp. 6 P7

c. Sekolah tinggi.

Art. 7. Dari hal bestuur :
Bestuur ada doe roepa :
satoe Hoofdbestuur dan Afdeelingsbestuuren.

Art. 8. Soeatu tempat boleh mengadakan tjabang, djika pada tempat itoe sekoerang-koerangnja ada 5 lid.

Art. 9. Hal kewadjiban dan hak-hak Afd-Besturen dan Hoofdbestuur lihat H.R.

Art. 10. Hal-hal tentang memboebarkan perkoempoelan dan hal-hal tentang mengobah Statuten dan H.R. ditentoekan dalam Congres.

Art. 4. Hal contributie (Dari H.R.)
Lid-lid diharoeskan membajar contributie kepada H.B. menoeroet tarief di bawah ini:

Moerid-moerid				f. 0,12^5
Boekan moerid menoeroet belandja :				
di bawah	f. 25,–			f. 0,12^5
	f. 25,–	f.	50,–	f. 0,20
	f. 50,–	f.	100,–	f. 0,30
	f. 100,–	ke atas		f. 0,50
Oeang entree banjaknja				f. 0,50

Masing-masing tjabang diharoeskan menjetor wang oentoek H.B. paling laat pada tanggal 20 dari tiap-tiap boelan. Lid-lid tersiar, membajar vooruit contributie 3 boelan sekali (recu postwissel boleh dianggap sebagai kwitantienja).

Masing-masing afdeling boleh menetoekan contributienja sendiri.

STATUTEN ANGGARAN DASAR DARI "BALI DARMA LAKSANA"[1])

Art. 1.

Naam Zetel, Duur,

De vereeniging draagt den naam van "Bali Darma Laksana" en is gevestigd op de plaats, waar het Hoofd Bestuur (H.B.) zetelt.

Zij is opgericht den 26sten Juli 1900 zes en dertig en wordt aangegaan voor onbepaalden tidj.

Fats. 1

Nama, Kedoedoekan, Lamanja

Perkoempoelan ini bernama "Bali Darma Laksana" dan kedoedoekannja pada tempat tinggalnja Pengoeroes besar. (P.B.).

Perkoempoelan ini didirikan pada tanggal 26 Juli 1900 tiga poeloeh enam oentoek tempo jang tidak ditentoekan lamanja.

Art. 2.

Doel.

De vereeniging stelt zich ten doel :

I. Het vormen en in stand houden van een fonds ter financieele ondersteuning van daartoe in aanmerking komende :

a. Baliers, studeerende aan en dan wel buiten Ned-Indie gevestigde inrichtingen van middelbaar of hooger onderwijs.

Farts. 2.

Toedjoean.

Perhimpoenan ini bermaksoed :

I. Mendidirikan serta memelihara soeatoe taboengan goena memberi toendjangan wang kepada :

a. orang Bali, jang sedang beladjar pada sekolah menengah ataoe tinggi, baikpoen jang terdapat didalam, maoepoen diloear Hindia Belanda.

---

1) Dikutip dari : madjalah "Djatajoe" (No. 4, 25 November 1936), p. 96.

b. andere Baliers van goeden aanleg, die geacht worden nuttig te kunnen zijn voor de gemeenschap en wel in gevallen van zeer buitengewonen aard, zulks ter beoordeeling door het H.B.

II. het bevorderen van de ontwikkeling van de Balische cultuur in de meest uitgebreiden zin des woords

b. orang Bali lain jang tjoekoep kepandaiannja, jang dipandang akan besar faedahnja oentoek oemoem, semata-mata di dalam keadaàn jang loear biasa menoeroet pertimbangannja P.B.

II. beroesaha akan mempertinggi kemadjoean keboedajaan Bali, di dalam arti jang seloeas-loeasnja.

STATUTEN
Perkoempoelan "Poetri Bali Sadar" [1])

Art. 1. Adapoen perkoempoelan ini bernama "Poetri Bali Sadar'. (P.B.S.) didirikan pada tanggal 1 October 1936 dan bertempat di Denpasar (Badoeng).

Art. 2. Jang boleh mendjadi anggota jalah orang-orang perempoean Bali jang dapat membatja dan menoelis, jaitoe atas persetoedjoean pengoeroes perkoempoelan.

Art. 3. Perkoempoelan ini bertoedjoean :

a. mengoesahakan soepaja keroekoenan poetri-poetri Bali seoemoemnja bertambah koeat.

b. menoendjoekkan hati tolong menolong, kalooe ada anggota jang mendapat kesoesahan, seperti sakit, meninggal doenia dan lain-lain sebagainja.

c. menambah pengetahoean anggota-anggotanja dengan djalan mengadakan pembatjaan ataoe menoentoet peladjaran-peladjaran pada sesoeatoe sekolah waktoe sore ataoepoen pagi.

d. menjokong biaja sekolah anak-anak moerid perempoean bangsa Bali jang ditimpa kesoesahan misalnja : jang kepoetoesan biaja sekolah karena kematian orang toea ataoe orang jang menanggoeng.

e. Beroesaha memberi peladjaran membatja, menoelis dan berhitoeng sekedarnja kepada poetri-poetri bangsa Bali jang tak boleh bersekolah karena soedah liwat oemoer.

Art. 4. Tiap-tiap anggota diwadjibkan membajar ijoeran (contributie) tiap-tiap boelan f 0,10. Donateur f 0,50 tiap-tiap boelan ataoe f 5,– tiap-tiap tahoen sekaligoes.

Art. 5. Anggota diwadjibkan djoega memberi wang sokongan sesoeka hati tiap-tiap boelan kepada perkoempoelan jaitoe oentoek persediaan menolong (studiefonds) anak-

---

1). Dikutip dari : madjalah "Djatajoe" (no. 9, 25 April 1937), pp. 264 – 265.

anak moerid perempoean Bali jang kesoesahan biaja sekolah seperti jang terseboet di atas pada art 3 hoeroef d

Art. 6. Anggota diberhentikan sebab :

a. meninggal doniea.

b. Berkelakoean jang tiada sesoeai dengan toedjoean perkoempoelan.

c. Permintaan sendiri, jang haroes dilakoekan dengan soerat.

Art. 7. Hal-hal jang tiada terseboet di atas akan dipoetoeskan oleh rapat besar dari anggota-anggota.

Art. 8. Perkoempoelan ini didirikan moela-moela oleh :

1. I Goesti Ajoe Rapeg (Ketoea)
2. Anak Agoeng Rai (Wakil Ketoea)
3. Ni Loeh Kenteng (Penoelis Bendahari)
4. Ketoet Setiari (Anggota)
5. Made Tjateri (Anggota)

001297.2
G3.1

PN BALAI PUSTAKA — JAKARTA